

LAPORAN KINERJA 2021

DIREKTORAT PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI



DIREKTORAT PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI
GD. MANGALA WANABAKTI BLOK VII LT.7
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO- JAKARTA
TELP.021-5720229

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA 2021

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI

Blok VII Lt.7, Jl. Jenderal Gatot Subroto- JAKARTA

No.Telp. 021 5720 229. E-mail :ditkk@menlhk.go.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, bahwa dalam situasi pandemi Covid 19, dan proses transisi organisasi KLHK, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi ini dapat disusun tepat waktu. Laporan kinerja ini sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk memenuhi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Di Tengah situasi pandemi Covid 19 yang belum berakhir di tahun 2021 sangat berpengaruh pelaksanaan kegiatan, namun demikian capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik dengan rerata capaian sebesar 88.65 %. Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi pada tahun 2021 didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp. dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp 12.660.744.683,-atau 58,31 %.

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk manajemen Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, serta bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pencapaian target tahun 2021 serta seluruh pihak yang mendukung tersusunnya dokumen ini. Semoga kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi semakin meningkat setiap tahunnya. Amiin.

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi



Ir. Jefry Susyafrianto, MM

NIP. 19680404 199603 1004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024.

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi bertanggungjawab terhadap Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: 1. Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi 2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi. Dari kedua sasaran program tersebut di atas, diperinci menjadi tiga sasaran kegiatan, yaitu: 1) Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi; 2) Terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati. 3) Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2021 adalah: 1) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa; 2) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi dengan target 90.000 hektar) ; 3) Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani seluas 541.000 hektar, dan ; 4) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sebanyak 277 Unit KK.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pengelolaan Kawasan konservasi tahun 2021 adalah 88.65 %. IKK yang pertama, Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa teralisasi 468 desa atau 93,6 %. IKK yang ke dua yaitu Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ditargetkan 90.000 hektar teralisasi 50.632,8 Ha hektar atau 56,25%. IKK Ketiga yaitu Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani ditargetkan 541.000 hektar terrealisasi 550.992 Hektar atau 101,85%. Sedangkan IKK ke-empat: Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya ditargetkan 277 Unit KK teralisasi 285 Unit KK atau 102,89 %. Secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai, hanya satu IKK



yang capaiannya dibawah 90 % yaitu pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat melalui kemitraan konservasi. Kendala yang paling berpengaruh terhadap capaian kinerja adalah pandemic COVID 19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk refocusing anggaran untuk penanganan pandemi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi tahun 2021, anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi yang digunakan untuk mendukung capaian IKK adalah sebesar Rp. 12.660.744.683,- atau 58.32% dari pagu sebesar Rp 21.713.959.000,- Realisasi yang rendah disebabkan oleh realisasi kegiatan yang bersumber dari Kegiatan HLN Biodiversity Leuser (BCCPGLE). Dari pagu kegiatan BCCPGLE sebesar: Rp. 16,427,946,000,- terealisasi Rp. 7,548,280,680 (45,95%). Rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh perpanjangan baru proyek BCCPGLE baru dilaksanakan pada pertengahan tahun pada 2021 yang menyebabkan menyebabkan akan menyebabkan kemunduran waktu pelaksanaan. Selain itu, kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang menggunakan rekening khusus baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2021, sehingga waktu efektif pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. Selain itu, untuk kegiatan pengelolaan Kawasan konservasi yang dilakukan ditingkat tapak (UPT) realisasi anggaran yang diserap sebesar Rp. 218.478.916.027,- atau 88,97 % dari pagu yang dialokasikan Rp. 245.562.635.000,- Dengan membandingkan capaian kinerja yang menunjukkan diatas capaian kinerja anggaran, diperoleh efisiensi senilai 1,52 yang dikategorikan sebagai kinerja yang efisien.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	16
B. RENCANA KERJA TAHUN 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA.....	22
B. REALISASI ANGGARAN.....	76
BAB IV PENUTUP	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024	17
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	18
Tabel 3. Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2021	19
Tabel 4. Rencana Kerja tahun 2021 berdasarkan Rincian output dan Komponen	20
Tabel 5. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2021	22
Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024	23
Tabel 7. Capaian IKK Jumlah Desa dikawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.....	24
Tabel 8. Kemitraan Konservasi Berdasarkan Jenis Ruang Lingkup	31
Tabel 9. Capaian Luas kemitraan berdasarkan fungsi kawasan.....	32
Tabel 10. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan UPT Pengelola Kawasan Konservasi	32
Tabel 11. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Non Taman Nasional	34
Tabel 12. Sebaran kemitraan konservasi berdasarkan jenis akses.....	35
Tabel 13. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Akses ..	36
Tabel 14. Jumlah Masyarakat Penerima Akses Berdasarkan Sebaran Provinsi	38
Tabel 15. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Sebaran Region	39
Tabel 16. Capaian kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat tahun 2020 dan 2021	40
Tabel 17. Pelaksanaan kegiatan supervisi, koordinasi dan monitoring kemitraan konservasi.....	43
Tabel 18. Capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem tahun 2021	46
Tabel 19. Permohonan Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat yang telah disetujui Dirjen KSDAE.....	47
Tabel 20. Permohonan Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem yang telah mendapat persetujuan Dirjen KSDAE	47
Tabel 21. Total persetujuan kemitraan konservasi yang telah mendapat persetujuan Dirjen KSDAE	47
Tabel 22. Capaian luas penanganan <i>opened area</i> tahun 2021	48
Tabel 23. Rincian luas <i>opened area</i> kawasan konservasi yang ditangani.....	48
Tabel 24. Progres penanganan dan penyelesaian konflik tenurial	50
Tabel 25. Manfaat kegiatan penanganan konflik tenurial.....	51
Tabel 26. Target Pemulihan Ekosistem tahun 2020 - 2024	52
Tabel 27. Capaian Pemulihan Ekosistem tahun 2021	53



Tabel 28. Hasil penilaian efektifitas pengelolaan KK tahun 2021	63
Tabel 29. Unit KK yang belum memiliki nilai efektivitas pengelolaan	68
Tabel 303. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Rincian Output.....	76
Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	13
Gambar 2 . Sebaran Pegawai setelah penyerhanaan struktur organisasi	14
Gambar 3. Grafik pegawai berdasarkan Jabatan	14
Gambar 4. Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	14
Gambar 5. Sebaran pegawai berdasarkan golongan.....	15
Gambar 6. Sebaran pegawai berdasarkan Umur	15
Gambar 7. Sebaran pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 8. Peta Desa Kesepakatan Konservasi Tahun 2021	25
Gambar 9. Penandatanganan kesepakatan konservasi Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Pemerintah desa di sekitar kawasan taman nasional (Dok BTN Babul).....	25
Gambar 10. Persentase Capaian Kesepakatan Konservasi per Regional sampai tahun 2021	26
Gambar 11. Kelompok Hidroponik Kartika di Desa Pulau Majang binaan Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum (Dok BBTNBKDS	27
Gambar 12. Pemberian Penghargaan pada Puncak Peringatan HKAN 2021 di Nusa Tenggara Timur (Dok. Bisro Sya'bani).....	28
Gambar 13. ToT Teknik Fasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat	28
Gambar 14. ToT Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Ramah Lingkungan	29
Gambar 15. Cover buku "Senandung Merdu Punggawa Taman"	29
Gambar 16 Luas Capaian Area Kemitraan Konservasi Tahun 2021 (Ha).....	31
Gambar 17. Grafik Kemitraan Konservasi Berdasarkan Jenis Akses	34
Gambar 18. Grafik potensi dalam area kemitraan konservasi	35
Gambar 19. Grafik masyarakat yang terlibat pada luas area kemitraan berdasarkan pada jenis akses.....	37
Gambar 20. Grafik sebaran kemitraan konservasi berdasarkan provinsi	38
Gambar 21. Grafik area kemitraan konservasi berdasarkan region	39
Gambar 22. Peta <i>opened area</i> terindikasi berkonflik di Kawasan konservasi	49
Gambar 23. Buku pedoman penanganan konflik tenurial Kawasan konservasi	50
Gambar 24. Capaian pemulihan ekosistem tahun 2021 berdasarkan jenis perlakuan	54
Gambar 25. Grafik target dan Realisasi pemulihan ekosistem tahun 2021	54
Gambar 26. Target dan Realisasi pemulihan ekosistem secara kumulatif	55
Gambar 27. Realisasi Pemulihan Ekosistem Tahun 2021 berdasarkan sumber anggaran	55
Gambar 28. Fasilitasi kemitraan konservasi pada masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Sinarresmi dan Kasepuhan Ciptamulya di kawasan TNGHS, 2021	59
Gambar 29. Monitoring lokasi calon pemulihan ekosistem di TWA Gunung Singgalang Tandikat (BKSDA Sumatera Barat)	59
Gambar 30. Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pemulihan Ekosistem	59

Gambar 31. Fasilitasi calon mitra kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di TWAL Pulau Weh	60
Gambar 32. Monev lokasi Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi di Tahura Sultan Syarif Hasyim	60
Gambar 33. Monitoring lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di TWA Bukit Kaba (BKSDA Bengkulu)	60
Gambar 34. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem di Balai KSDA Kalimantan Timur ..	61
Gambar 35. Uji petik penyusunan NSPK Pemulihan Ekosistem di Balai KSDA Kalimantan Selatan	61
Gambar 36. Grafik hasil penilaian efektivitas pengelolaan KK tahun 2021	64
Gambar 37. Kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK TN Wasur Tahun 2021	65
Gambar 38. Aktivitas Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK TN Wasur Tahun 2021	65
Gambar 39. Dinamika penilaian efektivitas pengelolaan KK.....	66
Gambar 40. Penilaian efektivitas pengelolaan KK lingkup BKSDA Aceh.....	66
Gambar 41. Capaian efektifitas Pengelolaan KK per tahun.....	67
Gambar 42. Grafik nilai rata-rata efektivitas pengelolaan KK	68
Gambar 43. Perbandingan kategori efektivitas pengelolaan KK di Indonesia tahun 2020 dan 2021.....	69
Gambar 44. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem.....	75
Gambar 45. Peran perempuan Aceh Tenggara dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021	84
Lampiran 2. Capaian Kesepakatan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2021	88
Lampiran 3. Data Capaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2021	126
Lampiran 4. Baseline Data Penilaian efektivitas Pengelolaan KK tahun 2021	134
Lampiran 5. Capaian penanganan konflik tenurial pada Kawasan Konservasi Tahun 2021	150
Lampiran 6. Capaian Pemulihan Ekosistem tahun 2021	154
Lampiran 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT	158

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024.

Direktorat Kawasan Konservasi sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Konservasi bertanggungjawab terhadap Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: 1. Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi 2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi. Dari kedua sasaran program tersebut di atas, diperinci menjadi tiga sasaran kegiatan dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024, yaitu: 1) Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi; 2) Terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati . 3) Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2021 adalah : 1) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa; 2) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi dengan target 90.000 hektar) ; 3) Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani seluas 541.000 hektar, dan ; 4) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sebanyak 277 Unit KK.

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebesar Rp 10.500.000.000. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi sebesar Rp 5.286.013.000,- Anggaran belanja yang di refocusing sebesar Rp 5.213.987.000,- adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting dan anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan. Namun demikian, refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja dan belanja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi . Selain itu, Direktorat Pengelolaan Kawasan



Konservasi juga mengelola Project BCCPGLE dengan anggaran Lokasi Proyek BCCPGLE berada di Balai Besar TN Gunung Leuser dan KSDA Aceh. Sehingga total pagu Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar : 16.427.946.000,- Selain itu, untuk kegiatan pengelolaan Kawasan konservasi yang dilakukan ditingkat tapak (UPT) pagu yang dialokasikan Rp. 245.562.635.000,-

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK No.15 Tahun 2021 Direktorat Kawasan Konservasi berubah nomenklturnya menjadi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya. Sedangkan fungsinya adalah :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sebelumnya bernama Direktorat Kawasan konservasi yaitu melalui penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Penyederhanaan Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

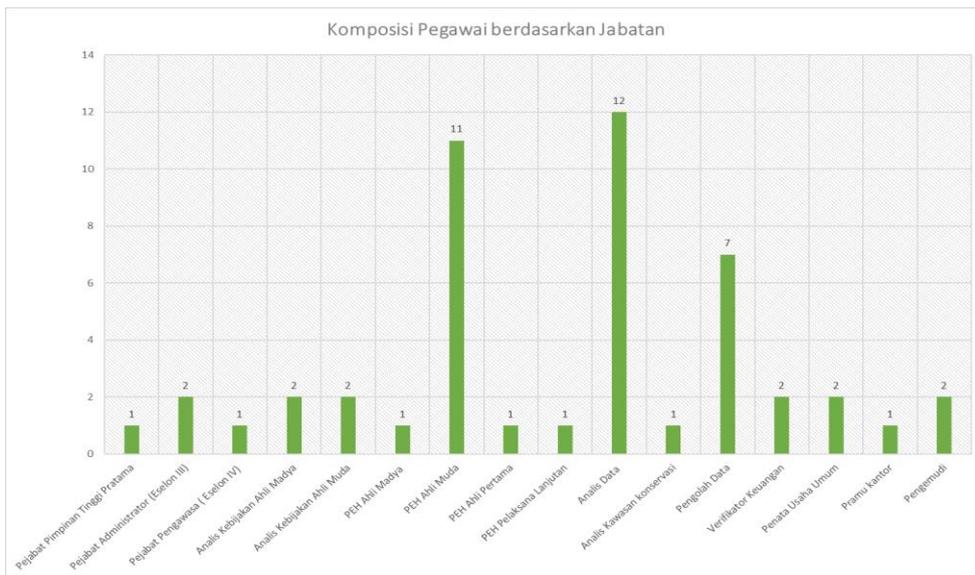


Gambar 1. Perubahan struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

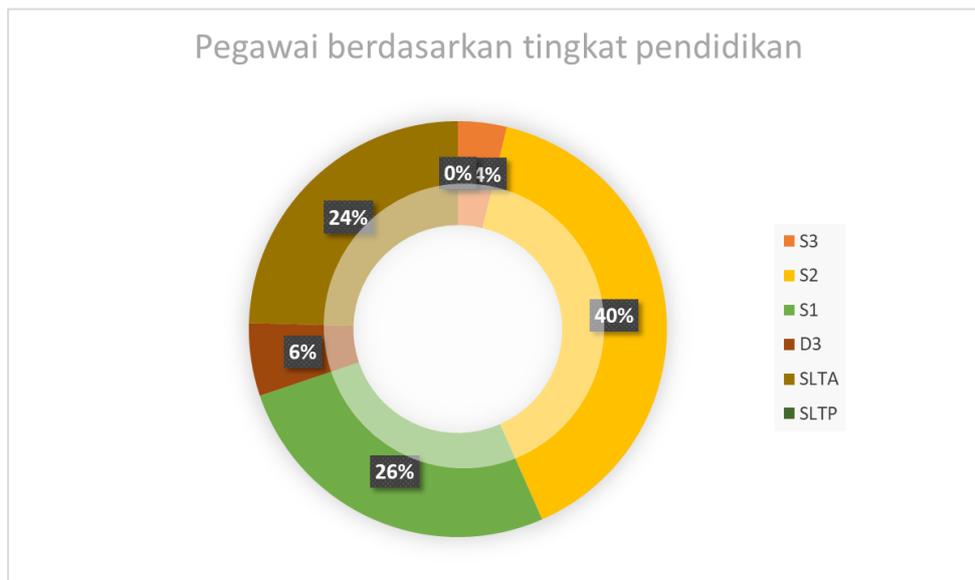
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi didukung oleh 55 pegawai terdiri dari 42 orang ASN dan 13 orang PPNPN yang tersebar di setiap Sub Direktorat dan Subbagian tata usaha



Gambar 2 . Sebaran Pegawai setelah penyerhanaan struktur organisasi

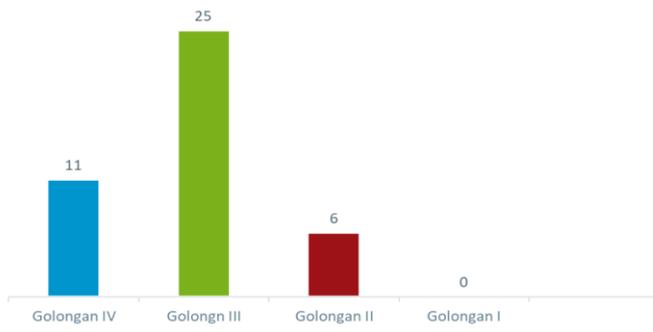


Gambar 3. Grafik pegawai berdasarkan Jabatan



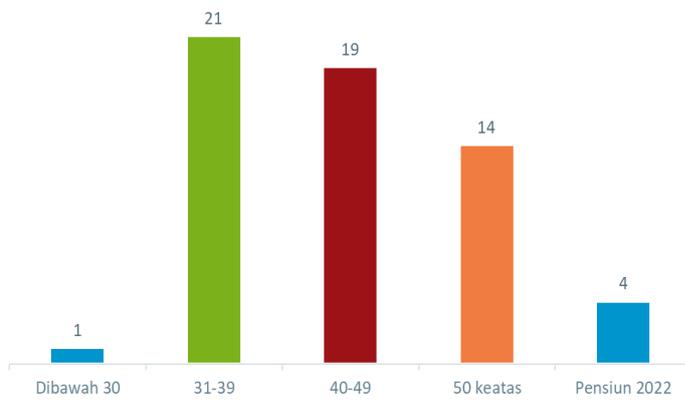
Gambar 4. Pegawai berdasarkan Pendidikan

SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

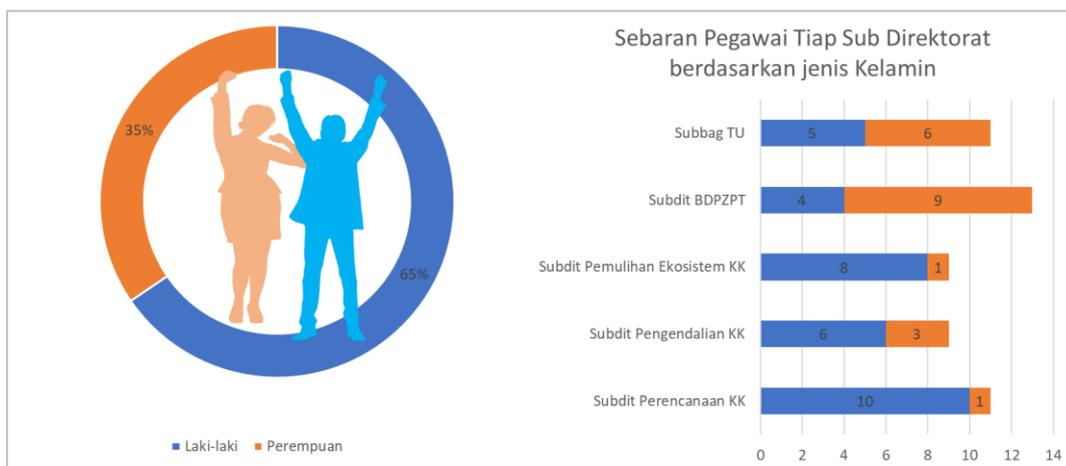


Gambar 5. Sebaran pegawai berdasarkan golongan

SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN UMUR



Gambar 6. Sebaran pegawai berdasarkan Umur



Gambar 7. Sebaran pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

“Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE:

“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal KSDAE:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Revisi Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2014 merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Renstra Kementerian LHK akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Mengacu pada Revisi Renstra Kementerian LHK, maka pada Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024 (revisi) mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

Program Lama	Program Baru	Kegiatan Lama	Kegiatan Baru
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggungjawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Renstra disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator	Target s/d 2024	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati	70 juta hektar	Dit. RKK
2	Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	12 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG
4	Meningkatnya PNPB dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari,	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 Milyar Rupiah	Dit. PJLKK
5	Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4.500 Desa	Dit. PKK
6	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 juta hektar	Dit. BPPE
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Setditjen KSDAE

Berdasarkan perubahan tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi penanggungjawab 1 kegiatan di program yaitu: “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi” dengan target komulatif sampai akhir tahun 2024 sebanyak 4.500 Desa”

B. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Tahun 2021, Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan target kegiatan pengelolaan kawasan konservasi yang hendak di capai sebagai bentuk perjanjian kinerja di awal tahun. Pada bulan November tahun 2021 dilakukan revisi perjanjian kinerja oleh karena adanya refocusing anggaran. Revisi dimaksud tidak mengurangi target kinerja namun merivisi jumlah anggaran yang diakokasikan oleh karena adanya kebijakan refocusing anggaran.

Disamping itu, pada tahun 2021 juga mulai dibahas terkait dengan revisi rencana strategis 2020-2024 oleh karena bergulirnya pembahasan mengenai penyederhanaan birokrasi yang mendorong perubahan struktur organisasi dan tata kerja KLHK sehingga juga akan berdampak pada penyesuaian arsitektur perencanaan dan penganggaran oleh karena adanya perubahan tugas dan fungsi pada masing-masing Direktorat. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh pada perubahan IKK dan target pada perencanaan tahun 2021. Perubahan IKK dan target akan dilakukan pada tahun 2023 dengan proses transisi pada tahun 2022.

Sehingga target kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2021

Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Sasaran Kegiatan	1. Terjaminnya Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi 2. Terjaminnya penanganan <i>opened area</i> untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati 3. Terjaminnya efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	500 desa

	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 hektar
	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	541.000 hektar
	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	277 unit KK
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5421.PBV.001 - Kebijakan Penanganan area terbuka (<i>Opened area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani 2. 5421.PBV.003 - Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi 3. 5421.PBV.004 Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi 4. 5421.PBV.005 - Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 5. 5421.BDB.003- HLN Biodiversity Leuser 	
Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat : Rp. 21.713.959.000,- 2. UPT : Rp. 245.562.635.000,- 	

Sedangkan output dan Komponen dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja tahun 2021 berdasarkan Rincian output dan Komponen

Rincian Output	Komponen
Kebijakan Penanganan area terbuka (<i>Opened area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani (Rekomendasi Kebijakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa
Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK



Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1 Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi
	Pemberian akses kelola kepada masyarakat
Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	1 Perencanaan kelola Kawasan Konservasi
	Penilaian efektivitas kawasan konservasi
	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
	Pengendalian Kebakaran Hutan
HLN Biodiversity Leuser (Kegiatan)	1 HLN Biodiversity Leuser

Sebagai penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi memantau pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh UPT. Selama tahun 2021 Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT mencapai Rp. 245,562,635,000,- termasuk anggaran yang tercatat sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Hibah Luar Negeri. Anggaran tersebut tersebar di 74 UPT baik UPT Taman Nasional maupun UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indaktor Kinerja Kegiatan (IKK) pengelolaan Kawasan konservasi tahun 2021 adalah 88.65 %. IKK yang pertama, Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa teralisasi 468 desa atau 93,6 %. IKK yang ke dua yaitu Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ditargetkan 90.000 hektar teralisasi 50.632,8 hektar atau 56,25%. IKK Ketiga yaitu Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani ditargetkan 541.000 hektar terrealisasi 550.992 Hektar atau 101,85%. Sedangkan IKK ke empat Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya ditargetkan 277 Unit KK terealisasi 285 Unit KK atau 102,89 %. Secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai, hanya satu IKK yang capaiannya dibawah 90 % yaitu pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat melalui kemitraan konservasi. Secara lengkap capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawan konservasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500 desa	93,6 %
		Capaian	468 desa	
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	90.000 hektar	56,25 %
		Capaian	50.632,8 hektar	
				88,65%
IKK 3	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Target	541.000 hektar	101,85 %
		Capaian	550.992 Hektar	
IKK 4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Target	277 Unit KK	102,89%
		Capaian	285 Unit KK	

Dengan melihat pada capaian-capaian kinerja tahun sebelumnya maka, pada periode tahun ke dua Renstra Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024, maka capaian dari masing-masing IKK adalah sebagai berikut : IKK 1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 adalah 98,9 %; IKK 2, Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi tercapai 78,71%; IKK 3, Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani tercapai 101,85 %; dan IKK 4, Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya tercapai 102,89 %. Sehingga rata-rata capaian sampai dengan tahun 2021 adalah 95.95%. Detail dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	1.000	1.500	2.000	2.500
		Capaian	521 (104,2%)	989 (98,9%)	-	-	-
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
		Capaian	59.570,62 (119,1%)	110.203,42 (78,71%)	-	-	-
IKK 3	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Target	1.298.500	541.000	526.000	511.000	495.000
		Capaian	1.298.500 (100%)	550.992 (102%)			
IKK4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Target	132	277	277	277	277
		Capaian	129 (97,72%)	285 (102,89)	-	-	-
Rata-Rata Capaian			105.26%	95.95%			

IKK 1. Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi. Target IKK 2020-2024 pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar KK adalah sebanyak 2.500 desa dengan indikator adanya kesepakatan konservasi antara pemerintah desa dengan pengelola kawasan konservasi, adapun target desa yang mendapatkan pendampingan adalah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan dan atau desa yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi dengan kawasan tersebut.

Target kinerja tahun 2021 adalah sebanyak 1.000 desa dengan verifiser berupa adanya kesepakatan konservasi antara pengelola kawasan dengan pemerintah desa. Beberapa hal yang termuat dalam kesepakatan konservasi ini antara lain:

1. Pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kawasan konservasi
2. Dukungan pemerintah desa dalam upaya pelestarian kawasan konservasi
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi, utamanya dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif desa binaan

Dari target tersebut, terdapat realisasi sebanyak 989 desa yang telah melakukan kesepakatan konservasi atau sebesar 98,9% dari total target, pada 575 kecamatan, 233 kabupaten, dan 33 provinsi di sekitar 276 kawasan konservasi. Berikut capaian IKK “Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” dalam 2 tahun terakhir:

Tabel 7. Capaian IKK Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Tahun	Target Renstra	Target PK	Capaian Kumulatif (Desa)	Prosentase Capaian (%)
2020	500	500	521	104,2
2021	1000	1000	989	98,9



Gambar 8. Peta Desa Kesepakatan Konservasi Tahun 2021

Dari 74 Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE, terdapat 42 UPT yang telah mencapai atau melebihi target yang ditentukan. Sebanyak 32 UPT lainnya belum memenuhi target pencapaian, diantaranya Balai TN Komodo yang sama sekali belum pernah melaksanakan kesepakatan konservasi. Beberapa UPT yang telah memenuhi target antara lain: Balai Besar TN Leuser, Balai Besar TN Kerinci Seblat, Balai Besar TN Lore Lindu, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Balai TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti, Balai TN Wasur, dan lain-lain.

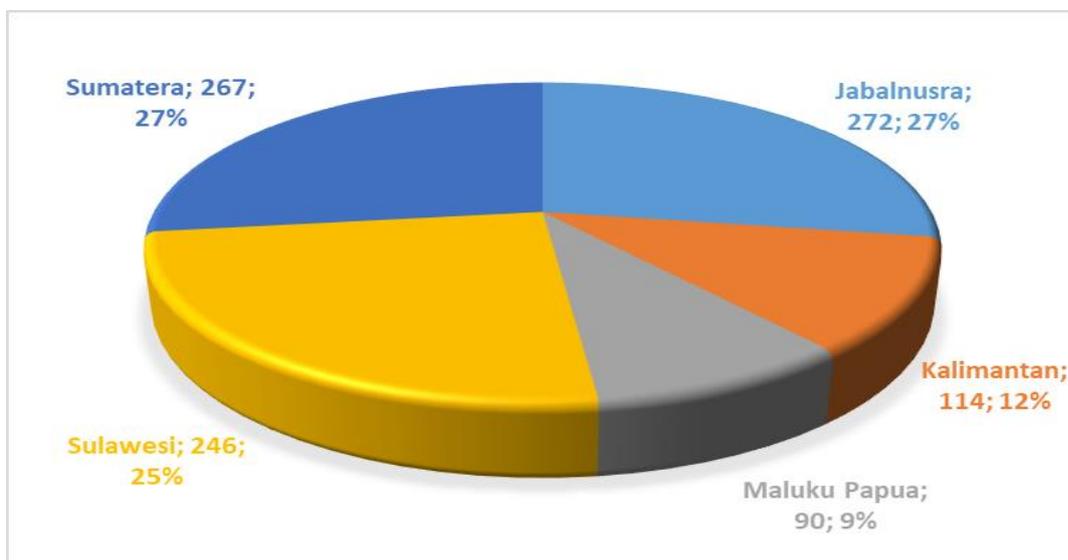
Faktor pendukung tercapainya target tersebut antara lain upaya pendampingan UPT yang intensif, dukungan pemerintah desa, serta peran mitra pengelola kawasan (LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama). Sebagian besar penandatanganan kesepakatan konservasi dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan ekonomi produktif pada kelompok-kelompok binaan di desa target.



Gambar 9. Penandatanganan kesepakatan konservasi Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Pemerintah desa di sekitar kawasan taman nasional (Dok BTN Babul)

Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam memenuhi pencapaian target dimaksud di atas antara lain adalah:

1. refocusing anggaran yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di UPT target.
2. perubahan pada personil pemerintahan desa, terutama pergantian kepala desa, di tengah proses kesepakatan konservasi. Materi kesepakatan belum dipahami oleh kepala desa pengganti sehingga dibutuhkan waktu untuk “memahamkan” kembali.
3. Masih adanya konflik agraria/ konflik tenurial pada lokasi target yang menyebabkan kepala desa belum bersedia untuk menandatangani kesepakatan konservasi.
4. Kondisi yang tidak kondusif pada lokasi target, sehingga belum dapat dilakukan penandatanganan kesepakatan konservasi.



Gambar 10. Persentase Capaian Kesepakatan Konservasi per Regional sampai tahun 2021

Kegiatan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan konservasi yang dilakukan UPT terhadap desa-desa sekitar kawasan konservasi antara lain: fasilitasi pembentukan kelompok, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, fasilitasi pendampingan kelompok (termasuk pendampingan pemasaran produk), peningkatan kapasitas kelompok, pemberian akses melalui kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, pendampingan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA).



Gambar 11. Kelompok Hidroponik Kartika di Desa Pulau Majang binaan Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum (Dok BBTNBKDS

Beberapa kegiatan pendukung Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi:

1. Penyusunan NSPK bidang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Beberapa NSPK telah dilakukan pembahasan pada tahun 2021 antara lain: pengembangan desa konservasi dan monitoring evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar KSA KPA. NSPK Pengembangan Desa Konservasi dan Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

2. Koordinasi dan supervisi pemberdayaan masyarakat Sekitar KSA KPA. Koordinasi dan supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan serta mengetahui perkembangan pencapaian IKK pendampingan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024.

3. Pemberian Anugerah Konservasi dalam rangka HKAN. Pemberian apresiasi terhadap 10 kelompok binaan UPT dan 11 pendamping kelompoknya lingkup Ditjen KSDAE berprestasi tahun 2021 diberikan pada pemenang sebagai berikut:

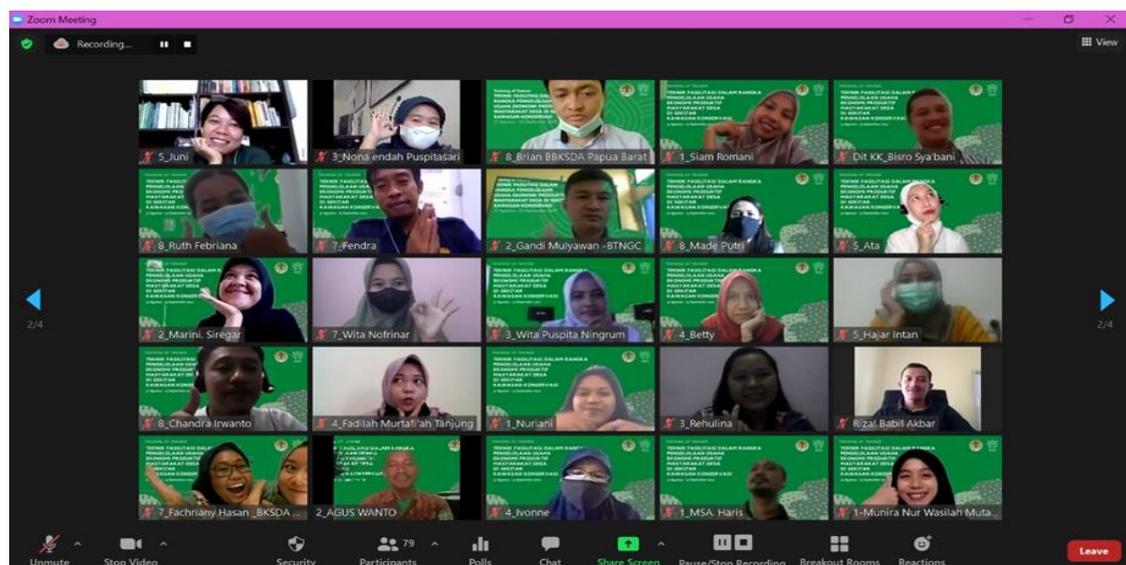
1. Kelompok Wanita Tani Hutan Semangat Baruga, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kab. Maros, BTN Bantimurung Bulusaraung.
2. SPKP Bintang Laut, Kelurahan Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kab. Adm. Kepulauan Seribu, Balai TN Kepulauan Seribu.
3. Kelompok Tani Hutan Waifoi, Kampung Waifoi, Distrik Tiplol Mayalibit, Kab. Raja Ampat, BBKSDA Papua Barat.
4. Kelompok Tani Hutan Danau Belibis, Desa Giri Mulyo, Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, BBTN Kerinci Seblat.
5. SPKP Wana Wira Sejahtera, Desa Kandangan, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, BTN Meru Betiri.
6. Kelompok Tani Hutan Matoa, Kampung Klasaman, Kec. Laurung, Kota Sorong, BBKSDA Papua Barat.
7. Kelompok Gunung Lanying, Desa Werdhi Agung Selatan, Kec. Dumoga Tengah, Kab. Bolaang Mongondow, BTN Bogani Nani Wartabone.

8. Kelompok Hidroponik Kartika, Desa Pulau Majang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum.
9. Pokdarwis Anak Kaki Gunung Sembilan, Desa Sembilan, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, BTN Gunung Palung.
10. Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Karya Mandiri, Desa Tebat Tenong Luar, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, BBTN Kerinci Seblat.



Gambar 12. Pemberian Penghargaan pada Puncak Peringatan HKAN 2021 di Nusa Tenggara Timur (Dok. Bisro Sya'bani)

4. ToT Teknik Fasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Konservasi pada tanggal 31 Agustus-23 September 2021 yang dilakukan secara daring, dengan jumlah peserta sebanyak 74 orang dari 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE, bekerja sama dengan PT Digdaya Selaras sebagai narasumber.

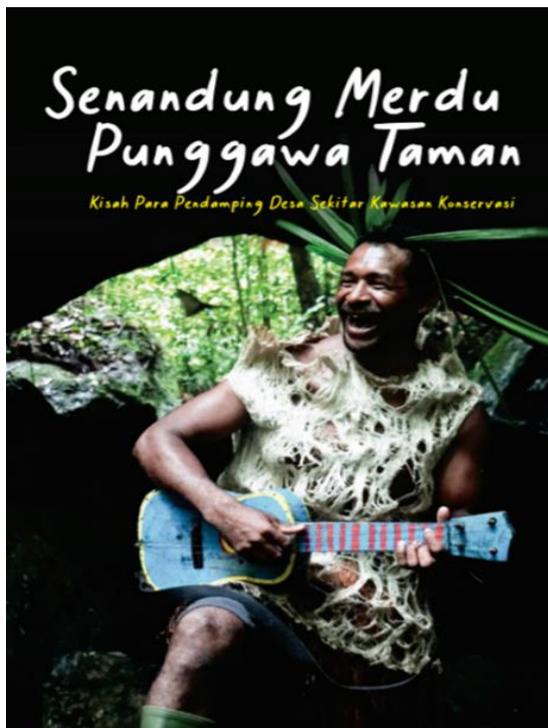


Gambar 13. ToT Teknik Fasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat

- ToT Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi pada tanggal 16 November-2 Desember 2021, dengan jumlah peserta sebanyak orang dari 74 UPT lingkup KSDAE, bekerja sama dengan Go UKM sebagai nara sumber.



Gambar 14. ToT Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Ramah Lingkungan



Gambar 15. Cover buku “Senandung Merdu Punggawa Taman”

- Pencetakan buku “Senandung Merdu Punggawa Taman” yang berisi catatan pendampingan dari 33 pendamping masyarakat pada 18 UPT lingkup Ditjen KSDAE

Manfaat yang tercipta dengan adanya kesepakatan konservasi sebagai verifier IKK “Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” antara lain sebagai berikut:

- Membangun tanggung jawab moral antara kedua belah pihak dalam rangka bersama-sama mendorong kelestarian kawasan konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui payung koordinasi yang baik antara pengelola kawasan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.
- Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konservasi alam.

- 
3. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh pengelola kawasan bersama mitra.

IKK 2. Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi

Berdasarkan PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemerintah harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, yang antara lain dilakukan melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional atau zona/blok yang memiliki fungsi untuk pemanfaatan tradisional kepada masyarakat setempat.

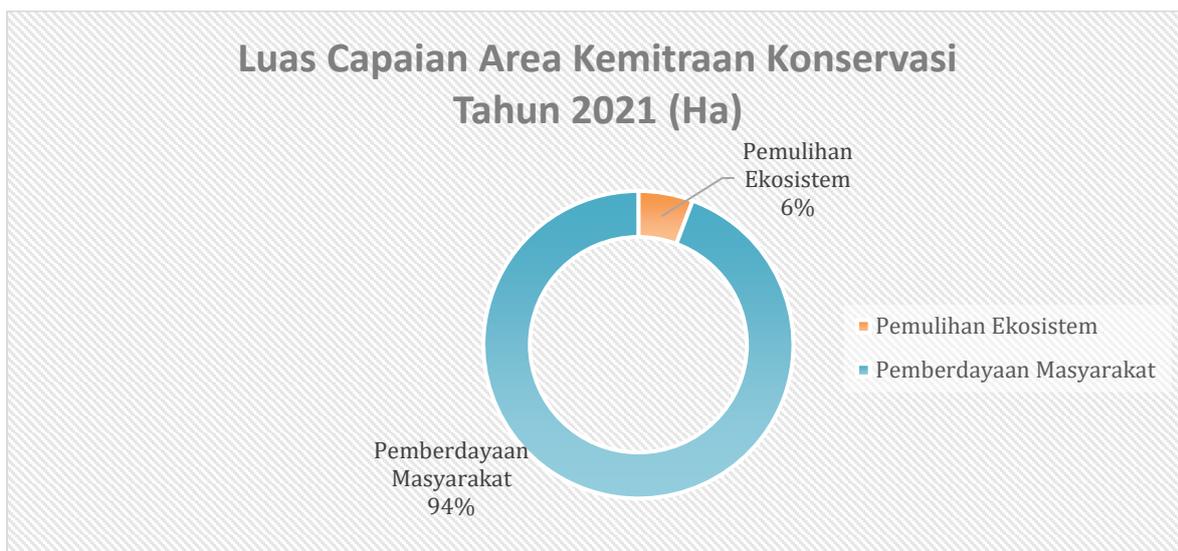
Sebagai pelaksanaan dari amanah PP tersebut, maka salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Renstra Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020 – 2024 adalah “Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi seluas 400.000 Ha” (IKK-2). Target tersebut diharapkan dapat dicapai selama 5 (lima) tahun, dengan target capaian tahun 2020 seluas 50.000 Ha, tahun 2021 seluas 90.000 Ha, tahun 2022 seluas 90.000 Ha, tahun 2023 seluas 90.000 Ha dan di tahun 2024 seluas 80.000 Ha. Target tersebut sama dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021, yaitu target untuk IKK “Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi” adalah seluas 90.000 Ha.

Kemitraan konservasi berdasarkan Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6 Tahun 2018 terdiri dari kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem. Kegiatan kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan di zona/blok tradisional, sedangkan untuk kegiatan pemulihan ekosistem dilakukan di zona/blok rehabilitasi. Jenis pemberian akses dalam kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat meliputi pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi serta wisata alam terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan wisata alam diatur melalui skema perijinan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Data capaian kerja sama kemitraan konservasi di tahun 2021 adalah seluas 50.632,8 Ha, yang terdiri dari kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat seluas 47.746,07 Ha (94%) dan pemulihan ekosistem seluas 2.886,73 Ha (6%), yang berada pada 38 kawasan konservasi di 31 unit pengelola kawasan (UPT) yang tersebar di 130 desa. Jumlah total perjanjian kerja sama kemitraan konservasi adalah 146 PKS dengan 146 mitra kelompok masyarakat/lembaga desa yang melibatkan 5.728 orang masyarakat di desa sekitar kawasan konservasi.

Tabel 8. Kemitraan Konservasi Berdasarkan Jenis Ruang Lingkup

Jenis Kemkon	UPT	Kaw. Konservasi	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
Pemulihan Ekosistem	8	9	20	37	1.595	2.886,73
Pemberdayaan Masyarakat	24	30	110	109	4.133	47.746,07
Grand Total	31	38	130	146	5.728	50.632,80



Gambar 16 Luas Capaian Area Kemitraan Konservasi Tahun 2021 (Ha)

Berdasarkan data capaian kemitraan konservasi tersebut di atas, pencatatan untuk capaian IKK-2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dilakukan hanya untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di zona/blok tradisional, seluas 47.746,07 Ha. Jika dibandingkan dengan target IKK-2 seluas 90.000 Ha, maka capaian IKK-2 tahun 2021 hanya mencapai 53%.

Capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2021 tersebar di 30 kawasan konservasi yang dikelola oleh 24 UPT TN/KSDA lingkup Ditjen KSDAE. Berdasarkan fungsi kawasan konservasi, capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebar pada 24 kawasan taman nasional, 3 kawasan

taman wisata alam laut, 2 kawasan taman wisata alam dan 1 taman buru. Luasan area kemitraan konservasi terbesar berada di kawasan taman nasional seluas 45.296,98 Ha dengan melibatkan 4.011 masyarakat di 110 desa di sekitar kawasan konservasi.

Tabel 9. Capaian Luas kemitraan berdasarkan fungsi kawasan

Fungsi KK	Kaw. Konservasi	UPT	Masyarakat	Desa	Luas Kemkon (Ha)
Taman Nasional	24	21	4.011	103	45.296,98
Taman Wisata Alam Laut	3	2	52	3	1.241,15
Taman Wisata Alam	2	2	55	3	1.182,11
Taman Buru	1	1	15	1	25,83
Grand Total	30	24	4.133	110	47.746,07

Capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di tahun 2021, untuk wilayah perairan, area kemitraan konservasi terluas berada di BTN Karimunjawa seluas 10.953,98 Ha berupa pemberian akses untuk jenis pemanfaatan sumberdaya perairan jenis yang tidak dilindungi berupa penangkapan ikan konsumsi dan budidaya ikan, rumput laut dan lobster. Area kemitraan konservasi di wilayah daratan yang terluas di BTN Bukit Duabelas seluas 6.777,04 Ha berupa pemberian akses pemungutan HHBK sebagian besar berupa pemungutan getah karet, potensi lain yang juga dimanfaatkan adalah jenis rotan, jengkol, petai, durian, duku, umbi, madu, tumbuhan obat, getah damar, kepayong, dan enau. Keterlibatan masyarakat paling banyak dijumpai di BTN Gunung Merbabu dengan pengakses sebanyak 1.686 orang dari 16 desa, berupa pemberian akses pemungutan HHBK jenis rumput-rumputan dan dedaunan seluas 613,50 Ha. Sedangkan berdasarkan jumlah desa yang terlibat dalam kemitraan konservasi adalah UPT BTN Lorelindu dengan total 20 desa dan total masyarakat terlibat sebanyak 413 orang.

Tabel 10. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan UPT Pengelola Kawasan Konservasi

Pengelola	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
BTN Karimunjawa	1	1	26	10.953,98
BBTN Teluk Cenderawasih	2	4	75	6.841,00
BTN Bukit Duabelas	13	3	81	6.777,04
BTN Kepulauan Togean	8	10	146	5.303,32
BTN Wakatobi	2	2	91	4.000,00
BBTN Lore Lindu	20	20	413	3.250,71

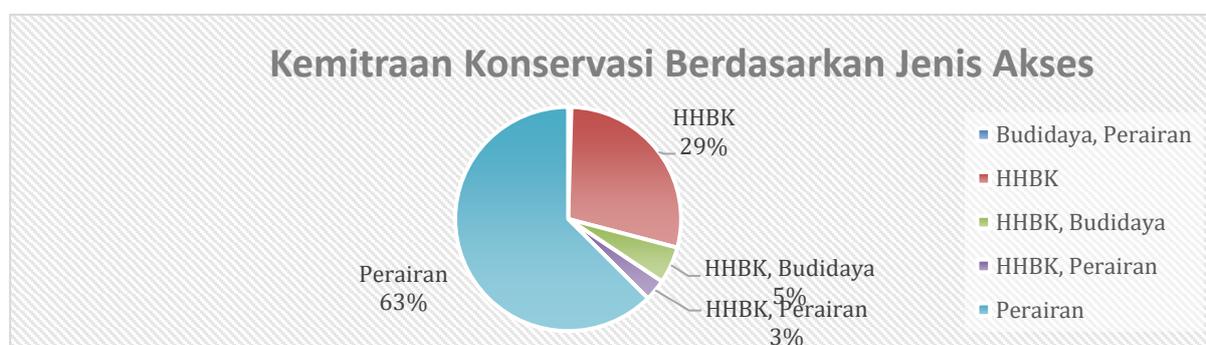
Pengelola				Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
BBTN	Betung	Kerihun	Danau	5	6	193	2.528,94
Santarum							
BKSDA Sulawesi Tenggara				3	3	42	2.000,00
BTN Lorentz				1	2	30	1.420,69
BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti				8	8	163	954,57
BTN Komodo				1	1	200	724,18
BTN Gunung Merbabu				16	16	1.686	613,50
BTN Rawa Aopa Watumohai				2	2	35	500,00
BTN Siberut				1	2	30	410,00
BBKSDA NTT				3	3	56	266,98
BTN Gunung Halimun Salak				6	7	143	259,66
BTN Gunung Rinjani				2	2	90	189,47
BBKSDA Sulawesi Selatan				1	1	24	182,11
BBTN Kerinci Seblat				5	5	100	169,80
BTN Gunung Tambora				1	1	50	144,35
BBTN Gunung Gede Pangrango				2	3	94	89,67
BTN Batang Gadis				4	4	80	83,43
BTN Gunung Merapi				2	2	276	57,97
BTN Kepulauan Seribu				1	1	9	24,69
Grand Total				110	109	4.133	47.746,07

Terdapat 6 kawasan konservasi non taman nasional di 3 UPT yang juga telah melakukan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Luas area kemitraan konservasi untuk kawasan konservasi non taman nasional seluas 2.449,09 Ha, dengan area kemitraan paling luas berada di UPT BKSDA Sulawesi Tenggara di TWA Teluk Lasolo dan TWAL Kepulauan Padamarang, masing-masing seluas 1.000 Ha untuk jenis akses pemanfaatan sumberdaya perairan berupa penangkapan ikan serta budidaya ikan dan lobster. Kecuali TWA Nanggala III di BKSDA Sulawesi Selatan, 5 kawasan konservasi lainnya memberikan akses berupa pemanfaatan sumber daya perairan untuk jenis yang tidak dilindungi. Pemberian akses pemanfaatan kawasan di blok tradisional di TWA Nanggala III berupa pemungutan HHBK jenis cengkeh, kopi, aren, dan madu.

Tabel 11. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Non Taman Nasional

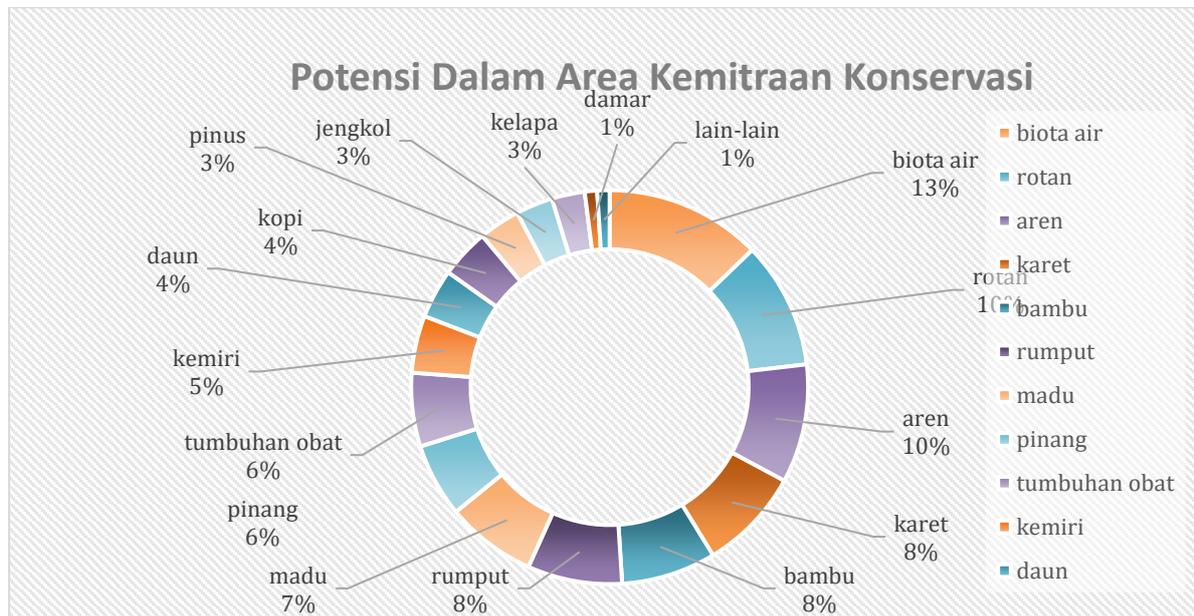
Pengelola	Kaw. Konservasi	Masyarakat	Desa	Luas Kemkon (Ha)
BBKSDA NTT	TB Bena	15	1	25,83
	TWAL Teluk Kupang	21	1	221,15
	TWAL Teluk Maumere	20	1	20,00
Total BBKSDA NTT		56	3	266,98
BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA Nanggala III	24	1	182,11
Total BBKSDA Sulawesi Selatan		24	1	182,11
BKSDA Sulawesi Tenggara	TWA Teluk Lasolo	31	2	1.000,00
	TWAL Kepulauan Padamarang	11	1	1.000,00
Total BKSDA Sulawesi Tenggara		42	3	2.000,00
Grand Total		122	7	2.449,09

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan potensi kawasan konservasi secara lestari. Pemberian akses tersebut meliputi kegiatan pemungutan HHBK, budidaya tradisional, perburuan tradisional dan pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Pemberian akses terhadap kelompok masyarakat dituangkan dalam dokumen kerja sama kemitraan konservasi (PKS) antara Kepala UPT setempat dengan ketua kelompok masyarakat. Pada tahun 2021, total telah ditandatangani 109 dokumen PKS (109 mitra kelompok masyarakat), dengan jumlah masyarakat yang telah mendapatkan akses sebanyak 4.133 orang. Pemungutan HHBK merupakan akses yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 3.173 orang (78%), sedangkan berdasarkan area kemitraan konservasi yang terluas yang diakses oleh masyarakat adalah untuk pemanfaatan sumber daya perairan untuk jenis yang tidak dilindungi seluas 29.833,48 Ha (62%) dan pemungutan HHBK seluas 13.681,30 Ha (29%).



Gambar 17. Grafik Kemitraan Konservasi Berdasarkan Jenis Akses

Potensi kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di zona/blok tradisional antara lain berupa biota perairan (berbagai jenis ikan, kepiting, lobster, udang), rotan, aren, karet, dan bambu, dengan prosentase pemanfaatan sebagaimana grafik di bawah.



Gambar 18. Grafik potensi dalam area kemitraan konservasi

Sebaran kemitraan konservasi berdasarkan jenis akses yang diberikan di masing-masing UPT sebagai berikut:

Tabel 12. Sebaran kemitraan konservasi berdasarkan jenis akses

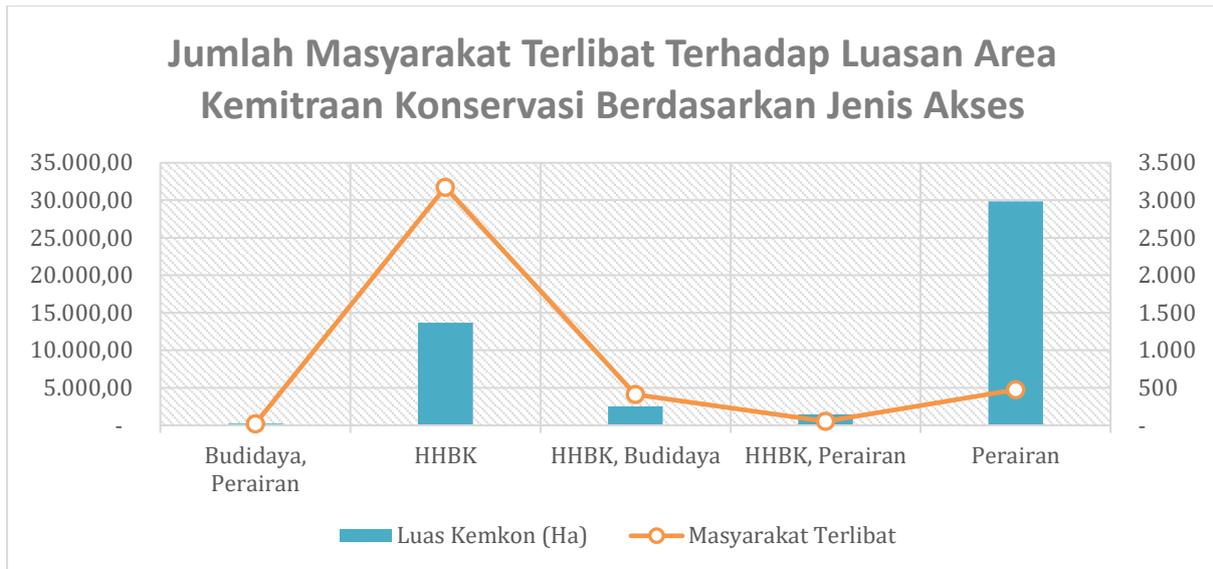
Pengelola	Perairan	HHBK	HHBK, Budidaya	HHBK, Perairan	Budidaya, Perairan	Luas Kemkon (Ha)
BTN Karimunjawa	10.953,98					10.953,98
BBTN Teluk Cenderawasih	6.841,00					6.841,00
BTN Bukit Duabelas		6.777,04				6.777,04
BTN Kepulauan Togean	4.342,61	960,71				5.303,32
BTN Wakatobi	4.000,00					4.000,00
BBTN Lore Lindu		1.250,64	2.000,07			3.250,71
BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	1.125,37	1.403,57				2.528,94
BKSDA Sulawesi Tenggara	2.000,00					2.000,00
BTN Lorentz				1.420,69		1.420,69
BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti		524,37	370,92	59,28		954,57
BTN Komodo		724,18				724,18

Pengelola	Perairan	HHBK	HHBK, Budidaya	HHBK, Perairan	Budidaya, Perairan	Luas Kemkon (Ha)
BTN Gunung Merbabu		613,50				613,50
BTN Rawa Aopa Watumohai	500,00					500,00
BTN Siberut		410,00				410,00
BBKSDA NTT	45,83				221,15	266,98
BTN Gunung Halimun Salak		259,66				259,66
BTN Gunung Rinjani		189,47				189,47
BBKSDA Sulawesi Selatan		182,11				182,11
BBTN Kerinci Seblat		169,80				169,80
BTN Gunung Tambora		144,35				144,35
BBTN Gunung Gede Pangrango			89,67			89,67
BTN Batang Gadis		13,93	69,51			83,43
BTN Gunung Merapi		57,97				57,97
BTN Kepulauan Seribu	24,69					24,69
Grand Total	29.833,48	13.681,30	2.530,17	1.479,97	221,15	47.746,07

Capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berdasarkan jenis akses yang diberikan meliputi pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak dilindungi seluas 29.833,48 Ha (62%), pemungutan HHBK seluas 13.681,30 Ha (29%), kombinasi pemungutan HHBK dan budidaya tradisional seluas 2.530,17 Ha (5%), serta kombinasi pemungutan HHBK dan pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak dilindungi seluas 1.479,97 Ha (3%).

Tabel 13. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Akses

Jenis Akses	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
Perairan	19	21	475	29.833,48
HHBK	71	65	3.173	13.681,30
HHBK, Budidaya	18	19	410	2.530,17
HHBK, Perairan	2	3	54	1.479,97
Budidaya, Perairan	1	1	21	221,15
Grand Total	110	109	4.133	47.746,07



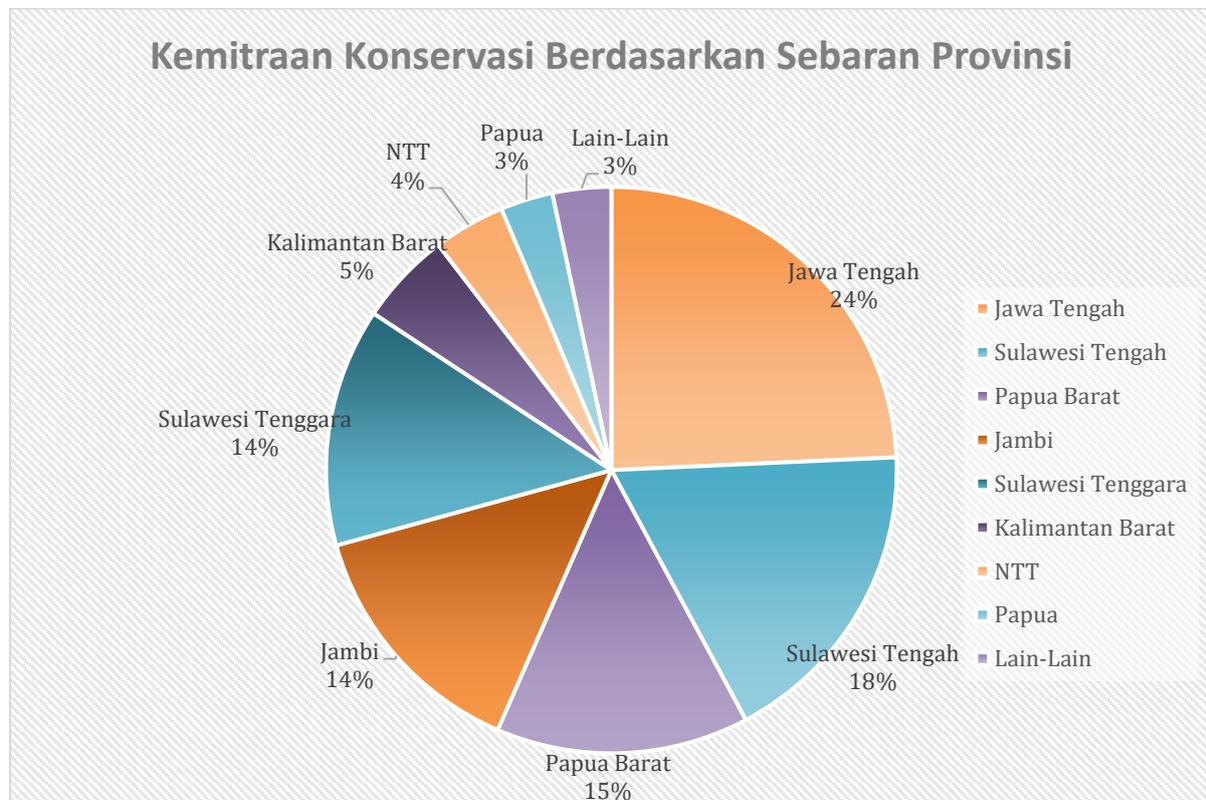
Gambar 19. Grafik masyarakat yang terlibat pada luas area kemitraan berdasarkan pada jenis akses

Berdasarkan data luasan area kemitraan konservasi dengan jumlah masyarakat yang mengakses diketahui bahwa masyarakat disekitar kawasan konservasi masih sangat bergantung kehidupannya dari potensi HHBK dari dalam kawasan. Berbeda dengan potensi kawasan di wilayah perairan yang lebih luas namun lebih sedikit masyarakat yang mengakses. Hal ini juga berkaitan dengan lokasi kawasan yang berhutan dan kebiasaan dan mata pencaharian turun temurun seperti berkebun, bercocok tanam, berburu dan meramu.

Area capaian kemitraan konservasi di tahun 2021 berada di 110 desa disekitar kawasan konservasi yang tersebar di 68 kecamatan, 38 kabupaten dan 17 provinsi. Area kemitraan konservasi terluas berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 11.592,72 Ha, dengan jumlah masyarakat terlibat sebanyak 1.836 orang. Area kemitraan konservasi di Jawa Tengah berada di 3 kawasan konservasi yaitu di TN Karimunjawa seluas 10.953,98 Ha untuk pemanfaatan sumber daya perairan, TN Gunung Merbabu seluas 613,5 Ha dan TN Gunung Merapi seluas 25,24 Ha untuk pemanfaatan HHBK jenis rumput-rumputan. Desa terbanyak yang terlibat dalam kerja sama kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 28 desa. Potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain rotan, bambu, pandan hutan, pinang hutan, kulit kayu, anggrek, aren, sarang semut, benalu, bajaka akar kuning, dan jamur hutan.

Tabel 14. Jumlah Masyarakat Penerima Akses Berdasarkan Sebaran Provinsi

Provinsi	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
Jawa Tengah	18	18	1.836	11.592,72
Sulawesi Tengah	28	30	559	8.554,03
Papua Barat	2	4	75	6.841,00
Jambi	13	3	81	6.777,04
Sulawesi Tenggara	7	7	168	6.500,00
Kalimantan Barat	5	6	193	2.528,94
NTT	12	12	419	1.945,73
Papua	1	2	30	1.420,69
Sumatera Barat	1	2	30	410,00
Jawa Barat	8	10	237	349,33
NTB	3	3	140	333,82
Sulawesi Selatan	1	1	24	182,11
Sumatera Selatan	3	3	61	96,00
Sumatera Utara	4	4	80	83,43
Bengkulu	2	2	39	73,80
Yogyakarta	1	1	152	32,73
DKI Jakarta	1	1	9	24,69
Grand Total	110	109	4.133	47.746,07

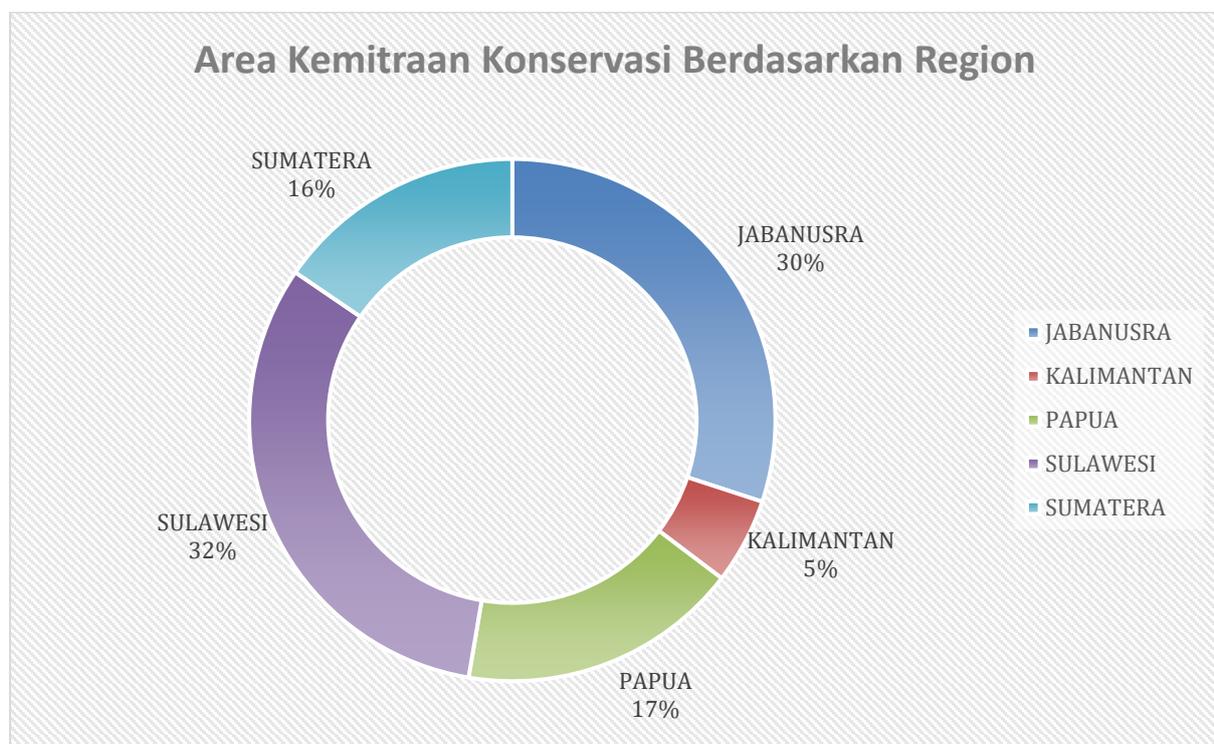


Gambar 20. Grafik sebaran kemitraan konservasi berdasarkan provinsi

Secara region kepulauan, porsi capaian kemitraan konservasi terbesar di region Sulawesi seluas 15.236,14 Ha (32%) dan region Jabanusra seluas 14.352,82 Ha (30%), meski demikian jumlah masyarakat yang mendapatkan akses pemanfaatan di zona/blok tradisional terbanyak berada di region Jabanusra dengan jumlah 2.832 orang.

Tabel 15. Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Sebaran Region

Region	Kaw. Konservasi	UPT	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
SULAWESI	8	6	36	38	751	15.236,14
JABANUSRA	15	12	45	47	2.832	14.352,82
PAPUA	2	2	3	6	30	8.261,69
SUMATERA	4	4	21	12	252	7.366,47
KALIMANTAN	2	1	5	6	193	2.528,94
Grand Total	30	24	110	109	4.058	47.746,07



Gambar 21. Grafik area kemitraan konservasi berdasarkan region

Capaian IKK “Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi” Tahun 2020 dan Tahun 2021. Data capaian kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2020 dan 2021 seluas 88.958,95 Ha, tersebar di 35 UPT lingkup Ditjen KSDAE dengan 42 kawasan konservasi, dengan jumlah kerjasama kemitraan konservasi dengan 153 kelompok masyarakat, yang melibatkan 4.904 orang masyarakat di 135 desa di sekitar kawasan konservasi.

Tabel 16. Capaian kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat tahun 2020 dan 2021

Data Capaian Kemkon PM	2020	2021	Total
Jumlah PKS	79	109	188
Jumlah Desa	65	110	172
Masyarakat Terlibat	2.304	4.133	6.437
Jumlah Kawasan Konservasi	28	30	42
Jumlah UPT Pengelola	26	21	46
Luas Kemkon (Ha)	63.396,62	47.746,07	111.142,69
Target (Ha)	50.000	90.000	140.000
Prosentase (%)	127	53	28

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Pemberian akses legal pemanfaatan tradisional kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui skema kerja sama pada dasarnya telah diamanatkan sejak terbitnya PP 108 Tahun 2015 (Pasal 49) yang pada pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.85/MENHUT-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.I/6/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Selanjutnya pelaksanaan pemberian akses tersebut menjadi lebih terdorong setelah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 jo P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disahkan pada tanggal 6 Juni 2018. Sehingga pencatatan pencapaian kegiatan pemberian akses pemanfaatan tradisional potensi kawasan dilakukan sejak tahun 2015 berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama penguatan fungsi dan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi pemberian akses pada zona/blok tradisional.

Pemberian akses legal pemanfaatan kawasan kepada masyarakat setempat melalui skema kerja sama kemitraan konservasi telah memberikan warna baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Melalui pemberian akses legal tersebut, pelibatan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih terfasilitasi. Melalui kemitraan konservasi, keberadaan kelompok masyarakat dengan aktifitasnya di dalam kawasan menjadi legal (diakui) dan bahkan masyarakat dilibatkan dalam implementasi kerja-kerja konservasi di lapangan oleh pengelola kawasan konservasi.

Melalui kemitraan konservasi, komunikasi antara pengelola kawasan dengan masyarakat sekitar dapat terjalin lebih harmonis. Kemitraan menjadi solusi jalan tengah terbaik yang menguntungkan bagi masyarakat dan pengelolaan kawasan konservasi. Sebagai konsekuensi dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, selain mendapatkan manfaat ekonomi dari akses pemanfaatan di zona/blok tradisional, kelompok masyarakat



juga harus bertanggung jawab untuk menjaga areal kemitraan konservasinya. Kelompok masyarakat juga harus turut serta menjaga kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman hayati di area kemitraan konservasi.

Capaian target IKK-2 pada tahun 2021 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun beberapa upaya yang menjadi tuisi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, terutama Subdit Bina Daerah Penyangga dan Bina Pemanfaatan Zona Tradisional telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka pengawalan pencapaian IKK-2, sebagai berikut:

a. Penyusunan NSPK Kemitraan Konservasi

Pada tahun 2018 telah terbit peraturan terkait pelaksanaan kemitraan konservasi melalui Perdirjen KSDAE No. P.6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA, jo Perdirjen KSDAE No. P.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perdirjen KSDAE No. P/6 Tahun 2018 dengan menambahkan Taman Buru dalam ruang lingkup pelaksanaan kemitraan Konservasi. Selama pelaksanaan kemitraan konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi telah menerima masukan untuk perbaikan substansi aturan kemitraan konservasi.

Merespon hal tersebut, mulai tahun 2020 telah dilakukan upaya-upaya untuk merevisi Perdirjen KSDAE No. P.6 Tahun 2018 melalui serangkaian pembahasan baik secara tatap muka maupun daring. Perkembangan implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), juga mempengaruhi proses revisi Perdirjen KSADE No. P.6 Tahun 2018 tersebut. Dalam amanat UUCK kegiatan kemitraan kehutanan di kawasan konservasi di atur lebih lanjut dalam peraturan Menteri. Sehingga dalam tuisi penyusunan NSPK di tahun 2021 pembahasan aturan kemitraan konservasi diarahkan untuk menyusun rancangan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) tentang Kemitraan Konservasi.

Adapun urgensi dalam penyusunan Rancangan PermenLHK tentang kemitraan konservasi pada KSA, KPA dan TB antara lain:

- Kendala dan tantangan implementasi di tingkat lapangan maupun tingkat pusat.
- Diperlukan penguatan pengaturan kemitraan konservasi yang baru diatur melalui Peraturan Dirjen (Perdirjen KSDAE Nomor P.6/2018 jo. P.2/2019).
- Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan turunannya, al : PP 23 Tahun 2021 dan PP 24 Tahun 2021), yang mengarahkan kemitraan konservasi sebagai salah satu solusi penyelesaian kegiatan terbangun di hutan konservasi.

Selama tahun 2021, dalam proses penyusunan Rancangan PermenLHK tentang Kemitraan Konservasi telah dilakukan 3 kali pembahasan yang dilakukan secara hybrid



serta melakukan uji petik dan pembahasan di 3 UPT, yaitu Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai TN Gunung Halimun Salak, dan Balai TN Kepulauan Seribu.

b. Bimbingan Teknis Kemitraan Konservasi

Kegiatan bimbingan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta terkait pelaksanaan/implementasi kebijakan dan fasilitasi kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi sehingga pelaksanaan kerja sama kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan zona tradisional dapat diselenggarakan secara lebih optimal dan efektif serta dalam rangka mendorong pencapaian target sasaran pemberian akses kelola pada zona/blok tradisional.

Pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis secara daring dengan melibatkan peserta sejumlah 320 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf teknis dari UPT/UPTD Tahura. Pada tahun 2021, kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 4 kali pada 4 lokasi UPT/UPTD yaitu:

- Tahura Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung;
- Tahura Geluguran, di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
- Tahura Pocut Meurah Intan, di Kabupaten Aceh Besar, Povinsi Aceh;
- Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, Kupang.

c. Supervisi, Koordinasi dan Monev Kemitraan Konservasi

Kegiatan supervisi, koordinasi, dan monev kemitraan konservasi pada dasarnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di lapangan, khususnya kepada staf UPT pengelola kawasan konservasi serta kelompok masyarakat (mitra konservasi), sehingga pelaksanaan kerja sama kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan zona tradisional dapat diselenggarakan secara lebih optimal dan efektif. Output dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan untuk mendapatkan masukan (*feedback*) dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kemitraan konservasi ke depan serta sebagai bahan perbaikan dan penguatan regulasi terkait kemitraan konservasi.

Selama tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan perjalanan dalam rangka supervisi, koordinasi dan monev kemitraan konservasi pada 20 UPT dan pada tahun 2021 pada 26 UPT Ditjen KSDAE dan 8 UPTD Tahura dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 17. Pelaksanaan kegiatan supervisi, koordinasi dan monitoring kemitraan konservasi

UPT Pengelola	2020	2021
BBKSDA Jawa Barat	1	1
BBKSDA Jawa Timur	1	0
BBKSDA Nusa Tenggara Timur	0	1
BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	1	1
BBTN Bromo Tengger Semeru	0	1
BBTN Bukit Barisan Selatan	1	0
BBTN Gunung Gede Pangrango	0	1
BBTN Gunung Gede Pangrango	1	0
BBTN Gunung Leuser	0	1
BBTN Kerinci Seblat	1	0
BBTN Lorelindu	0	1
BBTN Teluk Cenderawasih	0	1
BKSDA Aceh	1	1
BKSDA Bali	0	1
BKSDA Jawa Tengah	1	0
BKSDA Maluku	1	1
BKSDA Nusa Tenggara Barat	1	0
BKSDA Riau	1	0
BKSDA Sulawesi Selatan	0	1
BKSDA Sumatera Selatan	1	1
BTN Bantimurung Bulusaraung	0	1
BTN Gunung Halimun Salak	1	1
BTN Gunung Merapi	1	1
BTN Gunung Palung	0	1
BTN Gunung Rinjani	1	0
BTN Gunung Tambora	0	1
BTN Karimunjawa	1	0
BTN Kepulauan Seribu	0	1
BTN Manupeu Tanadaru dan Wailangi Wanggameti	1	1
BTN Rawa Aopa	0	1
BTN Rawa Aopa Watumohai	1	0
BTN Tanjung Puting	0	1
BTN Ujung Kulon	0	1
BTN Wakatobi	0	1
BTN Wasur	0	1
BTN Way Kambas	0	1
Tahura Abdul Latief	0	1
Tahura Bontobahari	0	1
Tahura Bukit Barisan	0	1

UPT Pengelola	2020	2021
Tahura Bukit Mangkol	0	1
Tahura Geluguran	0	1
Tahura Pocut Meurah Intan	0	1
Tahura Raden Soerjo	0	1
Tahura Sultan Syarif Hasim	1	0
Tahura Wan Abdulrahman	0	1
Tahura WAR	1	0
Jumlah Kegiatan supervisi, koordinasi dan monev kemitraan konservasi	20	34

Tantangan Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat

Data capaian IKK “Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi” pada tahun 2021 adalah seluas 27.521,22 Ha atau sekitar 30,6% dari target tahun 2021 seluas 90.000 Ha. Capaian IKK-2 di tahun 2021 belum menggambarkan keterwakilan secara proporsional dikaitkan dengan potensi luasan areal kemitraan konservasi serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Secara umum, dalam pelaksanaan target tersebut masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya yaitu:

1. Masih adanya perbedaan pemahaman, interpretasi dan implementasi regulasi maupun kebijakan kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional di tataran pelaksana (UPT/UPTD pengelola kawasan konservasi). Beberapa UPT melakukan penundaan proses fasilitasi kemitraan konservasi sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
2. Andanya variasi dan kompleksitas permasalahan di lapangan yang berimplikasi pada terkendalanya dalam pelaksanaan verifikasi terhadap subjek (masyarakat calon mitra konservasi), antara lain :
 - a. Terbatasnya kapasitas SDM UPT dalam melaksanakan inventarisasi potensi sumberdaya alam (HHBK maupun sumberdaya perairan untuk jenis tidak dilindungi) yang dimanfaatkan masyarakat dan inventarisasi terkait kondisi karakteristik sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kemitraan konservasi;
 - b. Terdapat penataan zona/blok yang kurang tepat/sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan, sehingga pengelola perlu melakukan revisi zonasi/blok terlebih dahulu untuk dapat memfasilitasi pemberian akses legal pemanfaatan tradisional;

- 
- c. Kondisi akses ke lokasi (zona/blok tradisional) umumnya sulit dijangkau dan sebagian besar zona/blok tradisional yang telah ditetapkan hanya diakses oleh masyarakat setempat secara temporer atau sesekali.
 3. Belum tercapai kesepakatan dengan masyarakat untuk solusi atas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, meski fakta di lapangan telah ada pemanfaatan kawasan dalam bentuk lahan garapan, pemungutan HHBK maupun pemanfaatan sumber daya perairan. Pada sebagian kawasan konservasi, masyarakat setempat tidak berkenan melakukan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi yang antara lain dikarenakan keberadaan mereka sudah lebih dahulu sebelum kawasan ditunjuk/ditetapkan menjadi kawasan konservasi.
 4. Adanya perubahan aktivitas pemanfaatan masyarakat di dalam kawasan. Pemanfaatan tradisional sumberdaya alam (HHBK maupun sumberdaya perairan untuk jenis tidak dilindungi) juga dilakukan oleh masyarakat pendatang (bukan masyarakat setempat) yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.
 5. Selama tahun 2021 dengan latar belakang kondisi pandemi Covid-19, telah dilakukan refocusing anggaran APBN sebanyak 4 kali sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan teknis di lapangan. Pengurangan anggaran tidak secara otomatis mengurangi besaran target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE, sehingga dengan demikian dengan anggaran yang telah berkurang, target tahun 2021 masih tetap sama.
 6. Terdapat beberapa permohonan kerjasama kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional yang tidak memenuhi persyaratan antara lain lokasi areal kemitraan konservasi dan ruang lingkup yang tidak sesuai.
 7. Terdapat beberapa persetujuan kemitraan konservasi yang belum ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama kemitraan konservasi sehingga belum dapat dicatatkan sebagai capaian tahun 2021.
 8. Kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan perjalanan dan kegiatan pertemuan yang melibatkan kerumunan. Hal ini sangat mempengaruhi proses persiapan dan fasilitasi kemitraan konservasi, karena komunikasi dengan masyarakat yang akan mengakses potensi kawasan lebih mudah dilakukan dengan pertemuan tatap muka. Penggunaan aplikasi modern seperti *Zoom Meeting* atau *Google Meeting* selain pengetahuan dan ketrampilan penggunaan gadget sangat kurang, juga karena keterbatasan jaringan internet dan komunikasi.

Dampak Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui pelaksanaan kemitraan konservasi tersebut :

1. Masyarakat mendapatkan legalitas pemanfaatan di dalam Kawasan konservasi
2. Mendukung/Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi
3. Meningkatkan peran serta dan dukungan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan Kawasan konservasi.
4. Mendukung terwujudnya kelestarian fungsi kawasan, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, serta pemanfaatan sumber daya alam (keanekaragaman hayati) yang berkelanjutan.

Tabel 18. Capaian kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem tahun 2021

Pengelola	Kawasan Konservasi	Desa	Mitra	Masyara kat	Luas Kemkon (Ha)
BBKSDA Papua	CA Pegunungan Cycloop	1	1	10	15,00
Total		1	1	10	15,00
BBKSDA Riau	TWA Sungai Dumai	1	1	17	30,00
Total		1	1	17	30,00
BBKSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading & Langkat Timur Laut	1	1	50	91,25
Total		1	1	50	91,25
BBTN Leuser	Gunung TN Gunung Leuser	22	22	892	1.916,60
Total		22	22	892	1.916,60
BKSDA Selatan	Sumatera SM Dangku	2	2	127	263,80
	SM Padang Sugihan	2	2	116	167,63
Total		4	4	243	431,43
BTN Ciremai	Gunung TN Gunung Ciremai	4	4	118	40,00
Total		4	4	118	40,00
BTN Halimun Salak	Gunung TN Gunung Halimun Salak	1	1	189	112,45
Total		1	1	189	112,45
BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	3	3	76	250,00
Total		3	3	76	250,00
Grand Total		37	37	1.595	2.886,73

Surat persetujuan Dirjen KSDAE terhadap permohonan kemitraan konservasi.

Pada akhir tahun 2021 telah diterbitkan 15 persetujuan Dirjen KSDAE terhadap permohonan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat tetapi belum terbit dokumen PKS kemitraan konservasi yang telah ditandatangani oleh para pihak. Data surat persetujuan tersebut sebagai berikut:

Tabel 19. Permohonan Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat yang telah disetujui Dirjen KSDAE

UPT	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
TN Kayan Mentarang	1	1	23	525,98
TN Kerinci Seblat	2	2	64	48,50
TN Togean	5	5	108	4.121,91
Grand Total	8	8	195	4.696,39

Tabel 20. Permohonan Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem yang telah mendapat persetujuan Dirjen KSDAE

UPT	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
KSDA Sumatera Selatan	3	3	155	160,74
TN Gunung Leuser	1	2	46	80,00
TN Kerinci Seblat	2	2	59	88,66
Grand Total	6	7	260	329,40

Tabel 21. Total persetujuan kemitraan konservasi yang telah mendapat persetujuan Dirjen KSDAE

Jenis Kemkon	Desa	Mitra	Masyarakat	Luas Kemkon (Ha)
PE	6	7	260	329,40
PM	8	8	195	4.696,39
Grand Total	14	15	455	5.025,79

IKK 3. Luas *Opened area* di Kawasan Konservasi yang Ditangani

Opened area didefinisikan sebagai area yang mengalami berbagai tingkatan degradasi dari kondisi alamnya, yang disebabkan, oleh faktor alam (kebakaran, bencana alam, dsb), dan faktor manusia (perambahan, illegal logging, pemukiman, konversi lahan, pertambangan ilegal dan bekas pertambangan, pembakaran lahan, pencemaran darat dan laut, perburuan, *illegal fishing*, *destructive fishing*, *vessel grounding*, reklamasi,

sedimentasi), serta dipastikan dapat dilakukan tindakan manajemen kawasan. Untuk ekosistem yang sifatnya alami atau klimaks tidak termasuk kategori area terbuka.

Penanganan *opened area* dilakukan berdasarkan baseline yang telah disempurnakan pada tahun 2020, yang membagi *opened area* dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu OA terindikasi masih berkonflik seluas 866.634 Ha dan OA terindikasi sudah dapat dipulihkan seluas 970.468 Ha. Berdasarkan pembagian tersebut juga bahwa *opened area* ditangani melalui 2 (dua) skema besar, yaitu penanganan konflik tenurial, dan pemulihan ekosistem. Selain itu *opened area* juga ditangani dengan melakukan updating, pendataan, pemantauan, dan analisis perubahan tutupan lahan secara spasial.

Penanganan *opened area* pada tahun 2021 ditargetkan seluas 541.000 Ha, dengan capaian penanganan seluas 550.992 Ha (102 %) sebagaimana diuraikan pada Tabel 22. Capaian luas penanganan *opened area* tahun 2021

No	Penanganan OA	Luas (Ha)
1	Penanganan Konflik Tenurial	69.937
2	Pemulihan Ekosistem	31.055
3	Pemantauan dan Pemutakhiran Data Spasial	450.000
Jumlah		550.992

Keterangan: rincian terlampir.

Tabel 23. Rincian luas *opened area* kawasan konservasi yang ditangani

Opened Area Terindikasi Berkonflik 866.633,77 Ha		Opened Area Terindikasi Dapat Segera Dipulihkan 970.476,71 Ha	
Areal Tambang / Galian / Energi lain	4.165,73	Areal bekas terbakar	20.044,06
Areal terbangun lain	13,25	Belukar	612.695,92
Bangunan / Kawasan permukiman	13.978,68	Lapangan Terbuka	568,97
Galian tambang terbuka	4.153,17	Semak	337.066,19
Kawasan Industri / Pabrik	415,65	Timbunan/sisa material galian	92,57
Ladang	89.913,90		
Pembersihan lahan	22.204,61		
Sawah	19.216,45		
Tambak	48.792,59		
Tanaman campuran & lainnya	108.014,08		
Tanaman campuran & semusim lainnya	404.426,59		
Tanaman Cengkih	0,67		
Tanaman Karet	11.312,48		
Tanaman Kelapa	1.686,97		
Tanaman Kopi	537,84		
Tanaman Sawit	136.965,86		
Tanaman Sayuran	810,46		
Tanaman Singkong	14,28		
Tanaman Teh	10,50		

PETA *OPENED AREA* TERINDIKASI BERKONFLIK DI KAWASAN KONSERVASI



Luasan *Opened Area* Terindikasi Berkonflik per UPT

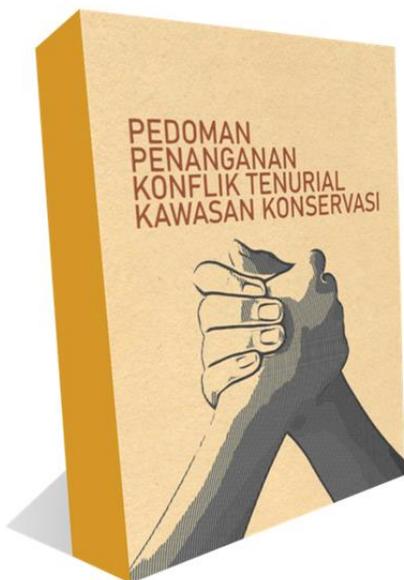
No	UPT	Luas OA Berkonflik (Ha)	No	UPT	Luas OA Berkonflik (Ha)	No	UPT	Luas OA Berkonflik (Ha)	No	UPT	Luas OA Berkonflik (Ha)
1	BBKSDA Jawa Barat	6.223,76	16	BBTN Taka Cenderawasih	95,19	31	BKSDA Sulawesi Tenggara	2.839,70	46	BTN Sulaen	303,69
2	BBKSDA Jawa Timur	49,38	17	BKSDA Aceh	2.816,63	32	BKSDA Sulawesi Utara	7.769,72	47	BTN Gunung Cramei	1.122,13
3	BBKSDA NTT	9.539,34	18	BKSDA Bali	480,11	33	BKSDA Sumatera Barat	14.934,51	48	BTN Gunung Halimun Salak	24.368,98
4	BBKSDA Papua	29.093,11	19	BKSDA Bengkulu Lampung	23.079,50	34	BKSDA Sumatera Selatan	110.191,94	49	BTN Gunung Merapi	98,54
5	BBKSDA Papua Barat	2.465,99	20	BKSDA Yogyakarta	87,15	35	BTN Arakdjene Lottaba	526,41	50	BTN Gunung Merbabu	63,86
6	BBKSDA Riau	34.811,59	21	BKSDA Jakarta	67,28	36	BTN Aias Puno	16,93	51	BTN Gunung Palung	4.800,54
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	13.050,85	22	BKSDA Jambi	2.660,99	37	BTN Bak Barat	42,33	52	BTN Gunung Rinjani	1.379,57
8	BBKSDA Sumatera Utara	9.905,46	23	BKSDA Jawa Tengah	381,69	38	BTN Bakran	426,15	53	BTN Kayan Mentarang	276,13
9	BBTN Belung Karim D Sentarum	3.384,99	24	BKSDA Kalimantan Barat	16.562,26	39	BTN Bakun	4.246,89	54	BTN Kalmulu	679,13
10	BBTN Bukit Barisan Selatan	61.028,11	25	BKSDA Kalimantan Selatan	20.174,28	40	BTN Barang Odele	483,45	55	BTN Kalimantan	362,25
11	BBTN Bromo Tengger Semeru	2.019,21	26	BKSDA Kalimantan Tengah	23.100,74	41	BTN Barak Sembiling	3.628,24	56	BTN Kepulauan Seribu	1,07
12	BBTN Gunung Gebe Pangango	1.368,68	27	BKSDA Kalimantan Timur	46.919,56	42	BTN Bogani Nani Wartabone	6.621,66	57	BTN Kepulauan Togean	9.551,26
13	BBTN Gunung Leuser	15.820,02	28	BKSDA Maluku	7.674,33	43	BTN Bukit Bak Bukit Raya	1.851,87	58	BTN Komodo	213,00
14	BBTN Harau Selat	69.716,49	29	BKSDA NTB	5.060,79	44	BTN Bukit Dua Belas	4.989,66	59	BTN Kupa	34.821,87
15	BBTN Lora Lindu	6.894,41	30	BKSDA Sulawesi Tengah	10.711,16	45	BTN Bukit Tiga Puluh	2.000,89	60	BTN Lorentz	3.069,96
									61	BTN Marau	1.228,27
									62	BTN Malakka	2.967,51
									63	BTN Maru Betri	4.197,06
									64	BTN Rawa Aopa Watumohai	18.811,11
									65	BTN Sebangau	6.176,16
									66	BTN Sibatu	6.719,00
									67	BTN Taka Bonerate	242,78
									68	BTN Gunung Tambora	1.271,67
									69	BTN Tanjung Puring	254,42
									70	BTN Tesso Nilo	56.436,39
									71	BTN Ujung Kulon	1.482,98
									72	BTN Wakaboi	1.437,36
									73	BTN Wasur	1.376,00
									74	BTN Way Kambas	945,37
									75	UPTD Tahura (36 unit)	93.823,12

Gambar 22. Peta *opened area* terindikasi berkonflik di Kawasan konservasi

Penanganan Konflik Tenurial

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi pada tahun 2021 telah didukung oleh Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.2/KSDAE/KK/KSA.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di KK. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan dan arahan kepada seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE dalam menangani konflik tenurial di kawasan konservasi secara adaptif, terstruktur, konsisten, efektif dan efisien. Diharapkan pedoman ini dapat mempercepat penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan konservasi, serta

mendokumentasikan data dan informasi hasil-hasil pelaksanaan penanganan konflik tenurial untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.



Gambar 23. Buku pedoman penanganan konflik tenurial Kawasan konservasi

Ruang lingkup Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Konservasi meliputi uraian dari seluruh rangkaian upaya penanganan konflik tenurial, mulai dari tahap identifikasi, penelaahan pendahuluan, asesmen, penyusunan rekomendasi dan rencana aksi, penanganannya, hingga sistem monitoring dan evaluasinya. Hasil proses penyelesaian dibuktikan dengan verifikasi berupa:

- Berita Acara/Nota Kesepahaman/Kesepakatan, dan/atau
- Surat Pernyataan, dan/atau
- Hasil pelaksanaan rekomendasi (al. SK Revisi Zona/Blok, SK Kemitraan Konservasi, SK Perubahan Fungsi/Peruntukan, Laporan Hasil Resettlement, Laporan Hasil Penertiban, dsb).

Atas dasar pembagian tahapan tersebut, maka progres penanganan dan penyelesaian konflik tenurial pada tahun 2021 seluas 69.937 Ha diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 24. Progres penanganan dan penyelesaian konflik tenurial

No	Tahapan Penanganan Konflik Tenurial	Luas (Ha)	Keterangan
1	Proses Asesmen	45.302	49 unit KK, 15 UPT
2	Penyusunan Renaksi dan Pelaksanaannya	5.331	4 unit KK, 4 UPT
3	Sudah Bersepakat	1.629	8 unit KK, 8 UPT
4	Tuntas	17.675	10 unit KK, 10 UPT

Keterangan: rincian terlampir

Beberapa penjelasan dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terhadap capaian penanganan konflik tersebut antara lain:

- Terhadap areal 45.302 Ha yang telah dan/atau sedang dilakukan asesmen pada tahun 2021, akan didorong tindak lanjutnya pada tahun 2022 berupa penyusunan rencana aksi.

- Terhadap areal 5.331 Ha yang telah dan/atau sedang dilakukan penyusunan rencana aksi penanganan konflik dan/atau pelaksanaannya, pada tahun 2022 akan dimonitor perkembangan pelaksanaannya, dan akan dilakukan pendampingan/ supervisi secara berkala.
- Terhadap areal seluas 1.629 Ha yang telah disepakati rekomendasi skema penyelesaiannya (baik berupa kemkon, revisi zona/blok, penegakan hukum, dsb), pada tahun 2022 akan dilakukan pendampingan khusus dan didorong percepatan realisasi kesepakatan/ rekomendasinya. Walaupun pada prinsipnya pelaksanaan rekomendasi penyelesaian konflik tenurial merupakan kewenangan pihak lain, namun prosesnya tetap perlu diupdate secara berkala, baik untuk melengkapi catatan kronologis penyelesaian, maupun antisipasi konflik baru.

Manfaat pelaksanaan kegiatan penanganan konflik tenurial yang dilakukan secara sistimatis, adaptif, komunikatif, kolaboratif, dan sejuk, antara lain:

Tabel 25. Manfaat kegiatan penanganan konflik tenurial

Bagi Pengelola	Bagi Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan permasalahan konflik tenurial yang terjadi, terutama yang telah berlangsung lama. • Menghindari kesan “pembiaran”. • Merubah image/ paradigma masyarakat kepada pengelola, yang semula dianggap represif menjadi konsolidatif. • Mengurangi peluang perluasan areal konflik maupun konflik tenurial baru. • Meningkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar. • Menyediakan data dan informasi tren penyelesaian masalah untuk kebutuhan perencanaan pengelolaan, efisiensi anggaran, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan rasa aman dan kepastian dalam berinteraksi dengan kawasan konservasi maupun petugas. • Memberikan nilai tambah secara ekonomis dari hasil kegiatan masyarakat, dari semula “illegal” menjadi “legal”. • Mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi aktif terhadap pengelolaan kawasan konservasi (penjagaan, dsb). • Mendapatkan peluang/ kesempatan untuk mendapatkan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dsb. • Meningkatkan hubungan komunikasi dengan pengelola.

Pemulihan Ekosistem

Pemulihan ekosistem menjadi komponen dalam penanganan luas *opened area*. Target yang ditetapkan pada RPJM 2020 - 2024 seluas 200.000 hektar dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Target Pemulihan Ekosistem tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Target Pemulihan Ekosistem (ha)
1	2020	20,000
2	2021	45,000
3	2022	45,000
4	2023	45,000
5	2024	45,000
	total	200,000

Dalam pencapaian target tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

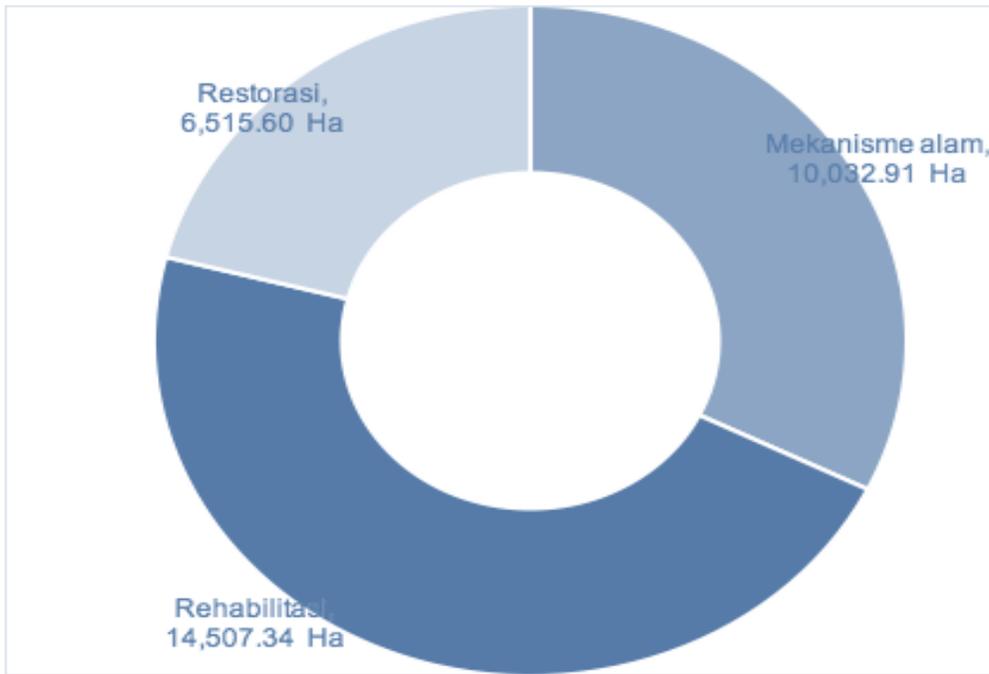
1. Koordinasi, Supervisi dan Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekosistem.
2. Penyusunan NSPK Pemulihan Ekosistem
3. Bimtek Pemulihan Ekosistem
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem
5. Kegiatan PEKK dengan pendanaan Mitra
 - a. *Capacity Building of officer related to Ecosystem Restoration in Conservation Area* yang merupakan bagian dari Project REDD + RBP Global Climate Fund
 - b. Pemulihan ekosistem gambut dan mangrove yang dilaksanakan secara integratif dengan BRGM.
 - c. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang IPPKH melalui kegiatan Rehabilitasi DAS.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem melalui kegiatan RHL
 - e. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.
 - f. Pemulihan fungsi lingkungan akibat ceceran minyak bumi di SM Pulau Rambut, Tahura Sultan Syarif Hasyim, SM Balai Raja, dan *Tambling Natural Wildlife Conservation* (TN Bukit Barisan Selatan).
 - g. Program-program pemulihan ekosistem dengan mitra lainnya (swasta, CSR, NGO dan kelompok masyarakat).

Capaian pemulihan ekosistem tahun 2021 seluas 31.055,85 ha. Rincian realisasi per jenis perlakuan dan kegiatan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Capaian Pemulihan Ekosistem tahun 2021

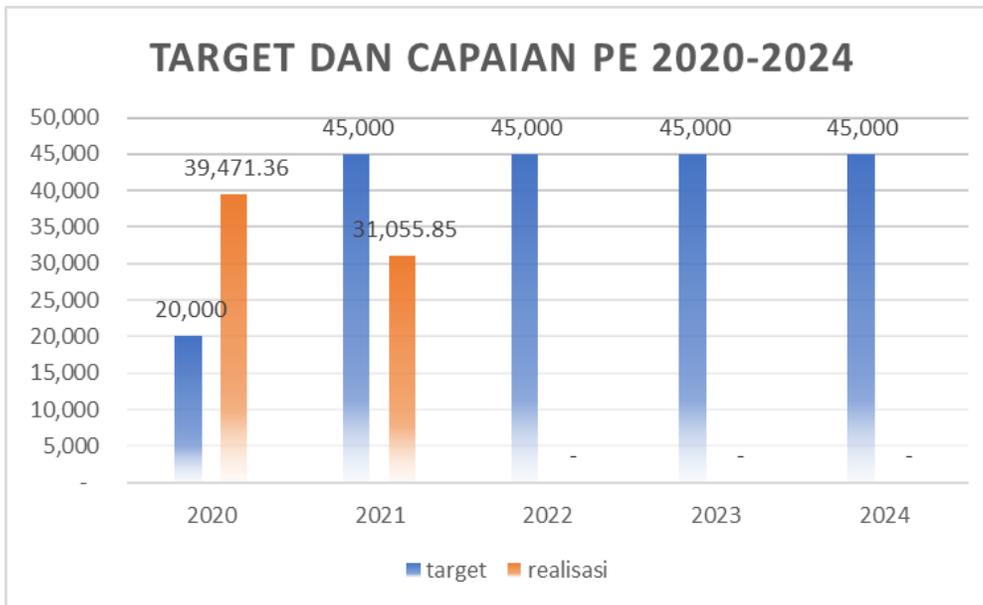
No.	Perlakuan PE	Jenis kegiatan	Sub total	Total
1	Mekanisme alam	Perlindungan dan Pengamanan	9,565.93	10,032.91
		Pemeliharaan terbatas	465.00	
		Sekat kanal	1.98	
2	Rehabilitasi	Perlindungan dan Pengamanan	100.00	14,507.34
		Penanaman	4,529.28	
		Pengkayaan Jenis	9,507.24	
		Pembinaan Populasi	100.00	
		Normalisasi badan air	-	
		Pengendalian sedimentasi	-	
		Penutupan Kawasan	-	
		Memperbaiki keutuhan obyek wisata alam	-	
		Pengendalian tumbuhan/biota pengganggu, invasif, dan limbah beracun	268.63	
		Sekat Kanal	0.01	
		Perbaikan Substrat terumbu karang	2.18	
3	Restorasi	Perlindungan dan Pengamanan	100.00	6,515.60
		Pembinaan Habitat	125.00	
		Pembinaan obyek Wisata Alam	-	
		Penanaman Intensif	6,234.14	
		Pembinaan Populasi	-	
		Normalisasi badan air	37.00	
		Pengendalian sediment	-	
		Sekat Kanal	17.00	
		Perbaikan Substrat terumbu karang	-	
Transplantasi karang	2.46			
Total				31,055.85

Capaian pemulihan ekosistem berdasarkan jenis perlakuan pemulihan ekosistem dapat diperhatikan pada gambar berikut.

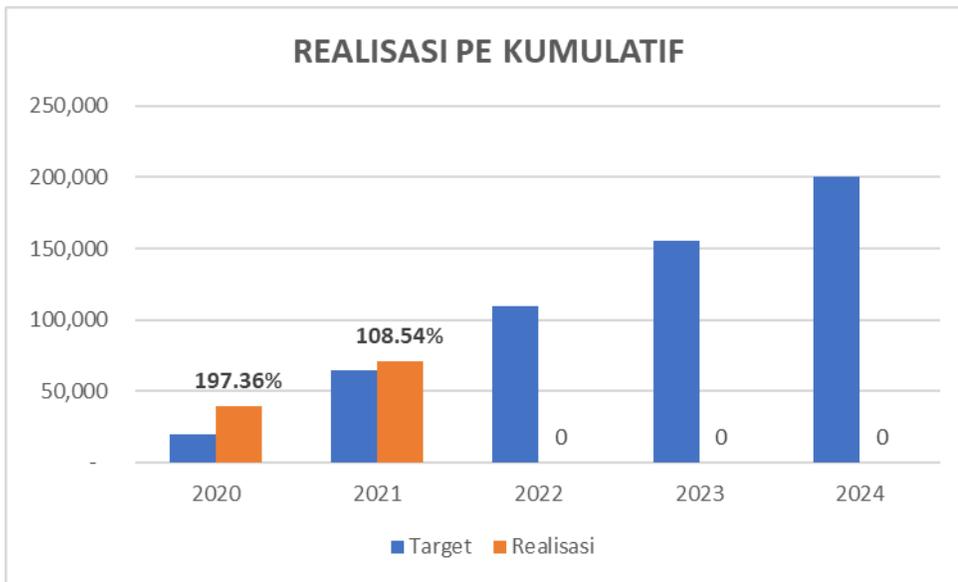


Gambar 24. Capaian pemulihan ekosistem tahun 2021 berdasarkan jenis perlakuan

Dalam kerangka capaian RPJM 2020-2024, diperoleh *trend* kenaikan capaian pemulihan ekosistem. Secara grafis dapat diperhatikan sebagaimana gambar berikut.

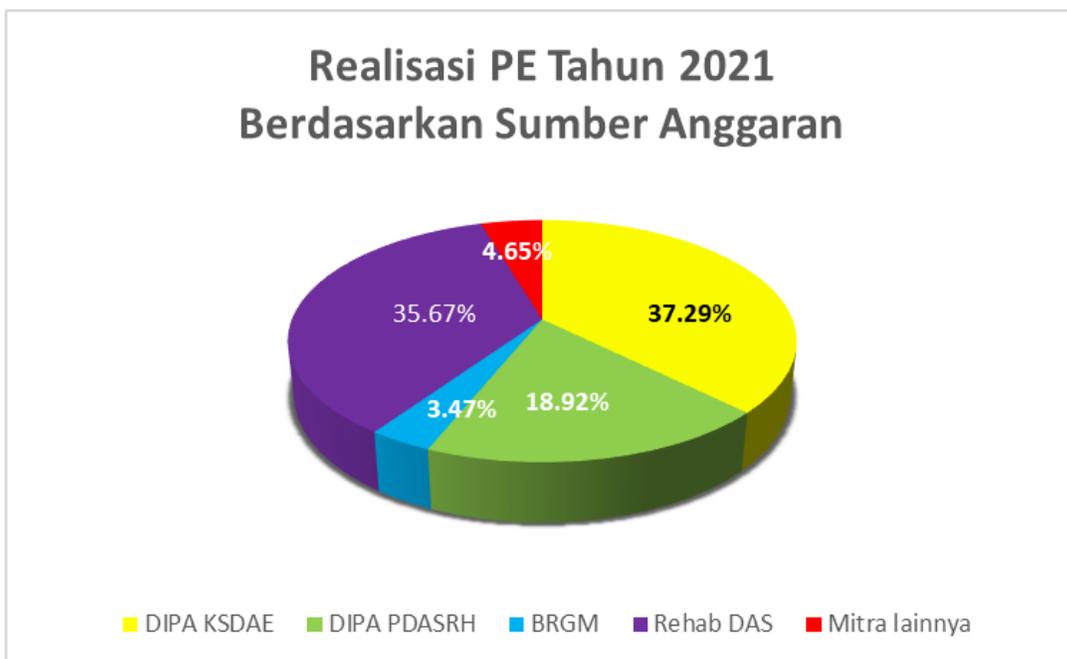


Gambar 25. Grafik target dan Realisasi pemulihan ekosistem tahun 2021



Gambar 26. Target dan Realisasi pemulihan ekosistem secara kumulatif

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian pemulihan ekosistem pada tahun 2021 seluas 31.055,85 ha atau 69,01% dari luas target per tahun. Pencapaian pemulihan ekosistem 2021 di bawah target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya refofusing anggaran, pandemi covid-19 serta kendala teknis lainnya. Apabila dilihat dari capaian secara kumulatif, realisasi pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2021 melebihi target kumulatif yaitu sebesar 108,5% hal ini dikarenakan capaian tahun sebelumnya sangat tinggi yang melebihi target yang telah ditentukan.



Gambar 27. Realisasi Pemulihan Ekosistem Tahun 2021 berdasarkan sumber anggaran

Pencapaian realisasi pemulihan ekosistem tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat pada diagram di atas bahwa sumber pendanaan pemulihan ekosistem tidak hanya berasal dari DIPA Ditjen KSDAE, akan tetapi juga melalui pendanaan lintas eselon 1 dan mitra lain seperti halnya kegiatan RHL dari Ditjen PDASRH, BRGM, Pemegang IPPKH melalui Rehab DAS serta mitra lainnya

Output/manfaat pemulihan ekosistem kawasan konservasi:

1. Ekologis
 - a. Terwujudnya stabilitas fungsi ekologis baik dari aspek komposisi, keragaman, daya dukung habitat dan fungsi ekosistem, contoh di TN Gunung Palung, SM Paliyan, TN Bukit Barisan Selatan, dan sebagainya.
 - b. Terselamatkannya jenis-jenis dilindungi dan atau *flagship species* (Species Kunci) dari penurunan dan kepunahan antara lain jenis Badak bercula satu di TN Ujung Kulon, Macan Tutul di TN Baluran, dll.
 - c. Berjalannya fungsi hidrologis (munculnya mata air pada sekitar lokasi pemulihan ekosistem). Contoh kasus di lokasi pemulihan ekosistem Nagrak TN Gunung Gede Pangrango.
 - d. Terkendalinya longsor, banjir dan potensi kekeringan lokal pada lokasi sekitar kawasan konservasi.
 - e. Terkendalinya kebakaran hutan pada lokasi pemulihan ekosistem dengan adanya perlindungan dan pengamanan lokasi pemulihan ekosistem.
2. Sosial
 - a. Pemulihan ekosistem memberikan kontribusi terhadap pembentukan kelompok/kelembagaan masyarakat yang *concern* dengan pelestarian kawasan konservasi. Hal ini diwujudkan dengan terbentuknya kelompok-kelompok tani hutan yang melakukan kegiatan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.
 - b. Terpeliharanya norma-norma/kearifan lokal masyarakat dengan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya.
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, contohnya adalah pelaksanaan pemulihan ekosistem di TN Gunung Halimun Salak dengan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Sinarresmi dan Kasepuhan Ciptamulya.
3. Ekonomi
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi terkait dengan adanya upah dan honor dari kegiatan penanaman baik dari sumber pendanaan DIPA KSDAE, DIPA BPDAS, Mitra dan sebagainya.
 - b. Berkurangnya pengangguran lokal.
 - c. Terbukanya peluang alternatif mata pencaharian dengan penyediaan bibit, ajir, pupuk dan sebagainya. Peluang penyediaan bibit dapat lebih dikembangkan menjadi persemaian masyarakat yang disinkronkan dengan program pemberdayaan masyarakat.
 - d. Bergeraknya/adanya sirkulasi keuangan di tingkat tapak.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target pencapaian pemulihan ekosistem tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID 19. Permasalahan ini merupakan sesuatu yang tidak terprediksi, namun mempengaruhi kinerja dan ruang gerak untuk memfasilitasi penyusunan RPE di beberapa UPT dan UPTD pengelola Tahura, bagi pengelola Kawasan konservasi adanya COVID 19 membatasi dan menghambat pelaksanaan penanaman.
2. Refocusing anggaran dan penghematan. Arah penggunaan anggaran saat pandemic di fokuskan pada penanggulangan akibat COVID 19, sehingga alokasi anggaran yang sebelumnya untuk penyusunan RPE dan penanaman harus dialihkan atau dipangkas.
3. Lokasi target kegiatan relatif tidak ada yang "clear and clean" dari gangguan/ancaman dan aktifitas masyarakat.
4. Belum semua kawasan konservasi (terrestrial dan perairan) yang memiliki opened area atau zona/blok rehabilitasi disusun dokumen RPE-nya
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PE pada tipe ekosistem tertentu belum lengkap tersedia. Hal ini mengingat, banyaknya variasi/karakteristik tipe ekosistem pada kawasan konservasi.
6. Kegiatan pemulihan ekosistem membutuhkan pendanaan yang besar tetapi ketersediaan anggaran terbatas.
7. Pelaksanaan IKK pemulihan ekosistem dilakukan oleh UPT/Satker yang masih tergantung dan terbatas pada pendanaan DIPA.
8. Keterbatasan mitra-mitra yang bergerak di bidang pemulihan ekosistem, selain bahwa akumulasi program mitra pemulihan ekosistem masih terfokus pada daerah Indonesia Barat dan Tengah.
9. Rendahnya pelaporan hasil pelaksanaan pemulihan ekosistem dari UPT ke Pusat sehingga sulit untuk dimonitor.

UPAYA TINDAK LANJUT

1. Memposisikan pemulihan ekosistem sebagai indikator kinerja utama yang harus didukung oleh sistem perencanaan dan anggaran pada bidang KSDAE.
2. Penguatan rencana pemulihan ekosistem secara komprehensif baik dari prakondisi lokasi, jenis perlakuan, pemantauan, evaluasi dan penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem melalui kegiatan Rehab DAS dan RHL maupun rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut yang sumber dananya berasal dari BPDASRH maupun BRGM.
4. Penguatan dan diversifikasi sumber pendanaan dari berbagai mitra baik dari PDASRH, BRGM, Swasta dan sebagainya. Sumber pendanaan potensial yang dapat dioptimalkan adalah pendanaan yang berasal dari penyelenggaraan kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang ijin pinjam pakai kawasan (IPPKH).
5. Penguatan regulasi dan pedoman teknis (NSPK) pemulihan ekosistem pada berbagai tipologi ekosistem. Beberapa NSPK yang telah berhasil disusun yaitu NSPK Pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, pedoman pemulihan

- ekosistem mangrove, pedoman pemulihan ekosistem laut/transplantasi karang, revisi Perdirjen Kemitraan konservasi dan revisi P.48/2014, perlu diproses lebih lanjut (pengesahan).
6. Penguatan basis data dan informasi capaian pemulihan ekosistem secara series. Hal ini sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindak lanjut pemulihan ekosistem.
 7. Membangun mekanisme penyederhanaan pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH.
 8. Membangun sinergitas dengan mitra yang sudah ada dan calon mitra yang mendukung program pemulihan ekosistem.
 9. Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan pemulihan ekosistem baik ditingkat pusat dan ditingkat tapak. Kegiatan yang dapat dilanjutkan adalah ToT, webinar, workshop, dan sebagainya.
 10. Menginstruksikan setiap UPT untuk mengalokasikan anggaran pemulihan ekosistem
 11. Meningkatkan pelaksanaan pemulihan ekosistem melalui kemitraan konservasi
 12. Mengoptimalkan peta open area yang telah disusun sebagai lokasi pemulihan ekosistem
 13. Mengusulkan pencabutan IPPKH terhadap pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajibannya.
 14. Meningkatkan koordinasi/sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan tenurial.
 15. Penetapan tanaman gagal pada lokasi RHL/gerhan/rehabilitasi lain sehingga dapat diusulkan kembali sebagai lokasi kegiatan pemulihan ekosistem.
 16. Membangun dan mengembangkan sistem monitoring pemulihan ekosistem.
 17. Perlunya ada kajian luasan dampak pembangunan sekat kanal/pembasahan/pencegahan kebakaran gambut yang dapat dihitung/dikuantifikasi dalam satuan luas (ha).
 18. Perlunya ada kajian luasan dampak transplantasi karang/lamun yang dapat dihitung/dikuantifikasi dalam satuan luas (ha).
 19. Mengidentifikasi dan memetakan kerusakan kawasan di seluruh kawasan konservasi.
 20. Mengusulkan penetapan seluruh kerusakan dalam kawasan konservasi sebagai lokasi target pemulihan ekosistem.
 21. Menyusun mekanisme pelaporan kegiatan pemulihan ekosistem dari UPT ke pusat.



Gambar 28. Fasilitasi kemitraan konservasi pada masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Sinarresmi dan Kasepuhan Ciptamulya di kawasan TNGHS, 2021



Gambar 29. Monitoring lokasi calon pemulihan ekosistem di TWA Gunung Singgalang Tandikat (BKSDA Sumatera Barat)



Gambar 30. Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pemulihan Ekosistem



Gambar 31. Fasilitasi calon mitra kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di TWAL Pulau Weh



Gambar 32. Monev lokasi Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi di Tahura Sultan Syarif Hasyim



Gambar 33. Monitoring lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di TWA Bukit Kaba (BKSDA Bengkulu)



Gambar 34. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem di Balai KSDA Kalimantan Timur



Gambar 35. Uji petik penyusunan NSPK Pemulihan Ekosistem di Balai KSDA Kalimantan Selatan

Pemantauan dan Pemutakhiran Data Spasial

Pemantauan dan pemutakhiran data spasial *opened area* pada tahun 2021 penting dilakukan dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan turunannya yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KLHK selaku Ketua Tim Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang LHK Nomor S.2/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/ 5/2021 tanggal 8 Juni 2021.

Menyikapi urgensi pemutakhiran data spasial *opened area* dimaksud, beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Konsolidasi virtual secara bertahap dengan 74 UPT Ditjen KSDAE, yang dibantu dan difasilitasi oleh Direktorat PIKA, dengan hasil bahwa UPT yang telah melakukan *updating opened area* yaitu sebanyak 40 UPT mencakup luasan 450.000

- Ha.
- Mendorong proses identifikasi, inventarisasi dan/ atau pemutakhiran data seluruh kegiatan terbangun di kawasan konservasi (subyek, obyek/jenis kegiatan, aspek legalitas), baik perkebunan sawit, tambang, dan kegiatan lainnya, sesuai surat Dirjen KSDAE Nomor: S.827/KSDAE/KK/KSA.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang ditujukan kepada seluruh Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE dan Kepala UPTD/Pengelola Tahura.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan diverifikasi dan dianalisis secara bertahap oleh Tim Kerja Implementasi UUCK Bidang KSDAE yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.766/KSDAE/KK/KSA.1/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021. Hasilnya akan segera disampaikan kepada Ketua Tim Satlakwasdal UUCK pada bulan Februari 2022.

IKK 4. Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

Kinerja pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi sudah seharusnya dapat diukur secara periodik. Proses penilaian efektivitas pengelolaan menjadi bagian penting evaluasi pengelolaan kawasan, yang penting, untuk melihat sejauh mana penggunaan sumber daya yang dimiliki, bagaimana peran dan dukungan para pihak terhadap pengelolaan, apakah kegiatan pengelolaan yang dilakukan berpengaruh terhadap nilai penting yang menjadi mandat kawasan, dan apakah pengelolaan tersebut memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pada proses penilaian ini juga diidentifikasi tingkat gangguan/ancaman yang terjadi di kawasan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan yang dilakukan. Hasil penilaian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan ke depan.

Dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2021 ini, metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*) seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian hasil penilaian masih tahun ini masih bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, kegiatan penilaian ditargetkan dilakukan pada 277 unit kawasan konservasi atau separuh dari jumlah kawasan konservasi di Indonesia yang digunakan sebagai baseline (554 unit KK). Walaupun melihat kondisi saat ini, jumlah kawasan konservasi sudah mengalami peningkatan menjadi 560 unit, namun sesuai dokumen Renstra KLHK, Renstra Ditjen KSDAE, dan Penetapan Kinerja target

penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2021 masih belum berubah. Lokasi target penilaian efektivitas pengelolaan KK tahun 2021 ditetapkan berdasarkan surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.17/KK/PPKK1/KSA.1/1/2021 tanggal 26 Januari 2021¹, perihal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2021.

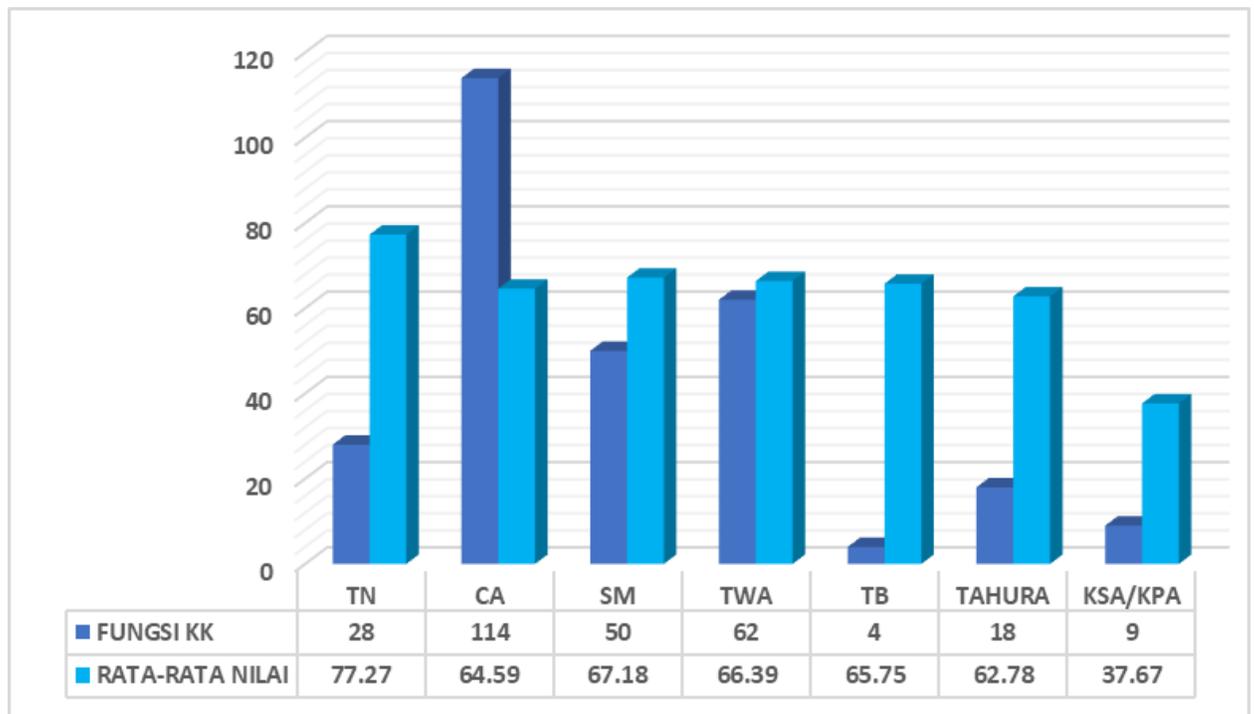
Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 285 unit KK yang melakukan penilaian efektivitas pengelolaan dari 71 UPT/UPTD yaitu 27 UPT TN, 26 UPT KSDA, dan 18 UPTD TAHURA. Jumlah ini lebih besar dibandingkan target awal, karena ada beberapa pengelola kawasan yang melakukan penilaian di luar lokasi target, sehingga capaian tahun 2021 ini sebesar 102,89% . Jika dilihat dari rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan yang dapat dicapai dari seluruh kawasan yang dinilai selama tahun 2021 ini adalah 65,73%.

Berdasarkan arahan fungsinya, kawasan terbanyak yang dilakukan penilaian adalah CA yaitu sebanyak 114 unit (rata-rata nilai 64,59%) dan TWA sebanyak 62 unit (rata-rata nilai 66,39%). Namun jika dilihat rata-rata nilai tertinggi masih dicapai oleh kawasan TN yaitu 77,27%. Hal ini sangat wajar, mengingat kawasan dengan arahan fungsi taman nasional dikelola langsung oleh satu manajemen pengelolaan (UPT TN) sehingga seluruh dukungan manajemen yang dimiliki digunakan untuk mengelola satu kawasan tersebut.

Tabel 28. Hasil penilaian efektifitas pengelolaan KK tahun 2021

No.	Fungsi	Jumlah KK (unit)	Nilai Min (%)	Nilai Max (%)	Nilai Rata-Rata (%)
1	TN	28	53	88	77.27
2	CA	114	23	83	64.59
3	SM	50	37	81	67.18
4	TWA	62	38	86	66.39
5	TB	4	58	73	65.75
6	TAHURA	18	28	82	62.78
7	KSA/KPA	9	20	60	37.67

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat kawasan TN dengan nilai efektifitas yang masih rendah (53%). Kawasan tersebut adalah TN Gunung Gandang Dewata, yang saat ini pengelolaannya masih dilakukan oleh BBKSDA Sulawesi Selatan. Saat ini di Indonesia masih terdapat 3 (tiga) unit kawasan TN yang belum memiliki unit pengelolaan sendiri, yaitu TN Gandang Dewata dikelola oleh BBKSDA Sulawesi Selatan, TN Gunung Maras oleh BKSDA Sumatera Selatan dan TN Zamrud oleh BBKSDA Riau.



Gambar 36. Grafik hasil penilaian efektifitas pengelolaan KK tahun 2021

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada sedikit perbedaan yang dilakukan. Tahun 2020, penilaian dilakukan pada 132 unit kawasan konservasi sebagai upaya untuk mendapatkan baseline nilai efektifitas pengelolaan seluruh kK di Indonesia, sedangkan kegiatan penilaian yang dilakukan di tahun 2021 ini merupakan penilaian ulangan, untuk melihat progres pengelolaan dari kawasan yang menjadi target.

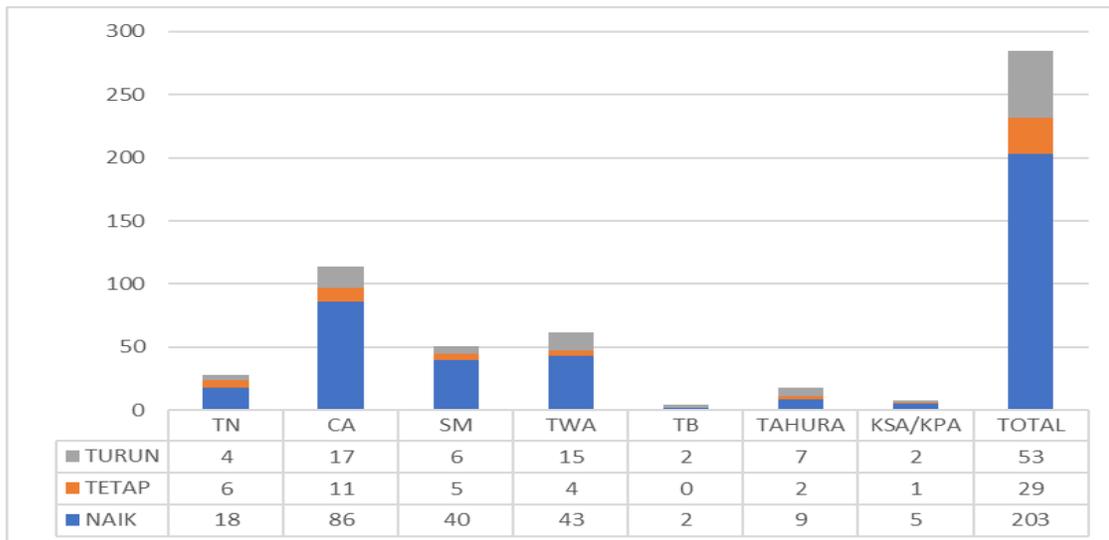


Gambar 37. Kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK TN Wasur Tahun 2021



Gambar 38. Aktivitas Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK TN Wasur Tahun 2021

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi optimalnya dilakukan 2 tahun sekali, sehingga pelaksanaan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian sudah dapat dijalankan dan dilihat hasilnya, bagi optimalisasi pengelolaan kawasan yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya banyak pengelola kawasan yang melakukan penilaian efektivitas pengelolaan di kawasannya secara reguler atau per tahun.



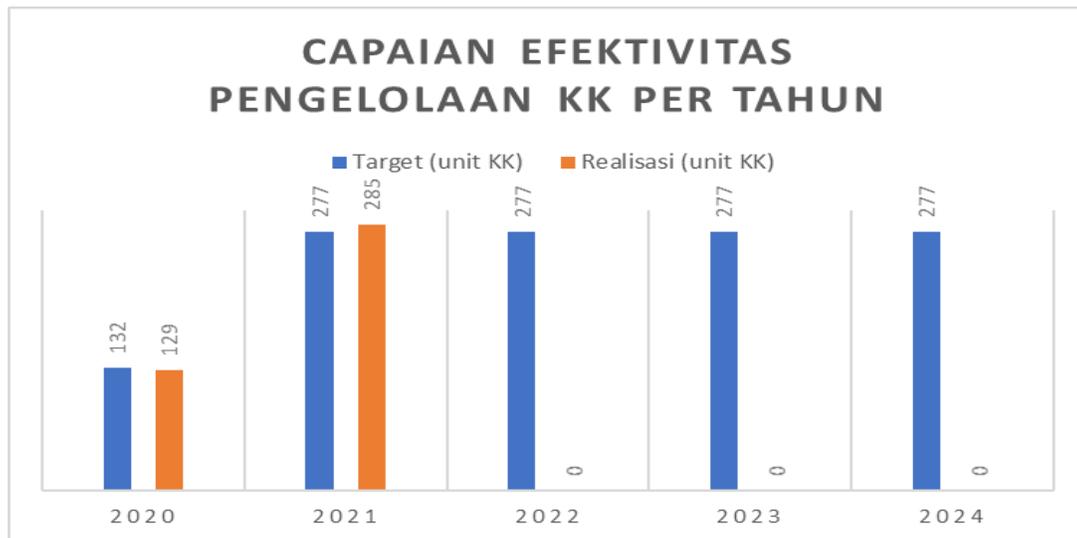
Gambar 39. Dinamika penilaian efektivitas pengelolaan KK

Jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, pengelolaan 285 unit KK tahun 2021 ini secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai efektivitas pengelolaan yang dilakukan, sebanyak 203 unit KK (71,23%) mengalami kenaikan, 29 unit KK (10,18%) tetap dan 53 unit KK (18,6%) mengalami penurunan. Penurunan nilai ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya memang terkait tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan yang dilakukan. Apalagi di tengah masa pandemi yang terjadi saat ini, dimana kegiatan teknis di lapangan banyak yang tidak dapat dilaksanakan baik karena anggaran pengelolaan yang terbatas (*refocusing*), penerapan PPKM, SDM yang terbatas, dan faktor teknis/administrasi lainnya.



Gambar 40. Penilaian efektivitas pengelolaan KK lingkup BKSDA Aceh

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan, walaupun target lokasi yang harus dinilai lebih banyak. Pada tahun 2021 target penilaian efektivitas pengelolaan KK sebanyak 277 unit KK, dengan capaian 285 unit KK (102,89), sedangkan tahun 2020, dengan target 132 unit KK, capaian 129 unit KK (97,73%), dengan demikian realisasi tahun 2021 meningkat 5,16% dibanding tahun 2020.

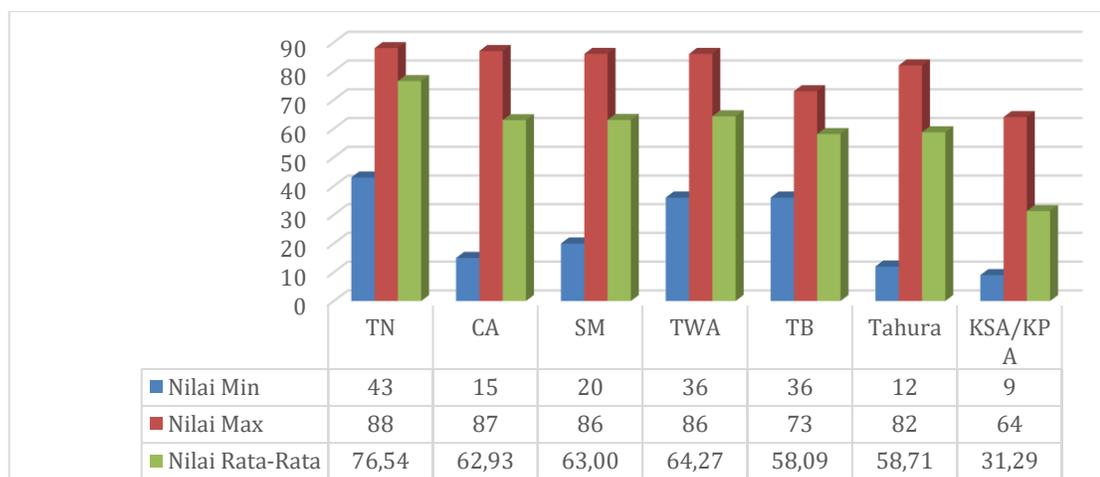


Gambar 41. Capaian efektifitas Pengelolan KK per tahun

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KK SEBAGAI IKP

Sebagai Indikator Kinerja Program (IKP), efektivitas pengelolaan KK diukur dari hasil penilaian yang dihitung dari baseline seluruh kawasan konservasi (560 unit) s/d 2021. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi s/d tahun 2021 adalah sebesar **61,56%** lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2021, sebesar **55%**, sehingga capaiannya sebesar **111,93%**.

Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tertinggi pada fungsi taman nasional, yaitu 76,54%, hal ini disebabkan karena unit pengelola hanya mengelola 1 unit kawasan, sedangkan nilai efektivitas terendah pada fungsi KSA/KPA (31,29%). Hal ini disebabkan fungsinya yang belum jelas, sehingga pengelolaannya belum terarah.



Gambar 42. Grafik nilai rata-rata efektivitas pengelolaan KK

Selama tahun 2021 teridentifikasi penambahan kawasan konservasi baru yang belum direncanakan penilaian efektivitas pengelolaannya sebanyak 7 unit, disamping itu terdapat 3 unit kawasan yang sejak tahun 2020 yang lalu tidak dinilai karena menunggu proses EKF atau kondisi dilapangan tidak memenuhi untuk dilakukan penilaian, sehingga untuk keseluruhan kawasan konservasi di Indonesia (560 unit KK) masih terdapat 10 unit KK yang belum memiliki nilai efektivitas pengelolaan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Unit KK yang belum memiliki nilai efektivitas pengelolaan

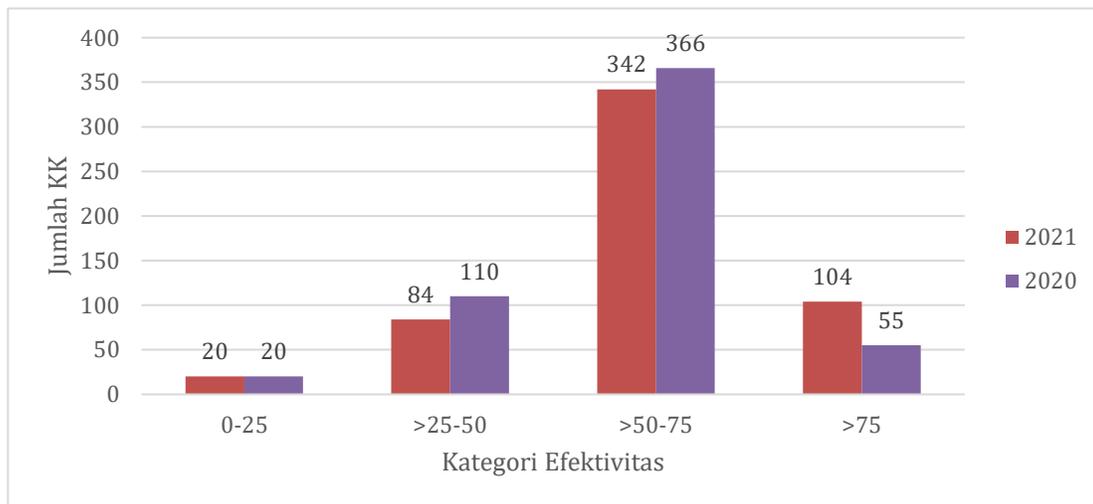
No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Fungsi	Keterangan
1	BBKSDA Jawa Barat	Malabar	CA	Tidak dinilai
2	BBKSDA NTT	Sisimeni Sanam	KSA/KPA	Tidak dinilai
3	BBKSDA Papua Barat	Hutan Pendidikan Tuan Wowi	KSA/KPA	Tidak dinilai
4	BBKSDA Papua Barat	Waigeo	SM	KK baru
5	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sopeng	KSA/KPA	KK baru
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	Toraja Utara	KSA/KPA	KK baru
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	Calon Tahura Mesawa	KSA/KPA	KK baru
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kotabaru	Sebatung	TAHURA	KK baru
9	Dishutbun Kalbar	Pandan Puloh	TAHURA	KK baru
10	Pemda Kab. Malino	Malino	TAHURA	KK baru

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata nilai efektivitas pengelolaan KK di Indonesia mengalami peningkatan untuk setiap fungsi kawasan, kecuali untuk kawasan TB dan KSA/KPA. Sampai saat ini pedoman atau arahan pengelolaan untuk kawasan taman buru belum ada, sehingga di lapangan 11 kawasan buru yang ada di Indonesia belum dikelola sesuai dengan fungsinya untuk wisata buru.

Tabel 30. Perbandingan nilai efektivitas pengelolaan KK tahun 2020 dan 2021

UNIT KK	S/D TAHUN 2020			S/D TAHUN 2021		
	MIN	MAX	RATA-RATA	MIN	MAX	RATA-RATA
TN	43	85	74.98	43	88	76.54
CA	54	87	60.52	15	87	62.93
SM	20	78	60.04	20	86	63.00
TWA	24	82	62.87	36	86	64.27
TB	36	78	58.36	36	73	58.09
Tahura	12	77	57.91	12	82	58.71
KSA/KPA	9	64	31.3	9	64	31.29

Dari hasil penilaian terakhir seluruh kawasan, apabila dikelompokkan tingkat efektivitasnya dalam 4 kelas, yaitu: 0-25% (tidak efektif), >25-50 (kurang efektif), >50-75 (cukup efektif) dan >75-100 (efektif) maka sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia berada pada posisi cukup efektif, sedangkan yang sudah efektif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 55 unit KK (tahun 2020) menjadi 104 unit KK (tahun 2021) dan mayoritas sebagai taman nasional dan taman wisata alam.



Gambar 43. Perbandingan kategori efektivitas pengelolaan KK di Indonesia tahun 2020 dan 2021

Walaupun secara target penilaian sudah tercapai, namun dalam proses penilaian efektivitas pengelolaan KK tahun 2021, sempat menemui kendala yaitu:

1. Proses penilaian terlambat

Adanya rencana untuk menggunakan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan yang akan disinkronkan dengan kawasan hutan lainnya berdasarkan SK Menteri KLH, menyebabkan kegiatan penilaian efektivitas KK menjadi tertunda. Keputusan menggunakan *tool*/ METT sebagaimana yang sudah digunakan selama ini baru dilakukan pada bulan September, sehingga proses penilaian dilaksanakan setelah itu. Untuk beberapa UPT khususnya KSDA dengan target lokasi penilaian KK cukup banyak, hal ini menjadi persoalan tersendiri.

2. Terbatasnya jumlah Fasilitator di Pusat dan UPT

3. Refocusing anggaran penilaian efektivitas pengelolaan KK di UPT

Sebagiai tindak lanjut perlu diupayakan Langkah sebagai berikut :

1. melakukan evaluasi tool penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang sesuai dengan dinamika pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia.
2. menyusun arahan kebijakan untuk memastikan rencana tindak lanjut hasil penilaian yang telah disusun oleh pengelola dapat ditindaklanjuti.

Proyek *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* (BCCP-GLE)

Proyek BCCP-GLE merupakan proyek yang didanai melalui hibah luar negeri dari The German Ministry of Environment, Nature Conservation, Building, and Nuclear Safety (BMUB), KfW dengan jenis hibah terencana uang. Pelaksanaan proyek ini berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Alokasi dana untuk proyek BCCP-GLE seluruhnya adalah sejumlah 8.460.000 Euro dengan rincian yang dikelola Kementerian LHK sejumlah 3.936.271 Euro dan penerusan hibah di Dinas Kehutanan Provinsi Aceh sejumlah 4.523.729 Euro. Jangka waktu pelaksanaan proyek ini dimulai pada tanggal 24 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tujuan dari proyek BCCP-GLE adalah sebagai berikut :

- Terbangunnya 4.000 Ha Hutan Rakyat dan sistem agroforestry di 40 desa
- Kepastian batas kawasan hutan ± 50 km
- Conservation community agreement di 40 desa
- Menurunnya jumlah konflik satwa liar.

Pada tahun 2021, Dokumen Amandement *Separate Agreement* (SA) dan *Financing Agreement* (SA) Kegiatan HLN Proyek Biodiversity Conservation and Climate Protection

in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) pada tanggal 9 Juni 2021. 4. Pada Amandement SA dan FA tersebut dialokasikan anggaran sebesar EURO 2.831.211,3 atau setara Rp 46.714.986.450 (pada kurs Rp 16.500). Pada periode perpanjangan tersebut terdapat penambahan untuk kabupaten baru yaitu Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Untuk penambahan output dengan rincian sebagai berikut:

1. 4.000 ha + 2.000 ha kemitraan konservasi di dalam zona/blok tradisional kawasan konservasi dan pengembangan masyarakat desa sekitar untuk membantu menstabilkan penggunaan lahan di setidaknya 40 desa + 10 desa yang berbatasan dengan hutan dan lahan basah dalam kawasan ekosistem Gunung Leuser.
2. 50 km + 18 km dari garis perbatasan taman nasional, kawasan konservasi dan hutan lindung diperjelas melalui koordinasi yang berhasil dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab termasuk desa-desa terkait.
3. Kontrak konservasi desa (KKD/Qanun Desa) dibuat di setidaknya 40 desa + 10 desa.
4. Setidaknya 36 + 14 kasus konflik manusia dengan satwa liar (HWCS) yang secara signifikan dikurangi di daerah Proyek penting sampai proyek berakhir.

Selain hal tersebut, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan project yaitu UPT BKSDA Aceh, UPT BBTN Gunung Leuser dan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi *Project Implementing Unit* (PIU). Selain itu Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga berperan sebagai *Project Executing Agency* (PEA). Untuk perpanjangan hingga Desember 2022, masing-masing PIU mendapatkan alokasi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 31. Alokasi kegiatan BCCPGLE berdasarkan PIU

No	Project Implementing Unit	Euro (€)	Rupiah (Rp) (kurs Rp. 16.500)
1.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	411.959,00	6.797.323.500
2.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	357.500,00	5.898.750.000
3.	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	433.021,30	7.144.852.450
	Total	1.202.480,30	19.840.924.950

Untuk konsultan pelaksana GFA Consulting Services GmbH sesuai dalam Separate Agreement ditetapkan untuk tetap menjadi konsultan pelaksana pada periode perpanjangan project. Alokasi untuk anggaran konsultan pelaksana pada tahun 2021 – 2022 adalah sebesar EUR 718.461,00 untuk anggaran kegiatan dan EUR 490.735,00 untuk *consulting services*.

Tabel 32. Capaian Kegiatan BCCPGLE tahun 2021

Kegiatan	Kab. Aceh Selatan	Kota Subulussalam	Kab. Aceh Singkil
Sosialisasi	8 desa	2 desa	2 desa
PRA/CAP	8 desa	2 desa	2 desa
PLUP	Draft Final : 5 desa	Draft Final : 2 desa	Draft Final : - desa
	Sosialisasi : 1 desa	Sosialisasi : - desa	Sosialisasi : - desa
HD	11 desa	4 desa	- desa
MDK	3 desa	- desa	- desa
KBR	7 desa	2 desa	1 desa
Agro forestry	7 desa	2 desa	- desa
HR	6 desa	2 desa	- desa
Reboisasi	2 desa	2 desa	- desa
Restorasi	1 desa (12 ha)	- desa	- desa
Konflik Satwa	1 desa (manusia dengan buaya)	- desa	- desa
HHKB / Produk Produktif	1 desa (budidaya madu)	- desa	- desa
Pengadaan Bibit	Jaben : 26.375 bibit Kapur : 37.200 bibit MPTS : 43.500 bibit Pala : 17.800 bibit Jengkol : 47.085 bibit Ketapang : 6.000 bibit		

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UPT diantaranya adalah :

1. Penanganan konflik satwa liar (buaya)
2. Pembuatan Peta Konflik Satwa Liar (Harimau) di BBTNGL Aceh Selatan
3. Bench Marking (Studi Banding) pengelolaan Penyu di Bali
4. Pembuatan Papan Informasi
5. Survei alokasi alternatif tempat pelepasan penyu

Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIU Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan pembayaran kegiatan consultant services and activity
2. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi
3. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi
4. Pelaksanaan kegiatan External Audit oleh konsultan
5. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat
6. Pelaksanaan kegiatan National and International Comparative Study

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi selaku Project Executing Agency adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan lintas komponen (R1 dan R2), mengkoordinir lintas kementerian dan dinas pemerintah daerah yang menjadi bagian dari steering committee, serta berkoordinasi dengan BBTNGL dan BKSDA selaku Project Implementing Unit (PIU) dan konsultan pelaksana (GFA Consulting Services GmbH), dan menyebarluaskan informasi proyek secara efektif.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyiapkan pelaporan untuk kebutuhan proyek antara lain termasuk laporan kegiatan dan kinerja program, laporan pelaksanaan program yang didanai hibah setiap triwulan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bappenas serta memberikan dukungan kepada Executing Agency (EA) dalam pembahasan dengan Bappenas dan KfW;
3. Membantu mencapai pemenuhan keluaran program sesuai dengan rancangan program dan peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan dan pedoman KfW,
4. Meninjau laporan kemajuan proyek yang disiapkan oleh GFA Consulting Services GmbH dan menyiapkan Laporan Triwulanan proyek yang akan dilaporkan kepada oleh Executing Agency (EA).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyiapkan pelaporan untuk kebutuhan proyek antara lain termasuk laporan kegiatan dan kinerja program, laporan pelaksanaan program yang didanai hibah setiap triwulan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bappenas serta memberikan dukungan kepada Executing Agency (EA) dalam pembahasan dengan Bappenas dan KfW;
6. Membantu mencapai pemenuhan keluaran program sesuai dengan rancangan program dan peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan dan pedoman KfW;
7. Meninjau laporan kemajuan proyek yang disiapkan oleh GFA Consulting Services GmbH dan menyiapkan Laporan Triwulanan proyek yang akan dilaporkan kepada oleh Executing Agency (EA).

Permasalahan Dan Tindak Lanjut Proyek BCCP-GLE

Berkaitan dengan pelaksanaan proyek BCCP-GLE tahun 2021, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan perpanjangan hingga 2022 :

1. Kegiatan untuk perpanjangan baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun pada 2021 menyebabkan akan menyebabkan kemunduran waktu pelaksanaan.
2. Kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang menggunakan rekening khusus baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2021, menyebabkan rendahnya realisasi kegiatan.
3. Akumulasi anggaran dan kegiatan yang direncanakan di 2021, namun baru dapat dilaksanakan pada 24 November 2021 menyebabkan sisa anggaran di carry over

- ke tahun berikutnya. Anggaran sisa pada 2021 dan anggaran 2022 perlu direview kembali mengingat waktu pelaksanaan yang hanya sisa 1 tahun.
4. Opsi perpanjangan mengingat aspek teknis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun antara lain kegiatan penanaman dsb.
 5. Anggaran pada tahun 2022, untuk Direktorat PKK hanya sebesar Rp. 3,436,757,000. Sesuai data alokasi dari sisa anggaran 2021 dan 2022 sesuai separate agreement adalah sebesar Rp. 5,338,945,700 untuk anggaran diluar kegiatan pembayaran jasa konsultan pelaksana.
 6. Untuk alokasi dari anggaran untuk jasa konsultan pelaksana untuk tahun 2021 hanya Rp. 3,518,904,000. Sedangkan sisa anggaran 2021 dan 2022 sesuai separate agreement untuk konsultan pelaksana adalah sebesar Rp. 19,534,917,440.
 7. Terkait untuk point 5 dan 6, perlu ada mekanisme top up pada tahun 2022 untuk anggaran pada Direktorat PKK dalam rangka optimalisasi sisa anggaran yang tersedia.
 8. Persetujuan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan pelaksana antara lain pembibitan, tata batas dan qanun belum direalisasikan karena menunggu persetujuan teknis dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.
 9. Pendaftaran ulang untuk kontrak konsultan pelaksana.
 10. Perpanjangan kontrak untuk IC pada NPMU Secretariat
 11. Finalisasi Project Implementation Manual dan Annual Work Plan
 12. Pembuatan SK steering committee dan SK kelompok kerja Kegiatan BCCP-GLE untuk tahun 2022.

Pengarusutamaan Gender

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga masuk dalam Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Ditjen KSDAE sesuai dengan SK Dirjen KSDAE No. 600/KSDAE/SET.3/REN.2/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Disamping itu Direktorat PKK Juga turut mengawal dan berpartisipasi dalam penyusunan ROADMAP PUG Ditjen KSDAE yang mulai diinisiasi tahun 2021

Sebagai Direktorat Teknis yang mengawal kegiatan perencanaan Kawasan, penyelesaian konflik, perlindungan kawasan hutan, kemitraan konservasi, pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi berkomitmen untuk selalu memasukkan isu gender dalam setiap program dan kegiatan termasuk arahan terhadap program kegiatan di

UPT. Dalam implementasinya salah bentuk pengarusutamaan gender bidang konservasi adanya keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga. Keterlibatan kaum perempuan ini mendominasi pada kegiatan persemaian, hampir sebagian besar kegiatan persemaian dilakukan oleh kaum perempuan di sejumlah lokasi pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan.



Gambar 44. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem



Gambar 45. Peran perempuan Aceh Tenggara dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran awal Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 26.927.946.000,-. Sebagaimana mandat Kementerian Keuangan untuk melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi sebesar Rp 21.713.959.000 ,-

Berdasarkan jenis belanja, proporsi anggaran tertinggi ke yang terendah berturut-turut yaitu belanja barang operasional dan non operasional sebesar 96,25 % dan sisanya berupa belanja modal (non operasional) sebesar 3.75 %. Sebagian besar anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sumber dana HLN 62,36% , RM sebesar 22,07 % , sumber dana RMP 6,24 %

Anggaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi terbagi menjadi 4 output kegiatan. Proporsi terbesar yaitu Kebijakan Penanganan area terbuka (*Opened area*) di kawasan konservasi yang ditangani sebesar 6.63 %, berturut-turut berikutnya yaitu Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi sebesar 4.52 %, Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi sebesar 4.36 % dan Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar 8.83 % , serta HLN Gunung Leuser 75.66%

Tabel 303. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Rincian Output

No	Kode / Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
1	5421.PBV.001 - Kebijakan Penanganan area terbuka (<i>Opened area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	2.285.637.000	2.261.810.255	98,66
2	5421.PBV.003 - Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	981.550.000	974.923.750	99,32
3	5421.PBV.004 Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	947.426.000	823.113.256	86,88
4	5421.PBV.005 - Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1.071.400.000	1.046.020.995	97,63

No	Kode / Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
	5421.BDB.003- HLN Biodiversity Leuser	16.427.946.000	7.554.876.427	45,99
	Jumlah	21.713.959.000	12.660.744.683	58,31

Sumber: SAIBA, 12 Januari 2022

Melalui berbagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran, realisasi anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi sebesar 58,31 % atau sebesar Rp 12.660.744.683. dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 9.808.985.379,- (75, 94 %%), realisasi tahun 2021 mengalami penurunan realisasi sebesar 17,63 %. Serapan anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Keterlambatan proses perpanjangan dan realisasi Proyek BCCPGLE; 2) peningkatan penyebaran wabah covid 19 tahun 2021 yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran.

Realisasi Anggaran pada Kegiatan HLN Biodiversity Leuser (BCCPGLE)

Pada tahun 2021, Subdit Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 16,427,946,000 yang dananya bersumber dari RM dan PNBP. Kegiatan dan realisasi serapan pada anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Realisasi anggaran BCCPGLE tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Jasa Konsultan pelaksana	11,033,196,000	5,344,239,677	48.44%
2.	Kesekretariatan Pengelolaan Proyek	2,426,200,000	627,565,000	25.86%
3.	Comparative study management of National park and protected forest and attending internatioanl event WHS	824,000,000	203,247,800	24.67%
4.	Rapat Koordinasi (National Steering Committee dan Koordinasi Kegiatan)	165,000,000	0	0%
5.	Audit Pelaksanaan Proyek	321,300,000	0	0%
6.	Dana Pendamping BCCPGLE (RMP)	1,493,450,000	1,373,228,203	91.95%

7.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	164,800,000	0	0%
	Total	16,427,946,000	7,548,280,680	45,95%

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat dari Kementerian Keuangan untuk penggunaan akun rekening khusus pada tanggal 24 November 2021. Terkait dengan realisasi yang dilaksanakan oleh Konsultan Pelaksana, pada tahun 2021 telah direalisasikan invoice dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi invoice BCCPGLE

No	Invoice No	Rincian Invoice	Nilai Invoice	Nilai Invoice dalam rupiah
1.	30	10th Instalment for Consulting Services under Consulting Contract	118,808.75	1,927,739,689.00
2.	31	11th Instalment for Consulting Services under Consulting Contract	118,808.75	1,927,739,689.00
3.	32	6th Reimbursables Consulting Services	1,577.55	25,596,647.00
4.	34	10th Reimbursable Project Activities under Consulting Contract	90,176.41	1,463,163,652.00

Berkaitan rendahnya serapan anggaran pada pelaksanaan proyek BCCP-GLE tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kegiatan untuk perpanjangan baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun pada 2021 menyebabkan akan menyebabkan kemunduran waktu pelaksanaan.
2. Kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang menggunakan rekening khusus baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2021, menyebabkan rendahnya realisasi kegiatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan perpanjangan hingga 2022 :

- Akumulasi anggaran dan kegiatan yang direncanakan di 2021, namun baru dapat dilaksanakan pada 24 November 2021 menyebabkan sisa anggaran di carry over

- ke tahun berikutnya. Anggaran sisa pada 2021 dan anggaran 2022 perlu direview kembali mengingat waktu pelaksanaan yang hanya sisa 1 tahun.
- Opsi perpanjangan mengingat aspek teknis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun antara lain kegiatan penanaman dsb.
 - Anggaran pada tahun 2022, untuk Direktorat PKK hanya sebesar Rp. 3,436,757,000. Sesuai data alokasi dari sisa anggaran 2021 dan 2022 sesuai separate agreement adalah sebesar Rp. 5,338,945,700 untuk anggaran diluar kegiatan pembayaran jasa konsultan pelaksana.
 - Untuk alokasi dari anggaran untuk jasa konsultan pelaksana untuk tahun 2021 hanya Rp. 3,518,904,000. Sedangkan sisa anggaran 2021 dan 2022 sesuai separate agreement untuk konsultan pelaksana adalah sebesar Rp. 19,534,917,440.
 - perlu ada mekanisme top up pada tahun 2022 untuk anggaran pada Direktorat PKK dalam rangka optimalisasi sisa anggaran yang tersedia.

Realisasi Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT

Sebagai penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi memantau pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh UPT. Selama tahun 2021 Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT mencapai Rp. 245,562,635,000,- termasuk anggaran yang tercatat sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Hibah Luar Negeri. Anggaran tersebut tersebar di 74 UPT baik UPT Taman Nasional maupun UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA).

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT

No	Kode/ Rincian Output	Pagu	Realisasi	%	Ket
1	5421.AED.001 Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	20,893,796,000	19,189,296,049	91.84	
2	5421.AED.002 Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi (PEN)	469,674,000	465,648,000	99.14	
3	5421.PBV.002 Area terbuka (<i>Opened area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	25,672,270,000	23,713,134,943	92.37	
4	5421.PBV.007 Area terbuka (<i>Opened area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani (PEN)	19,622,163,000	18,683,063,335	95.21	

No	Kode/ Rincian Output	Pagu	Realisasi	%	Ket
5	5421.PBV.006 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	69,162,908,000	66,237,806,817	95.77	
6	5421.PBV.008 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (PEN)	12,581,498,000	12,091,994,275	96.11	
7	5421.BDB.001 Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	47,207,240,000	44,830,961,538	94.97	
8	5421.BDB.006 Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi (PEN)	2,582,162,000	2,572,290,800	99.62	
9	5421.RAG.001 Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	58,000,000	57,860,000	99.76	BKSDA Kaltim
10	5421.RAG.002 Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem (PEN)	4,687,300,000	4,575,596,215	97.62	
11	5421.BDB.002 HLN Forest Programme IV Sulawesi	9,264,420,000	6,801,765,986	73.42	BBKSDA Sulsel
12	5421.BDB.003 HLN Biodiversity Leuser	12,879,680,000	996,397,248	7.74	BBTNGL, BKSDA Aceh
13	5421.BDB.004 HLN Forest Programme II Sumatera	14,007,864,000	13,036,851,364	93.07	BKSDA Jambi, BBTNKS
14	5421.QDB.005 HLN BioCF ISFL Jambi Sustainable Landscape Management Project	6,473,660,000	5,226,249,457	80.73	BKSDA Jambi, BBTNKS, BTN Bukit 12, BTN Berbak Sembilang, BTN Bukit 30
JUMLAH		245,562,635,000	218,478,916,027	88.97	

Sumber: satuDJA Kemenkeu dan emonev Bappenas

Sampai akhir tahun 2021, realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT mencapai Rp. 218,478,916,027 atau 88,97%. Sama seperti halnya anggaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pusat, realisasi terendah ada pada Output HLN Biodiversity Leuser yaitu 7,74%. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini hampir sama dengan di Pusat.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Nilai kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi berada pada angka 88,65% yang diperoleh dari 4 capaian indikator kinerja yaitu: Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu 93,6 %; Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi yaitu 56,25 %; Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani yaitu 101,85 %; dan Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya yaitu 102,89%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 58,31% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 1,52. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efisien.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditentukan oleh nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Nilai EKA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran yang juga menggambarkan kualitas organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerjanya. Sedangkan nilai IKPA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas perbendaharaan organisasi yang ditentukan 4 parameter yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai EKA dan IKPA dihitung pada setiap entitas baik satuan kerja, Eselon I dan Kementerian. Nilai EKA diperoleh dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan sedangkan nilai IKPA dipantau pada sistem online monitoring sistem perbendaharaan negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan entitas yang berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja. Namun demikian, dalam menentukan nilai kinerja anggaran tidak dapat dilakukan sebagai entitas tersendiri mengingat dalam pelaksanaan anggaran, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, menjadi salah satu bagian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai kinerja anggaran menjadi entitas Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE yang juga ditentukan oleh 5 Direktorat lainnya.



Nilai EKA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar 87,31 sedangkan nilai IKPA sebesar 85,66 (Sumber: SMART DJA dan OMSPAN, 12 Januari 2022). Nilai EKA bersama dengan nilai IKPA dengan proporsi 60 % nilai EKA dan 40 % nilai IKPA akan membentuk nilai kinerja anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 86,65. Nilai IKPA Kantor Pusat mengalami peningkatan dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 nilai IKPAnya sebesar 78,47. Nilai IKPA dipengaruhi 13 indikator, dimana pada tahun 2021, indikator yang mendapatkan nilai maksimal 100 yaitu pada indikator revisi DIPA, pagu minus, LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyelesaian tagihan, Renkas, dan kesalahan SPM.

BAB IV PENUTUP

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pencapaian target renstra tahun 2022-2024, dimana Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi bertanggung jawab pada 3 sasaran strategis yaitu: 1) Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi; 2) Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 3) Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui 4 indikator kinerja kegiatan serta target tahun 2021 yaitu : 1) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa; 2) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi dengan target 90.000 hektar) ; 3) Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani seluas 541.000 hektar, dan; 4) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sebanyak 277 Unit KK.

Berkaitan dengan target kinerja tahun 2021, angka capaian kinerja menggambar bahwa Direktorat Pengelolan Kawasan Konservasi telah mendukung terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis Direktorat Jendael KSDAE maupun KLHK yaitu : 1.Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dan; 2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi. Kontribusi tersebut tercermin dari Capaian Indaktor Kinerja Kegiatan (IKK) pengelolaan Kawasan konservasi tahun 2021 adalah 89,01 %, sedangkan secara kumulatif pada periode dua tahun rencana strategis 2020-2024 adalah 95,95%.

Capaian kinerja tahun 2021 mengajarkan pada kita bahwa untuk meningkatkan tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE membutuhkan proses yang berkelanjutan sebagaimana target kinerja diharapkan pada akhir tahun 2024. Untuk itu, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi akan mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan struktur organisasi baru dalam pencapaian kinerja. Untuk mempertahankan produktivitas kerja maka perlu dilakukan penataan SDM dan penyesuaian sistem kerja. Terakhir, pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional mengarahkan kepada kita untuk dapat menggunakan dukungan anggaran dalam pencapaian target kinerja dengan optimal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Jefri Susyafrianto, M.M.**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi**

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jakarta, 21 Oktober 2021

Direktur,



Ir. Jefri Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Jefri Susyafrianto, M.M.**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Wiratno, M.Sc**
Jabatan : **Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Jefri Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Kebijakan Kemandirian Masyarakat di Desa Penyangga Kawasan Konservasi	500 Desa
2.		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di KK melalui kemitraan konservasi	Kebijakan Pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.000 Hektar
3.		Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Kebijakan Penanganan Area Terbuka (<i>Opened Area</i>) di Kawasan Konservasi yang Ditangani	541.000 Hektar
4.		Jumlah unit kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	277 Unit KK

Kegiatan

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. *Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (HLN)*

Anggaran

Rp. 5.286.013.000,-
 Rp. 16.427.946.000,-

Rp.21.713.959.000

Jakarta, 21 Oktober 2021

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal KSDAE,**



Ir. Wiratno, M.Sc
 NIP. 19620328 198903 1 003

**Pihak Pertama,
Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi,**

Ir. Jefri Susyafrianto, M.M
 NIP. 19680404 199603 1 004

**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eseeelon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	0	100 Desa	200 Desa	500 Desa
2.		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di KK melalui kemitraan konservasi	0	30.000 Haktar	60.000 Hektar	90.000 Hektar
3.		Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	0	0	0	541.000 Hektar
4.		Jumlah unit kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	0	0	0	277 Unit KK

Jakarta, 21 Oktober 2021

Direktur,



**Ir. Jekri Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004**

Lampiran 2. Capaian Kesepakatan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
1	BKSDA Aceh	Bueng	Kota Jantho	Aceh Besar	2020
2	BKSDA Aceh	Jalin	Kota Jantho	Aceh Besar	2020
3	BKSDA Aceh	Teluk Nibung	Pulau Banyak	Aceh Singkil	2020
4	BKSDA Aceh	Asantola	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	2020
5	BKSDA Aceh	Takal Pasir	Singkil	Aceh Singkil	2020
6	BKSDA Aceh	Awek	Kota Jantho	Aceh Besar	2021
7	BKSDA Aceh	Cot Bayu	Trumon Tengah	Aceh Selatan	2021
8	BKSDA Aceh	Data Cut	Kota Jantho	Aceh Besar	2021
9	BKSDA Aceh	Haloban	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	2021
10	BKSDA Aceh	Longkib	Longkib	Kota Subulussalam	2021
11	BKSDA Aceh	Suka Tani	Kota Jantho	Aceh Besar	2021
12	BBTN Gunung Leuser	Pasie Lembang	Kluet Selatan	Aceh Selatan	2020
13	BBTN Gunung Leuser	Sukadamai	Lembah Sabil	Aceh Barat Daya	2020
14	BBTN Gunung Leuser	Penosan Sepakat	Blangjerango	Gayo Lues	2020
15	BBTN Gunung Leuser	Mekar Makmur	Sei Lengan	Langkat	2020
16	BBTN Gunung Leuser	Telagah	Sei Bingai	Langkat	2020
17	BBTN Gunung Leuser	Namo Sialang	Batang Serangan	Langkat	2020
18	BBTN Gunung Leuser	Perkebunan Bukit Lawang	Bahorok	Langkat	2020
19	BBTN Gunung Leuser	Agusan	Blangkejeren	Gayo Lues	2021
20	BBTN Gunung Leuser	Alue Sungai Pinang	Jeumpa	Aceh Barat Daya	2021
21	BBTN Gunung Leuser	Bineh Krueng	Tangan-Tangan	Aceh Barat Daya	2021
22	BBTN Gunung Leuser	Blang Dalam	Babah Rot	Aceh Barat Daya	2021
23	BBTN Gunung Leuser	Kuning Abadi	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	2021
24	BBTN Gunung Leuser	Rambung Teldak	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	2021
25	BBTN Gunung Leuser	Simpur Jaya	Ketambe	Aceh Tenggara	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
26	BBTN Gunung Leuser	Singah Mulo	Puteri Betung	Gayo Lues	2021
27	BBTN Gunung Leuser	Tanjung Lama	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	2021
28	BBTN Gunung Leuser	Batu Jong-Jong	Bahorok	Langkat	2021
29	BBTN Gunung Leuser	Bukit Mas	Besitang	Langkat	2021
30	BBTN Gunung Leuser	Sampe Raya	Bahorok	Langkat	2021
31	BBKSDA Sumatera Utara	Kaban Tengah	Sitelu Tali Urang Jehe	Pakpak Bharat	2020
32	BBKSDA Sumatera Utara	Karang Gading	Labuhan Deli	Deli Serdang	2020
33	BBKSDA Sumatera Utara	Dolok Marawa	Silou Kahean	Simalungun	2020
34	BBKSDA Sumatera Utara	Purba Tengah	Purba	Simalungun	2020
35	BBKSDA Sumatera Utara	Situmba Julu	Sipirok	Tapanuli Selatan	2020
36	BBKSDA Sumatera Utara	Morang	Batang Onang	Padang Lawas Utara	2020
37	BBKSDA Sumatera Utara	Labuhan Rasoki	Padangsidempuan Tenggara	Kota Padang Sidempuan	2020
38	BBKSDA Sumatera Utara	Suka Maju	Tanjung Pura	Langkat	2020
39	BBKSDA Sumatera Utara	Tapak Kuda	Tanjung Pura	Langkat	2020
40	BBKSDA Sumatera Utara	Daulu	Berastagi	Karo	2021
41	BBKSDA Sumatera Utara	Tiga Runggu	Purba	Simalungun	2021
42	BBKSDA Sumatera Utara	Sibolangit	Sibolangit	Deli Serdang	2021
43	BTN Batang Gadis	Muara Batang Angkola	Siabu	Mandailing Natal	2020
44	BTN Batang Gadis	Pastap Julu	Tambangan	Mandailing Natal	2020
45	BTN Batang Gadis	Pagar Gunung	Kotanopan	Mandailing Natal	2020
46	BTN Batang Gadis	Hutapuli	Kotanopan	Mandailing Natal	2020
47	BTN Batang Gadis	Huta Baringin Maga	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	2020
48	BTN Batang Gadis	Huta Godang Muda	Siabu	Mandailing Natal	2020
49	BTN Batang Gadis	Huta Godang	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2020
50	BTN Batang Gadis	Sirambas	Panyabungan Barat	Mandailing Natal	2020
51	BTN Batang Gadis	Pagaran Gala-Gala	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
52	BTN Batang Gadis	Lumban Dolok	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	2021
53	BTN Batang Gadis	Huta Lombang	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	2021
54	BTN Batang Gadis	Ampung Padang	Batang Natal	Mandailing Natal	2021
55	BTN Batang Gadis	Simpang Banyak Jae	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2021
56	BTN Batang Gadis	Simpang Banyak Julu	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2021
57	BTN Batang Gadis	Laru Lombang	Tambangan	Mandailing Natal	2021
58	BBKSDA Riau	Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
59	BBKSDA Riau	Aur Kuning	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
60	BBKSDA Riau	Tanjung Beringin	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
61	BBKSDA Riau	Subayang Jaya	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
62	BBKSDA Riau	Pangkalan Serai	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
63	BBKSDA Riau	Gajah Bertalut	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2020
64	BBKSDA Riau	Bukit Melintang	Kuok	Kampar	2020
65	BBKSDA Riau	Dayun	Dayun	Siak	2020
66	BBKSDA Riau	Rawa Mekar Jaya	Sungai Apit	Siak	2020
67	BBKSDA Riau	Kibing	Batu Aji	Kota Batam	2020
68	BBKSDA Riau	Pulau Terap	Kuok	Kampar	2021
69	BBKSDA Riau	Kerumutan	Kerumutan	Pelalawan	2021
70	BBKSDA Riau	Rantau Bakung	Rengat Barat	Indragiri Hulu	2021
71	BBKSDA Riau	Buluh Cina	Siak Hulu	Kampar	2021
72	BBKSDA Riau	Teluk Meranti	Teluk Meranti	Pelalawan	2021
73	BBKSDA Riau	Mundam	Dumai Timur	Dumai	2021
74	BBKSDA Riau	Jaya Mukti	Dumai Timur	Dumai	2021
75	BBKSDA Riau	Muara Dua	Siak Kecil	Bengkalis	2021
76	BBKSDA Riau	Buantan Besar	Siak	Siak	2021
77	BBKSDA Riau	Tuah Indrapura	Bunga Raya	Siak	2021
78	BTN Bukit Tiga Puluh	Sungai Akar	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
79	BTN Bukit Tiga Puluh	Rantai Langsat	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	2021
80	BTN Bukit Tiga Puluh	Siambul	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	2021
81	BTN Bukit Tiga Puluh	Keritang	Kemuning	Indragiri Hilir	2021
82	BTN Bukit Tiga Puluh	Selensen	Kemuning	Indragiri Hilir	2021
83	BTN Bukit Tiga Puluh	Batu Ampar	Kemuning	Indragiri Hilir	2021
84	BTN Bukit Tiga Puluh	Usul	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	2021
85	BTN Bukit Tiga Puluh	Talang Lakat	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	2021
86	BTN Tesso Nilo	Gunungmelintang	Kuantan Hilir	Kuantan Singingi	2020
87	BTN Tesso Nilo	Rambahan	Logas Tanah Darat	Kuantan Singingi	2021
88	BTN Tesso Nilo	Pontian Mekar	Lubuk Batu Raya	Indragiri Hulu	2021
89	BBTN Kerinci Seblat	Giri Mulyo	Kayu Aro Barat	Kerinci	2020
90	BBTN Kerinci Seblat	Kebun Baru	Kayu Aro Barat	Kerinci	2020
91	BBTN Kerinci Seblat	Renah Alai	Jangkat	Merangin	2020
92	BBTN Kerinci Seblat	Rantau Kermas	Jangkat	Merangin	2020
93	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Mentilin	Jangkat	Merangin	2020
94	BBTN Kerinci Seblat	Tanjung Kasri	Jangkat	Merangin	2020
95	BBTN Kerinci Seblat	Renah Kemumu	Jangkat	Merangin	2020
96	BBTN Kerinci Seblat	Tanjung Berugo	Lembah Masurai	Merangin	2020
97	BBTN Kerinci Seblat	Tuo	Lembah Masurai	Merangin	2020
98	BBTN Kerinci Seblat	Nilo Dingin	Lembah Masurai	Merangin	2020
99	BBTN Kerinci Seblat	Air Liki Baru	Tabir Barat	Merangin	2020
100	BBTN Kerinci Seblat	Limau Gadang Lumpo	IV Jurai	Pesisir Selatan	2020
101	BBTN Kerinci Seblat	Taluak Tigo Sakato	Batang Kapas	Pesisir Selatan	2020
102	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Gambir Sako	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pesisir Selatan	2020
103	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Gadang Selatan	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	2020
104	BBTN Kerinci Seblat	Pakan Rabaa Utara	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	2020
105	BBTN Kerinci Seblat	Bukit Ulu	Karang Jaya	Musi Rawas Utara	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
106	BBTN Kerinci Seblat	Pasenan	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	Musi Rawas	2020
107	BBTN Kerinci Seblat	Bandung Marga	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	2020
108	BBTN Kerinci Seblat	Sebelat Ulu	Pinang Belapis	Lebong	2020
109	BBTN Kerinci Seblat	Pondok Baru	Selagan Raya	Muko muko	2020
110	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya	Sangir	Solok Selatan	2021
111	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Lubuk Gadang Tenggara	Sangir	Solok Selatan	2021
112	BBTN Kerinci Seblat	Sukaraya Baru	STL Ulu Terawas	Musi Rawas	2021
113	BBTN Kerinci Seblat	Kuto Tanjung	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	2021
114	BBTN Kerinci Seblat	Karang Jaya	Selupu Rejang	Rejang Lebong	2021
115	BBTN Kerinci Seblat	Painan Selatan Painan	IV Jurai	Pesisir Selatan	2021
116	BBTN Kerinci Seblat	Sukau Datang	Tubei	Lebong	2021
117	BBTN Kerinci Seblat	Pungguk Pedaro	Bingin Kuning	Lebong	2021
118	BBTN Kerinci Seblat	Koto Rawang	IV Jurai	Pesisir Selatan	2021
119	BBTN Kerinci Seblat	Salido Sari Bulan	IV Jurai	Pesisir Selatan	2021
120	BBTN Kerinci Seblat	Painan Timur Painan	IV Jurai	Pesisir Selatan	2021
121	BBTN Kerinci Seblat	Kambang Timur	Lengayang	Pesisir Selatan	2021
122	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Gambir Sako Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pesisir Selatan	2021
123	BBTN Kerinci Seblat	Wali Nagari Luak Kapau	Pauh Duo	Solok Selatan	2021
124	BBTN Kerinci Seblat	Sako Utara Pasia Talang	Sungai Pagu	Solok Selatan	2021
125	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Gadang Timur	Sangir	Solok Selatan	2021
126	BBTN Kerinci Seblat	Batu Gane	Selangit	Musi Rawas	2021
127	BBTN Kerinci Seblat	Ketenong Jaya	Pinang Belapis	Lebong	2021
128	BKSDA Sumatera Barat	Siaur	Kamang Baru	Sijunjung	2020
129	BKSDA Sumatera Barat	Paninggahan	Junjung Siri	Solok	2020
130	BKSDA Sumatera Barat	Batang Barus	Gunung Talang	Solok	2020
131	BKSDA Sumatera Barat	Koto Ranah	IV Nagari Bayang Utara	Pesisir Selatan	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
132	BKSDA Sumatera Barat	Kapujan Koto Barapak	Bayang	Pesisir Selatan	2020
133	BKSDA Sumatera Barat	Labuah Gunung	Lareh Sago Halaban	Lima Puluh Kota	2020
134	BKSDA Sumatera Barat	Koto Rantang	Palupuh	Agam	2020
135	BKSDA Sumatera Barat	Andaleh	Batipuh	Tanah Datar	2020
136	BKSDA Sumatera Barat	Kuranji	Kuranji	Padang	2020
137	BKSDA Sumatera Barat	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	Padang	2020
138	BKSDA Sumatera Barat	Kapujan	Bayang	Pesisir Selatan	2020
139	BKSDA Sumatera Barat	Pancuang Taba	IV Nagari Bayang Utara	Pesisir Selatan	2020
140	BKSDA Sumatera Barat	Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang	Luak	Lima Puluh Kota	2020
141	BKSDA Sumatera Barat	Anduring	2 x 11 Kayu Tanam	Padang pariaman	2020
142	BKSDA Sumatera Barat	Gantung Ciri	Kubung	Solok	2021
143	BKSDA Sumatera Barat	Solok Ambah	Sijunjung	Sijunjung	2021
144	BKSDA Sumatera Barat	Koto Sani	X Koto Singkarak	Solok	2021
145	BKSDA Sumatera Barat	Guguak	2 x 11 Kayu Tanam	Padang pariaman	2021
146	BKSDA Sumatera Barat	Pandai Sikek	X Koto	Tanah Datar	2021
147	BKSDA Sumatera Barat	Singgalang	X Koto	Tanah Datar	2021
148	BTN Siberut	Matotonan	Siberut Selatan	Kepulauan Mentawai	2021
149	BTN Siberut	Saibi Samukop	Siberut Tengah	Kepulauan Mentawai	2021
150	BTN Siberut	Simalegi	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	2021
151	BTN Siberut	Simatalu	Siberut barat	Kepulauan Mentawai	2021
152	BKSDA Jambi	Jangga Baru	Batin XXIV	Batanghari	2021
153	BKSDA Jambi	Betung Bedarah Barat	Tebo Ilir	Tebo	2021
154	BKSDA Jambi	Tiangko	Sungai Manau	Merangin	2021
155	BKSDA Jambi	Sungaidualap	Kuala Betara	Tanjung Jabung Barat	2021
156	BTN Bukit Duabelas	Lubuk Jering	Maro Sebo Ulu	Batanghari	2020
157	BTN Bukit Duabelas	Tanah Garo	Muara Tabir	Tebo	2020
158	BTN Bukit Duabelas	Peninjauan	Maro Sebo Ulu	Batanghari	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
159	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Damai	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin	2020
160	BKSDA Sumatera Selatan	Dawas	Keluang	Musi Banyuasin	2020
161	BKSDA Sumatera Selatan	Pagar Agung	Semende Darat laut	Muara Enim	2020
162	BKSDA Sumatera Selatan	Lawang Agung	Mulak Ulu	Lahat	2020
163	BKSDA Sumatera Selatan	Tanah Abang	Semende Darat Laut	Muara Enim	2020
164	BKSDA Sumatera Selatan	Rindu Hati	Gumay Ulu	Lahat	2020
165	BKSDA Sumatera Selatan	Sebokor	Air Kumbang	Banyuasin	2020
166	BKSDA Sumatera Selatan	Margo Mulyo 20	Muara Padang	Banyuasin	2020
167	BKSDA Sumatera Selatan	Sinar Baru	Buay Pemaca	Ogan Komering Ulu Selatan	2020
168	BKSDA Sumatera Selatan	Sido Rahayu	Buay Pemaca	Ogan Komering Ulu Selatan	2020
169	BKSDA Sumatera Selatan	Gunung Raya	Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ulu Selatan	2020
170	BKSDA Sumatera Selatan	Simpang Sender Utara	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	Ogan Komering Ulu Selatan	2020
171	BKSDA Sumatera Selatan	Air Lingkar	Pagar Gunung	Lahat	2020
172	BKSDA Sumatera Selatan	Geramat	Merapi Selatan	Lahat	2021
173	BKSDA Sumatera Selatan	Gemidar Ilir	Pagar Gunung	Lahat	2021
174	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Karang	Pendopo	Empat Lawang	2020
175	BKSDA Sumatera Selatan	Pagar Jati	Kikim Selatan	Lahat	2020
176	BKSDA Sumatera Selatan	Pandan Arang	Kikim Selatan	Lahat	2020
177	BKSDA Sumatera Selatan	Pelajaran	Jarai	Lahat	2020
178	BKSDA Sumatera Selatan	Tanah Pilih	Gumai Talang	Lahat	2020
179	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Payang	Muara Payang	Lahat	2020
180	BKSDA Sumatera Selatan	Bentayan	Tungkal Ilir	Musi Banyuasin	2021
181	BKSDA Sumatera Selatan	Danau	Pagar Gunung	Lahat	2021
182	BKSDA Sumatera Selatan	Germidar Ulu	Pagar Gunung	Lahat	2021
183	BKSDA Sumatera Selatan	Kupang	Pagar Gunung	Lahat	2021
184	BKSDA Sumatera Selatan	Lubuk Betung	Merapi Selatan	Lahat	2021
185	BKSDA Sumatera Selatan	Padang	Pagar Gunung	Lahat	2021
186	BKSDA Sumatera Selatan	Penantian	Pagar Gunung	Lahat	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
187	BKSDA Sumatera Selatan	Perangai	Merapi Selatan	Lahat	2021
188	BKSDA Sumatera Selatan	Sawah Darat	Pagar Gunung	Lahat	2021
189	BKSDA Sumatera Selatan	Bukit Batu	Pangkalan Lampam	Ogan Komering Ilir	2020
190	BKSDA Sumatera Selatan	Rambai	Pangkalan Lampam	Ogan Komering Ilir	2020
191	BKSDA Sumatera Selatan	Sunggutan	Pangkalan Lampam	Ogan Komering Ilir	2020
192	BTN Berbak dan Sembilang	Simpang Datuk	Nipah Panjang	Tanjung Jabung Timur	2020
193	BTN Berbak dan Sembilang	Sungsang II	Banyuasin II	Banyuasin	2020
194	BTN Berbak dan Sembilang	Sungsang III	Banyuasin II	Banyuasin	2020
195	BTN Berbak dan Sembilang	Air Hitam Laut	S a d u	Tanjung Jabung Timur	2020
196	BTN Berbak dan Sembilang	Rantau Panjang	Kumpeh	Muaro Jambi	2020
197	BTN Berbak dan Sembilang	Telaga Limo	Berbak	Tanjung Jabung Timur	2020
198	BTN Berbak dan Sembilang	Rantau Rasau Desa	Berbak	Tanjung Jabung Timur	2020
199	BTN Berbak dan Sembilang	Sungai Bungur	Kumpeh	Muaro Jambi	2020
200	BTN Berbak dan Sembilang	Sogo	Kumpeh	Muaro Jambi	2020
201	BTN Berbak dan Sembilang	Tanjung	Kumpeh	Muaro Jambi	2020
202	BTN Berbak dan Sembilang	Simpang	Berbak	Tanjung Jabung Timur	2020
203	BTN Berbak dan Sembilang	Karang Sari	Banyuasin II	Banyuasin	2020
204	BKSDA Bengkulu	Suka Baru	Marga Sakti Sebelat	Bengkulu Utara	2020
205	BKSDA Bengkulu	Tes	Lebong Selatan	Lebong	2020
206	BKSDA Bengkulu	Kutai Donok	Lebong Selatan	Lebong	2020
207	BKSDA Bengkulu	Gajah Makmur	Malin Deman	Muko muko	2020
208	BKSDA Bengkulu	Talang Sebaris	Air Periukan	Seluma	2020
209	BKSDA Bengkulu	Tejang Pulau Sebesi	Rajabasa	Lampung Selatan	2020
210	BKSDA Bengkulu	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Tulang Bawang Barat	2020
211	BKSDA Bengkulu	Sriminosari	Labuan Maringgai	Lampung Timur	2020
212	BKSDA Bengkulu	Margasari	Labuan Maringgai	Lampung Timur	2020
213	BKSDA Bengkulu	Batu Ampar	Merigi	Kepahiang	2020
214	BKSDA Bengkulu	Suka Sari	Kebawetan	Kepahiang	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
215	BKSDA Bengkulu	IV Suko Menanti	Sindang Dataran	Rejang Lebong	2021
216	BKSDA Bengkulu	Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu	2021
217	BKSDA Bengkulu	Tanjung Jati	Lemong	Pesisir Barat	2021
218	BKSDA Bengkulu	Tampang Tua	Pematang Sawa	Tanggamus	2021
219	BKSDA Bengkulu	Dusun Pulau	Air Rami	Mukomuko	2021
220	BKSDA Bengkulu	Kahyapu	Enggano	Bengkulu Utara	2021
221	BKSDA Bengkulu	Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu	2021
222	BKSDA Bengkulu	Kota Niur	Semidang Lagan	Bengkulu Tengah	2021
223	BBTN Bukit Barisan Selatan	Guring	Semaka	Tanggamus	2020
224	BBTN Bukit Barisan Selatan	Petay Kayu	Ulu Belu	Tanggamus	2020
225	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sedayu	Semaka	Tanggamus	2020
226	BBTN Bukit Barisan Selatan	Way Asahan	Pematangsawa	Tanggamus	2020
227	BBTN Bukit Barisan Selatan	Paku Negara	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2020
228	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pemerihan	Bangkunat	Pesisir Barat	2020
229	BBTN Bukit Barisan Selatan	Way Haru	Bangkunat	Pesisir Barat	2020
230	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bandar Dalam	Bangkunat	Pesisir Barat	2020
231	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bumi Ratu	Ngaras	Pesisir Barat	2020
232	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tanjung Raya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2020
233	BBTN Bukit Barisan Selatan	Ulok Mukti	Ngambur	Pesisir Barat	2020
234	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sukarame	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2020
235	BBTN Bukit Barisan Selatan	Suka Marga	Suoh	Lampung Barat	2020
236	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat	2020
237	BBTN Bukit Barisan Selatan	Teba Liokh	Batu Brak	Lampung Barat	2020
238	BBTN Bukit Barisan Selatan	SKB II Ujung Rembun	Lumbok Seminung	Lampung Barat	2020
239	BBTN Bukit Barisan Selatan	Penengahan	Karya Penggawa	Pesisir Barat	2020
240	BBTN Bukit Barisan Selatan	Labuhan Mandi	Way Krui	Pesisir Barat	2020
241	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pemancar	Pesisir Utara	Pesisir Barat	2020
242	BBTN Bukit Barisan Selatan	Suka Jaya	Nasal	Kaur	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
243	BBTN Bukit Barisan Selatan	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat	2020
244	BTN Way Kambas	Rantau Jaya Udik II	Sukadana	Lampung Timur	2020
245	BTN Way Kambas	Braja Harjosari	Braja Selehah	Lampung Timur	2020
246	BTN Way Kambas	Tegal Yoso	Purbolinggo	Lampung Timur	2020
247	BTN Way Kambas	Labuhan Ratu IX	Labuhan Ratu	Lampung Timur	2020
248	BTN Way Kambas	Rantau Jaya Makmur	Putra Rumbia	Lampung Tengah	2020
249	BTN Way Kambas	Labuhan Ratu VII	Labuhan Ratu	Lampung Timur	2020
250	BTN Way Kambas	Sukorahayu	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	2020
251	BTN Way Kambas	Margasari	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	2021
252	BTN Way Kambas	Karang Anyar	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	2021
253	BTN Way Kambas	Braja Luhur	Braja Selehah	Lampung Timur	2021
254	BTN Way Kambas	Braja Kencana	Braja Selehah	Lampung Timur	2021
255	BTN Way Kambas	Braja Yekti	Braja Selehah	Lampung Timur	2021
256	BTN Way Kambas	Braja Asri	Way Jepara	Lampung Timur	2021
257	BTN Way Kambas	Labuhan Ratu VI	Labuhan Ratu	Lampung Timur	2021
258	BTN Way Kambas	Rajabasa Lama I	Labuhan Ratu	Lampung Timur	2021
259	BTN Way Kambas	Muara Jaya	Sukadana	Lampung Timur	2021
260	BTN Way Kambas	Tambah Dadi	Purbolinggo	Lampung Timur	2021
261	BTN Way Kambas	Taman Endah	Purbolinggo	Lampung Timur	2021
262	BTN Way Kambas	Taman Fajar	Purbolinggo	Lampung Timur	2021
263	BTN Way Kambas	Tanjung Kesuma	Purbolinggo	Lampung Timur	2021
264	BTN Way Kambas	Tegal Ombo	Way Bungur	Lampung Timur	2021
265	BTN Way Kambas	Toto Projo	Way Bungur	Lampung Timur	2021
266	BTN Way Kambas	Tanjung Tirto	Way Bungur	Lampung Timur	2021
267	BTN Way Kambas	Kali Pasir	Way Bungur	Lampung Timur	2021
268	BTN Ujung Kulon	Rancapinang	Cimanggu	Pandeglang	2020
269	BTN Ujung Kulon	Cibadak	Cimanggu	Pandeglang	2020
270	BTN Ujung Kulon	Padasuka	Cimanggu	Pandeglang	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
271	BTN Ujung Kulon	Cimanggu	Cimanggu	Pandeglang	2020
272	BTN Ujung Kulon	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang	2020
273	BTN Ujung Kulon	Kertajaya	Sumur	Pandeglang	2021
274	BTN Ujung Kulon	Tamanjaya	Sumur	Pandeglang	2021
275	BTN Ujung Kulon	Kertamukti	Sumur	Pandeglang	2021
276	BTN Gunung Halimun Salak	Citerek Kidul	Cibeber	Lebak	2020
277	BTN Gunung Halimun Salak	Malasari	Nanggung	Bogor	2020
278	BTN Gunung Halimun Salak	Tamansari	Tamansari	Bogor	2020
279	BTN Gunung Halimun Salak	Gunungmalang	Cikidang	Sukabumi	2020
280	BTN Gunung Halimun Salak	Purwabakti	Pamijahan	Bogor	2020
281	BTN Gunung Halimun Salak	Purasari	Leuwiliang	Bogor	2020
282	BTN Gunung Halimun Salak	Mekarnangka	Cikidang	Sukabumi	2020
283	BTN Gunung Halimun Salak	Cipeuteuy	Kabandungan	Sukabumi	2020
284	BTN Gunung Halimun Salak	Tapos I	Tenjolaya	Bogor	2020
285	BTN Gunung Halimun Salak	Cikarae Thoyyibah	Cikidang	Sukabumi	2020
286	BTN Gunung Halimun Salak	Cikiray	Cikidang	Sukabumi	2020
287	BTN Gunung Halimun Salak	Gunung Malang	Tenjolaya	Bogor	2020
288	BTN Gunung Halimun Salak	Pangradin	Jasinga	Bogor	2021
289	BTN Gunung Halimun Salak	Cikelat	Cisolok	Sukabumi	2021
290	BTN Gunung Halimun Salak	Kabandungan	Kabandungan	Sukabumi	2021
291	BTN Gunung Halimun Salak	Ridogalih	Cikakak	Sukabumi	2021
292	BTN Gunung Halimun Salak	Sirnarasa	Cikakak	Sukabumi	2021
293	BTN Gunung Halimun Salak	Tenjolaya	Cicurug	Sukabumi	2021
294	BTN Gunung Halimun Salak	Wanasari	Cibeber	Lebak	2021
295	BTN Gunung Halimun Salak	Cisungsang	Cibeber	Lebak	2021
296	BTN Gunung Halimun Salak	Gunungwangun	Cibeber	Lebak	2021
297	BTN Gunung Halimun Salak	Cirompang	Sobang	Lebak	2021
298	BTN Gunung Halimun Salak	Parakansalak	Parakansalak	Sukabumi	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
299	BKSDA DKI Jakarta	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan	Administrasi Kepulauan Seribu	2020
300	BKSDA DKI Jakarta	Kapuk Muara	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara	2020
301	BKSDA DKI Jakarta	Pulau Pari	Kepulauan Seribu Selatan	Administrasi Kepulauan Seribu	2020
302	BKSDA DKI Jakarta	Tanjung Pasir	Teluknaga	Tangerang	2021
303	BTN Kepulauan Seribu	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara	Administrasi Kepulauan Seribu	2020
304	BTN Kepulauan Seribu	Pulau Harapan	Kepulauan Seribu Utara	Administrasi Kepulauan Seribu	2020
305	BTN Kepulauan Seribu	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara	Administrasi Kepulauan Seribu	2020
306	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukatani	Pacet	Cianjur	2020
307	BBTN Gunung Gede Pangrango	Tegallega	Warungkondang	Cianjur	2020
308	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cimacan	Cipanas	Cianjur	2020
309	BBTN Gunung Gede Pangrango	Gekbrong	Gekbrong	Cianjur	2020
310	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cileungsi	Ciawi	Bogor	2020
311	BBTN Gunung Gede Pangrango	Benda	Cicurug	Sukabumi	2020
312	BBTN Gunung Gede Pangrango	Bojong Murni	Ciawi	Bogor	2020
313	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ambarjaya	Ciambar	Sukabumi	2020
314	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cihanyawar	Nagrak	Sukabumi	2020
315	BBTN Gunung Gede Pangrango	Padaluyu	Warungkondang	Cianjur	2021
316	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cipendawa	Pacet	Cianjur	2021
317	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ciloto	Cipanas	Cianjur	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
318	BBTN Gunung Gede Pangrango	Pasir Datar Indah	Caringin	Sukabumi	2021
319	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cisarua	Sukaraja	Sukabumi	2021
320	BBTN Gunung Gede Pangrango	Basir Buncir	Caringin	Bogor	2021
321	BBTN Gunung Gede Pangrango	Watesjaya	Cigombong	Bogor	2021
322	BBTN Gunung Gede Pangrango	Citapen	Ciawi	Bogor	2021
323	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukagalih	Megamendung	Bogor	2021
324	BBKSDA Jawa Barat	Golat	Panumbangan	Ciamis	2020
325	BBKSDA Jawa Barat	Sindangkerta	Cipatujah	Tasikmalaya	2020
326	BBKSDA Jawa Barat	Pasawahan	Tarogong Kaler	Garut	2020
327	BBKSDA Jawa Barat	Sukajaya	Sumedang Selatan	Sumedang	2020
328	BBKSDA Jawa Barat	Margalaksana	Sumedang Selatan	Sumedang	2020
329	BBKSDA Jawa Barat	Mekar rahayu	Sumedang Selatan	Sumedang	2020
330	BBKSDA Jawa Barat	Kaduwulung	Situraja	Sumedang	2020
331	BBKSDA Jawa Barat	Cinanggerang	Pamulihan	Sumedang	2020
332	BBKSDA Jawa Barat	Sukamaju	Cihaurbeuti	Ciamis	2020
333	BBKSDA Jawa Barat	Pangandaran	Pangandaran	Pangandaran	2020
334	BBKSDA Jawa Barat	Sukabakti	Naringgul	Cianjur	2021
335	BBKSDA Jawa Barat	Balegede	Naringgul	Cianjur	2021
336	BBKSDA Jawa Barat	Gunung Batu	Ciracap	Sukabumi	2021
337	BBKSDA Jawa Barat	Barugbug	Padarincang	Serang	2021
338	BBKSDA Jawa Barat	Cikedung	Mancak	Serang	2021
339	BBKSDA Jawa Barat	Sawah Luhur	Kasemen	Kota Serang	2021
340	BBKSDA Jawa Barat	Cikolelet	Cinangka	Serang	2021
341	BBKSDA Jawa Barat	Padamulya	Cihaurbeuti	Ciamis	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
342	BBKSDA Jawa Barat	Sukawening	Cipaku	Ciamis	2021
343	BBKSDA Jawa Barat	Sancang	Sancang	Garut	2021
344	BBKSDA Jawa Barat	Margamekar	Pamulihan	Sumedang	2021
345	BBKSDA Jawa Barat	Jambu	Conggeang	Sumedang	2021
346	BBKSDA Jawa Barat	Cigendel	Pamulihan	Sumedang	2021
347	BBKSDA Jawa Barat	Cikurubuk	Cimalaka	Sumedang	2021
348	BBKSDA Jawa Barat	Cibitung	Buahdua	Sumedang	2021
349	BBKSDA Jawa Barat	Bojongloa	Buahdua	Sumedang	2021
350	BBKSDA Jawa Barat	Cilembu	Pamulihan	Sumedang	2021
351	BBKSDA Jawa Barat	Tegalmanggung	Cimanggung	Sumedang	2021
352	BBKSDA Jawa Barat	Cimarias	Pamulihan	Sumedang	2021
353	BBKSDA Jawa Barat	Sekarwangi	Buahdua	Sumedang	2021
354	BBKSDA Jawa Barat	Patengan	Rancabali	Bandung	2021
355	BTN Gunung Ciremai	Lingarjati	Cilimus	Kuningan	2020
356	BTN Gunung Ciremai	Singkup	Pasawahan	Kuningan	2020
357	BTN Gunung Ciremai	Bandorasa Kulon	Cilimus	Kuningan	2020
358	BTN Gunung Ciremai	Pajambon	Kramatmulya	Kuningan	2020
359	BTN Gunung Ciremai	Sagarahiyang	Darma	Kuningan	2020
360	BTN Gunung Ciremai	Cibuntu	Pasawahan	Kuningan	2020
361	BTN Gunung Ciremai	Gunungsirah	Darma	Kuningan	2020
362	BTN Gunung Ciremai	Randobawa Girang	Mandirancan	Kuningan	2020
363	BTN Gunung Ciremai	Sukamukti	Jalaksana	Kuningan	2020
364	BTN Gunung Ciremai	Payung	Rajagaluh	Majalengka	2020
365	BTN Gunung Ciremai	Gunungwangi	Argapura	Majalengka	2020
366	BTN Gunung Ciremai	Sangiang	Banjaran	Majalengka	2020
367	BTN Gunung Ciremai	Cikaracak	Argapura	Majalengka	2020
368	BTN Gunung Ciremai	Sunia	Banjaran	Majalengka	2020
369	BTN Gunung Ciremai	Argamukti	Argapura	Majalengka	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
370	BKSDA Jawa Tengah	Karangbenda	Adipala	Cilacap	2020
371	BKSDA Jawa Tengah	Pekasiran	Batur	Banjarnegara	2020
372	BKSDA Jawa Tengah	Jetis	Sambirejo	Sragen	2020
373	BKSDA Jawa Tengah	Dowen	Gunem	Rembang	2020
374	BKSDA Jawa Tengah	Blingoh	Donorojo	Jepara	2020
375	BKSDA Jawa Tengah	Kebongede	Bantarbolang	Pemalang	2020
376	BKSDA Jawa Tengah	Bumiharjo	Keling	Jepara	2021
377	BKSDA Jawa Tengah	Pecekelan	Sapuran	Wonosobo	2021
378	BKSDA Jawa Tengah	Sikasur	Belik	Pemalang	2021
379	BKSDA Jawa Tengah	Sepakung	Banyubiru	Semarang	2021
380	BKSDA Jawa Tengah	Watusomo	Slogohimo	Wonogiri	2021
381	BKSDA Jawa Tengah	Tanggal	Randublatung	Blora	2021
382	BKSDA Jawa Tengah	Gading	Sale	Rembang	2021
383	BKSDA Jawa Tengah	Pandansari	Paguyangan	Brebes	2021
384	BKSDA Jawa Tengah	Guci	Bumijawa	Tegal	2021
385	BTN Karimun Jawa	Kemujaan	Karimun Jawa	Jepara	2020
386	BTN Karimun Jawa	Parang	Karimun Jawa	Jepara	2020
387	BTN Karimun Jawa	Karimun Jawa	Karimun Jawa	Jepara	2020
388	BTN Karimun Jawa	Nyamuk	Karimun Jawa	Jepara	2020
389	BTN Gunung Merbabu	Batur	Getasan	Semarang	2020
390	BTN Gunung Merbabu	Kopeng	Getasan	Semarang	2020
391	BTN Gunung Merbabu	Sampetan	Gladagsari	Boyolali	2020
392	BTN Gunung Merbabu	Banyuroto	Sawangan	Magelang	2020
393	BTN Gunung Merbabu	Munengwarangan	Pakis	Magelang	2020
394	BTN Gunung Merbabu	Ngadirojo	Gladagsari	Boyolali	2020
395	BTN Gunung Merbabu	Senden	Selo	Boyolali	2020
396	BTN Gunung Merbabu	Gondangsari	Pakis	Magelang	2020
397	BTN Gunung Merbabu	Kenalan	Pakis	Magelang	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
398	BTN Gunung Merbabu	Ketundan	Pakis	Magelang	2020
399	BTN Gunung Merbabu	Genikan	Ngablak	Magelang	2020
400	BTN Gunung Merbabu	Jeruk	Selo	Boyolali	2021
401	BKSDA Yogyakarta	Karangsari	Pengasih	Kulon Progo	2020
402	BKSDA Yogyakarta	Hargowilis	Kokap	Kulon Progo	2020
403	BKSDA Yogyakarta	Karangasem	Paliyan	Gunungkidul	2020
404	BKSDA Yogyakarta	Karangduwet	Paliyan	Gunungkidul	2020
405	BTN Gunung Merapi	Ngablak	Srumbung	Magelang	2020
406	BTN Gunung Merapi	Balerante	Kemalang	Klaten	2020
407	BTN Gunung Merapi	Ngargomulyo	Dukun	Magelang	2020
408	BTN Gunung Merapi	Kepuharjo	Kapanewon Cangkringan	Sleman	2021
409	BTN Gunung Merapi	Tegalmulyo	Kemalang	Klaten	2021
410	BTN Gunung Merapi	Samiran	Selo	Boyolali	2021
411	BTN Gunung Merapi	Wonodoyo	Cepogo	Boyolali	2021
412	BBKSDA Jawa Timur	Besowo	Kepung	Kediri	2020
413	BBKSDA Jawa Timur	Saobi	Kangayan	Sumenep	2020
414	BBKSDA Jawa Timur	Tambakrejo	Sumbermanjing Wetan	Malang	2020
415	BBKSDA Jawa Timur	Pupus	Ngebel	Ponorogo	2020
416	BBKSDA Jawa Timur	Cowek	Purwodadi	Pasuruhan	2020
417	BBKSDA Jawa Timur	Taman Sari	Licin	Banyuwangi	2020
418	BBKSDA Jawa Timur	Gondowido	Ngebel	Ponorogo	2020
419	BBKSDA Jawa Timur	Suwari	Sangkapura	Gresik	2021
420	BBKSDA Jawa Timur	Pudakit Barat	Sangkapura	Gresik	2021
421	BBKSDA Jawa Timur	Baderan	Sumbermalang	Situbondo	2021
422	BBKSDA Jawa Timur	Wonorejo	Puncu	Kediri	2021
423	BBKSDA Jawa Timur	Talun	Ngebel	Ponorogo	2021
424	BBKSDA Jawa Timur	Manggis	Puncu	Kediri	2021
425	BBKSDA Jawa Timur	Kalianyar	Ijen	Bondowoso	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
426	BBKSDA Jawa Timur	Semut	Purwodadi	Pasuruan	2021
427	BBKSDA Jawa Timur	Kedemungan	Kejayan	Pasuruan	2021
428	BBKSDA Jawa Timur	Kertosari	Purwosari	Pasuruan	2021
429	BBTN Bromo Tengger Semeru	Kayu Kebek	Tutur	Pasuruan	2020
430	BBTN Bromo Tengger Semeru	Taji	Jabung	Malang	2020
431	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ngadas	Poncokusumo	Malang	2020
432	BBTN Bromo Tengger Semeru	Sumber Putih	Wajak	Malang	2020
433	BBTN Bromo Tengger Semeru	Taman Satriyan	Tirtoyudo	Malang	2020
434	BBTN Bromo Tengger Semeru	Pronojiwo	Pronojiwo	Lumajang	2020
435	BBTN Bromo Tengger Semeru	Burno	Senduro	Lumajang	2020
436	BBTN Bromo Tengger Semeru	Pasru Jambe	Pasrujambe	Lumajang	2020
437	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ngadirejo	Jabung	Malang	2020
438	BBTN Bromo Tengger Semeru	Bambang	Wajak	Malang	2021
439	BBTN Bromo Tengger Semeru	Mororejo	Tosari	Pasuruan	2021
440	BBTN Bromo Tengger Semeru	Sumber Mujur	Candipuro	Lumajang	2021
441	BBTN Bromo Tengger Semeru	Blarang	Tutur	Pasuruan	2021
442	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ngadirejo	Tutur	Pasuruan	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
443	BBTN Bromo Tengger Semeru	Wonokitri	Tosari	Pasuruan	2021
444	BBTN Bromo Tengger Semeru	Supiturang	Pronojiwo	Lumajang	2021
445	BBTN Bromo Tengger Semeru	Argosari	Senduro	Lumajang	2021
446	BTN Alas Purwo	Sumberasri	Purwoharjo	Banyuwangi	2020
447	BTN Alas Purwo	Kendalrejo	Tegaldlimo	Banyuwangi	2020
448	BTN Alas Purwo	Kalipait	Tegaldlimo	Banyuwangi	2020
449	BTN Alas Purwo	Kedungasri	Tegaldlimo	Banyuwangi	2020
450	BTN Alas Purwo	Wringinputih	Muncar	Banyuwangi	2020
451	BTN Meru Betiri	Sarongan	Pesanggaran	Banyuwangi	2020
452	BTN Meru Betiri	Andongrejo	Tempurejo	Jember	2020
453	BTN Meru Betiri	Sanenrejo	Tempurejo	Jember	2020
454	BTN Meru Betiri	Wonoasri	Tempurejo	Jember	2020
455	BTN Meru Betiri	Mulyorejo	Silo	Jember	2020
456	BTN Meru Betiri	Kandangan	Pesanggaran	Banyuwangi	2020
457	BTN Meru Betiri	Curahnongko	Tempurejo	Jember	2020
458	BTN Meru Betiri	Curahtakir	Tempurejo	Jember	2020
459	BTN Baluran	Wonorejo	Banyuputih	Situbondo	2020
460	BTN Baluran	Sumberwaru	Banyuputih	Situbondo	2020
461	BKSDA Bali	Candikuning	Baturiti	Tabanan	2020
462	BKSDA Bali	Batunya	Baturiti	Tabanan	2020
463	BKSDA Bali	Kembang Mertha	Baturiti	Tabanan	2020
464	BKSDA Bali	Wanagiri	Sukasada	Buleleng	2020
465	BKSDA Bali	Abang Batu Dinding	Kintamani	Bangli	2020
466	BKSDA Bali	Kedisan	Kintamani	Bangli	2020
467	BKSDA Bali	Buahan	Kintamani	Bangli	2020
468	BKSDA Bali	Suter	Kintamani	Bangli	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
469	BKSDA Bali	Abangsongan	Kintamani	Bangli	2020
470	BKSDA Bali	Batur Selatan	Kintamani	Bangli	2020
471	BKSDA Bali	Songan B	Kintamani	Bangli	2020
472	BKSDA Bali	Batur Tengah	Kintamani	Bangli	2020
473	BTN Bali Barat	Gilimanuk	Melaya	Jembrana	2020
474	BTN Bali Barat	Sumberklampok	Gerokgak	Buleleng	2020
475	BTN Bali Barat	Pejarakan	Gerokgak	Buleleng	2020
476	BTN Bali Barat	Melaya	Melaya	Jembrana	2020
477	BTN Bali Barat	Belimbingsari	Melaya	Jembrana	2020
478	BTN Bali Barat	Ekasari	Melaya	Jembrana	2020
479	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Mekarsari	Praya Barat	Lombok Tengah	2020
480	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Batu Putih	Sekotong	Lombok Barat	2020
481	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Sampir	Taliwang	Sumbawa Barat	2020
482	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Kukin	Moyo Utara	Sumbawa	2020
483	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Lambu	Lambu	Bima	2020
484	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Ndano	Madapangga	Bima	2020
485	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Mertak	Pujut	Lombok Tengah	2020
486	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Suranadi	Narmada	Lombok Barat	2021
487	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Selong Belanak	Praya Barat	Lombok Tengah	2021
488	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Meraran	Setelok	Sumbawa Barat	2021
489	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Mataiyang	Jereweh	Sumbawa Barat	2021
490	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Labuhan Kenanga	Tambora	Bima	2021
491	BTN Gunung Rinjani	Salut	Kayangan	Lombok Utara	2020
492	BTN Gunung Rinjani	Sapit	Suela	Lombok Timur	2020
493	BTN Gunung Rinjani	Bebidas	Wanasaba	Lombok Timur	2020
494	BTN Gunung Rinjani	Sembalun Lawang	Sembalun	Lombok Timur	2020
495	BTN Gunung Rinjani	Sambik Elen	Bayan	Lombok Utara	2021
496	BTN Gunung Rinjani	Gumantar	Anyar	Lombok Utara	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
497	BTN Gunung Rinjani	Bayan	Bayan	Lombok Utara	2021
498	BTN Gunung Rinjani	Aik Bual	Kopang	Lombok Tengah	2021
499	BTN Gunung Rinjani	Pesanggrahan	Montong Gading	Lombok Timur	2021
500	BTN Gunung Rinjani	Perian	Montong Gading	Lombok Timur	2021
501	BTN Gunung Rinjani	Tetebatu	Sikur	Lombok Timur	2021
502	BTN Gunung Rinjani	Timbanuh	Pringgasea	Lombok Timur	2021
503	BTN Gunung Rinjani	Sembalun Bumbung	Sembalun	Lombok Timur	2021
504	BTN Tambora	Tambora	Pekat	Dompu	2020
505	BTN Tambora	Oi Bura	Tambora	Dompu	2020
506	BTN Tambora	Kawinda Toi	Tambora	Bima	2020
507	BTN Tambora	Piong	Sanggar	Bima	2020
508	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Nenas	Fatumnasi	Timor Tengah Selatan	2021
509	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Baumata	Taebenu	Kupang	2020
510	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Lifuleo	Kupang Barat	Kupang	2020
511	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Fatumnasi	Fatumnasi	Timor Tengah Selatan	2021
512	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Daiama	Landu Leko	Rote Ndao	2021
513	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Bena	Amanuban Selatan	Timor Tengah Selatan	2021
514	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Oekiu	Amanuban Selatan	Timor Tengah Selatan	2021
515	BTN Kelimutu	Wiwipemo	Wolojita	Ende	2020
516	BTN Kelimutu	Nduaria	Kelimutu	Ende	2020
517	BTN Kelimutu	Niowula	Detusoko	Ende	2020
518	BTN Kelimutu	Sokoria	Ndonga Timur	Ende	2020
519	BTN Kelimutu	Pemo	Kelimutu	Ende	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
520	BTN Kelimutu	Wologai Tengah	Detusoko	Ende	2020
521	BTN Kelimutu	Saga	Detusoko	Ende	2020
522	BTN Kelimutu	Wolojita	Wolojita	Ende	2020
523	BTN Kelimutu	Detusoko Barat	Detusoko	Ende	2020
524	BTN Kelimutu	Wologai	Detusoko	Ende	2020
525	BTN Kelimutu	Woloara Barat	Kelimutu	Ende	2020
526	BTN Matalawa	Ramuk	Pinu Pahar	Sumba Timur	2020
527	BTN Matalawa	Katikuwai	Matawai Lapau	Sumba Timur	2020
528	BTN Matalawa	Wanggameti	Matawai Lapau	Sumba Timur	2020
529	BTN Matalawa	Padiratana	Umbu Ratu Nggay	Sumba Tengah	2021
530	BTN Matalawa	Okawacu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	2021
531	BTN Matalawa	Umamanu	Lewa Tidahu	Sumba Timur	2021
532	BTN Matalawa	Maradesa Selatan	Umbu Ratu Nggay	Sumba Tengah	2021
533	BTN Matalawa	Mondulambi	Lewa Tidahu	Sumba Timur	2021
534	BTN Matalawa	Tanamodu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	2021
535	BTN Matalawa	Pindu Wangga Wundut	Lewa	Sumba Timur	2021
536	BTN Matalawa	Lailunggi	Pinu Pahar	Sumba Timur	2021
537	BTN Matalawa	Wanggabewa	Pinu Pahar	Sumba Timur	2021
538	BTN Matalawa	Nangga	Karera	Sumba Timur	2021
539	BTN Matalawa	Pre Komba	Tabundung	Sumba Timur	2021
540	BTN Komodo				
541	BTN Bentarum	Mensiau	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2020
542	BTN Bentarum	Menua Sadap	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2020
543	BTN Bentarum	Tanjung Lasa	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2020
544	BTN Bentarum	Tempurau	Selimbau	Kapuas Hulu	2020
545	BTN Bentarum	Lubuk Pengail	Suhaid	Kapuas Hulu	2020
546	BTN Bentarum	Lanjak Deras	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2020
547	BTN Bentarum	Nanga Leboyan	Selimbau	Kapuas Hulu	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
548	BTN Bentarum	Sekulat	Selimbau	Kapuas Hulu	2020
549	BTN Bentarum	Vega	Selimbau	Kapuas Hulu	2020
550	BTN Bentarum	Laut Tawang	Suhaid	Kapuas Hulu	2020
551	BTN Bentarum	Pulau Majang	Badau	Kapuas Hulu	2020
552	BTN Bentarum	Datah Dian	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2021
553	BTN Bentarum	Melemba	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2021
554	BTN Bentarum	Sepandan	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2021
555	BKSDA Kalimantan Barat	Padang	Kepulauan Karimata	Kayong Utara	2020
556	BKSDA Kalimantan Barat	Merpak	Kelam Permai	Sintang	2020
557	BKSDA Kalimantan Barat	Engkangin	Air Besar	Landak	2020
558	BKSDA Kalimantan Barat	Nibung	Paloh	Sambas	2020
559	BKSDA Kalimantan Barat	Sebusus	Paloh	Sambas	2020
560	BKSDA Kalimantan Barat	Pembedilan	Kendawangan	Ketapang	2021
561	BKSDA Kalimantan Barat	Betok Jaya	Kepulauan Karimata	Kayong Utara	2021
562	BKSDA Kalimantan Barat	Malek	Paloh	Sambas	2021
563	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Meroboi	Serawai	Sintang	2020
564	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Mawang Mentatai	Menukung	Melawi	2020
565	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Nusa Poring	Ambalau	Sintang	2020
566	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Rantau Malam	Serawai	Sintang	2020
567	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Kuluk Sapangi	Katingan Hulu	Katingan	2020
568	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Dehes Asem	Katingan Hulu	Katingan	2020
569	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Rangan Kawit	Katingan Hulu	Katingan	2020
570	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Kiham Batang	Katingan Hulu	Katingan	2020
571	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Sabaung	Marikit	Katingan	2020
572	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Tumbang Malawan	Marikit	Katingan	2020
573	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Tumbang Habangoi	Petak Malai	Katingan	2020
574	BTN Gunung Palung	Benawai Agung	Sukadana	Kayong Utara	2020
575	BTN Gunung Palung	Pampang Harapan	Sukadana	Kayong Utara	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
576	BKSDA Kalimantan Selatan	Batakan	Panyipatan'	Tanah Laut	2020
577	BKSDA Kalimantan Selatan	Kuala Lupak	Tabunganen	Barito Kuala	2020
578	BKSDA Kalimantan Selatan	Beringin	Alalak	Barito Kuala	2020
579	BKSDA Kalimantan Selatan	Tabungenen Muara	Tabunganen	Barito Kuala	2020
580	BKSDA Kalimantan Selatan	Marabahan Baru	Alalak	Barito Kuala	2020
581	BKSDA Kalimantan Selatan	Sungai Telan Besar	Tabunganen	Barito Kuala	2020
582	BKSDA Kalimantan Selatan	Pulau Alalak	Alalak	Barito Kuala	2020
583	BKSDA Kalimantan Selatan	Sakadoyan	Pamukan Selatan	Kotabaru	2020
584	BKSDA Kalimantan Selatan	Karang Payau	Kelumpang Hulu	Kotabaru	2020
585	BKSDA Kalimantan Selatan	Betung	Pulau Laut Timur	Kotabaru	2020
586	BKSDA Kalimantan Selatan	Sembilang	Kelumpang Tengah	Kotabaru	2020
587	BKSDA Kalimantan Selatan	Tanjung Seloka	Pulau Laut Selatan	Kotabaru	2020
588	BKSDA Kalimantan Selatan	Tanjung Serudung	Pulau Laut Selatan	Kotabaru	2020
589	BKSDA Kalimantan Selatan	Sabuhur	Jorong	Tanah Laut	2021
590	BKSDA Kalimantan Selatan	Jorong	Jorong	Tanah Laut	2021
591	BKSDA Kalimantan Selatan	Swarangan	Jorong	Tanah Laut	2021
592	BKSDA Kalimantan Selatan	Alur	Jorong	Tanah Laut	2021
593	BKSDA Kalimantan Selatan	Kandangan Lama	Panyipatan	Tanah Laut	2021
594	BKSDA Kalimantan Selatan	Lumpangi	Loksado	Hulu Sungai Selatan	2021
595	BKSDA Kalimantan Selatan	Hulu Banyu	Loksado	Hulu Sungai Selatan	2021
596	BKSDA Kalimantan Selatan	Tanjung Dewa	Panyipatan	Tanah Laut	2021
597	BKSDA Kalimantan Selatan	Langadai	Kelumpang Hilir	Kotabaru	2021
598	BKSDA Kalimantan Selatan	Tarjun	Kelumpang Hilir	Kotabaru	2021
599	BKSDA Kalimantan Selatan	Sajakah	Pulau Laut Timur	Kotabaru	2021
600	BKSDA Kalimantan Selatan	Pulau Burung	Simpang Empat	Tanah Bumbu	2021
601	BKSDA Kalimantan Selatan	Batulicin	Batulicin	Tanah Bumbu	2021
602	BKSDA Kalimantan Tengah	Damparan	Dusun Hilir	Barito Selatan	2020
603	BKSDA Kalimantan Tengah	Sungai Gawing	Mantangai	Kapuas	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
604	BKSDA Kalimantan Tengah	Aruk	Timpah	Kapuas	2020
605	BKSDA Kalimantan Tengah	Lawang Kajang	Timpah	Kapuas	2020
606	BKSDA Kalimantan Tengah	Teluk Timbau	Dusun Hilir	Barito Selatan	2020
607	BKSDA Kalimantan Tengah	Sungai Pasir	Pantai Lunci	Sukamara	2020
608	BKSDA Kalimantan Tengah	Danau Rawah	Mentangai	Kapuas	2021
609	BKSDA Kalimantan Tengah	Tabore	Mentangai	Kapuas	2021
610	BKSDA Kalimantan Tengah	Sungai Jaya	Dusun Hilir	Barito Selatan	2021
611	BKSDA Kalimantan Tengah	Batilap	Dusun Hilir	Barito Selatan	2021
612	BKSDA Kalimantan Tengah	Mahajandau	Dusun Hilir	Barito Selatan	2021
613	BTN Tanjung Puting	Bahaur	Hanau	Seruyan	2021
614	BTN Tanjung Puting	Palingkau	Danau Sembuluh	Seruyan	2021
615	BTN Tanjung Puting	Telaga Pulang	Danau Sembuluh	Seruyan	2021
616	BTN Tanjung Puting	Parang Batang	Hanau	Seruyan	2021
617	BTN Tanjung Puting	Pembuang Hulu I	Hanau	Seruyan	2021
618	BTN Sebangau	Paduran Sebangau	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	2020
619	BTN Sebangau	Sebangau Jaya	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	2020
620	BTN Sebangau	Tumbang Bulan	Baun Bungo	Katingan	2020
621	BTN Sebangau	Perigi	Mendawai	Katingan	2021
622	BTN Sebangau	Mendawai	Mendawai	Katingan	2021
623	BTN Sebangau	Kereng Bangkirai	Sabangau	Kota Palangka Raya	2021
624	BTN Sebangau	Sebangau Permai	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	2021
625	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2020
626	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Siran	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2020
627	BKSDA Kalimantan Timur	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	Kutai Barat	2020
628	BKSDA Kalimantan Timur	Keay	Damai	Kutai Barat	2020
629	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Paser	Tanah Grogot	Paser	2020
630	BKSDA Kalimantan Timur	Janju	Tanah Grogot	Paser	2020
631	BKSDA Kalimantan Timur	Tajur	Long Ikis	Paser	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
632	BKSDA Kalimantan Timur	Riwang	Batu Engau	Paser	2020
633	BKSDA Kalimantan Timur	Senipah	Tanjung Harapan	Paser	2020
634	BKSDA Kalimantan Timur	Laburan	Paser Blengkong	Paser	2020
635	BTN Kayan Mentarang	Pa' Padi	Krayan	Nunukan	2020
636	BTN Kayan Mentarang	Pa' Umung	Krayan Timur	Nunukan	2020
637	BTN Kayan Mentarang	Apau Ping	Bahau Hulu	Malinau	2020
638	BTN Kayan Mentarang	Long Jelet	Pujungan	Malinau	2020
639	BTN Kayan Mentarang	Data Dian	Kayan Hilir	Malinau	2020
640	BTN Kayan Mentarang	Liang Lunuk	Krayan Selatan	Nunukan	2021
641	BTN Kayan Mentarang	Long Puak	Krayan Barat	Nunukan	2021
642	BTN Kayan Mentarang	Lung Fala	Mentarang Hulu	Malinau	2021
643	BTN Kayan Mentarang	Long Tebulo	Bahau Hulu	Malinau	2021
644	BTN Kayan Mentarang	Long Uli	Bahau Hulu	Malinau	2021
645	BTN Kayan Mentarang	Long Kemuat	Bahau Hulu	Malinau	2021
646	BTN Kayan Mentarang	Long Berini	Bahau Hulu	Malinau	2021
647	BTN Kayan Mentarang	Long Alango	Bahau Hulu	Malinau	2021
648	BTN Kutai	Kandolo	Teluk Pandak	Kutai Timur	2020
649	BTN Kutai	Swarga Bara	Sangatta Utara	Kutai Timur	2020
650	BTN Kutai	Menamang Kanan	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2020
651	BTN Kutai	Beno Harapan	Batu Ampar	Kutai Timur	2021
652	BTN Kutai	Bontang Baru	Bontang Utara	Kota Bontang	2021
653	BTN Kutai	Teluk Singkama	Sangatta Selatan	Kutai Timur	2021
654	BTN Kutai	Sangkima	Sangatta Selatan	Kutai Timur	2021
655	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mappu	Bonehau	Mamuju	2020
656	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kunyi	Anreapi	Polman	2020
657	BBKSDA Sulawesi Selatan	Matano	Nuha	Luwu Timur	2020
658	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sindu Agung	Mangkutana	Luwu Timur	2020
659	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bulue	Marioriawa	Soppeng	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
660	BBKSDA Sulawesi Selatan	Maddenra	Kulo	Sidenreng Rappang	2020
661	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tellu Boccoe	Ponre	Bone	2020
662	BBKSDA Sulawesi Selatan	Cakura	Polombangkeng Selatan	Takalar	2020
663	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tondok Bakarua	Mamasa	Mamasa	2020
664	BBKSDA Sulawesi Selatan	Battang Barat	Wara Barat	Kota Palopo	2020
665	BBKSDA Sulawesi Selatan	Teromu	Mangkutana	Luwu Timur	2020
666	BBKSDA Sulawesi Selatan	Koronia	Mangkutana	Luwu Timur	2020
667	BBKSDA Sulawesi Selatan	Taripa	Angkona	Luwu Timur	2020
668	BBKSDA Sulawesi Selatan	Non Blok	Kalaena	Luwu Timur	2020
669	BBKSDA Sulawesi Selatan	Cani Sirenreng	Ulaweng	Bone	2020
670	BBKSDA Sulawesi Selatan	Lumika	Bonehau	Mamuju	2020
671	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pattang	Tinggimoncong	Gowa	2021
672	BBKSDA Sulawesi Selatan	Manimbahoi	Parigi	Gowa	2021
673	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kale Ko'mara	Polombangkeng Utara	Takalar	2021
674	BBKSDA Sulawesi Selatan	Siame	Palakka	Bone	2021
675	BBKSDA Sulawesi Selatan	Beroanging	Bangkala Barat	Jeneponto	2021
676	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tadang Palie	Ulaweng	Bone	2021
677	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bissoloro	Bungaya	Gowa	2021
678	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kulo	Kulo	Sidenreng Rappang	2021
679	BBKSDA Sulawesi Selatan	Timampu	Towuti	Luwu Timur	2021
680	BBKSDA Sulawesi Selatan	Nikkel	Nuha	Luwu Timur	2021
681	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kasintuwu	Mangkutana	Luwu Timur	2021
682	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sorowako	Nuha	Luwu Timur	2021
683	BBKSDA Sulawesi Selatan	Battang	Wara Barat	Kota Palopo	2021
684	BBKSDA Sulawesi Selatan	Salutiwo	Bonehau	Mamuju	2021
685	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kinatang	Bonehau	Mamuju	2021
686	BBKSDA Sulawesi Selatan	Aralle Timur	Buntu Malangka	Mamasa	2021
687	BBKSDA Sulawesi Selatan	Ulumambi	Bambang	Mamasa	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
688	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sikamase	Bambang	Mamasa	2021
689	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tole	Towuti	Luwu Timur	2021
690	BBKSDA Sulawesi Selatan	Magani	Nuha	Luwu Timur	2021
691	BBKSDA Sulawesi Selatan	Osango	Mamasa	Mamasa	2021
692	BBKSDA Sulawesi Selatan	RambuSaratu	Mamasa	Mamasa	2021
693	BBKSDA Sulawesi Selatan	Lambanan	Mamasa	Mamasa	2021
694	BBKSDA Sulawesi Selatan	Taupe	Mamasa	Mamasa	2021
695	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bubun Batu	Mamasa	Mamasa	2021
696	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mambuliling	Mamasa	Mamasa	2021
697	BTN Bantimurung Bulusaraung	Panaikang	Minasa Tene	Pangkajene Kepulauan	2020
698	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto Masunggu	Tellulimpoe	Bone	2020
699	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bentenge	Mallawa	Maros	2020
700	BTN Bantimurung Bulusaraung	Labuaja	Cenrana	Maros	2020
701	BTN Bantimurung Bulusaraung	Rompegading	Cenrana	Maros	2020
702	BTN Bantimurung Bulusaraung	Patanyamang	Camba	Maros	2020
703	BTN Bantimurung Bulusaraung	Barugae	Mallawa	Maros	2020
704	BTN Bantimurung Bulusaraung	Samangki	Simbang	Maros	2020
705	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mattampawalie	Lappariaja	Bone	2020
706	BTN Bantimurung Bulusaraung	Wanuawaru	Mallawa	Maros	2020
707	BTN Bantimurung Bulusaraung	Samaenre	Mallawa	Maros	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
708	BTN Bantimurung Bulusaraung	Padaelo	Mallawa	Maros	2021
709	BTN Bantimurung Bulusaraung	Uludaya	Mallawa	Maros	2021
710	BTN Bantimurung Bulusaraung	Gattareng Matinggi	Mallawa	Maros	2021
711	BTN Bantimurung Bulusaraung	Batu Putih	Mallawa	Maros	2021
712	BTN Bantimurung Bulusaraung	Tellumpanuae	Mallawa	Maros	2021
713	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bantimurung	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	2021
714	BTN Bantimurung Bulusaraung	Tompobulu	Balocci	Pangkajene Kepulauan	2021
715	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kabba	Minasa Tene	Pangkajene Kepulauan	2021
716	BTN Bantimurung Bulusaraung	Biraeng	Minasa Tene	Pangkajene Kepulauan	2021
717	BTN Takabonerate	Tarupa	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
718	BTN Takabonerate	Latondu	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
719	BTN Takabonerate	Rajuni	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
720	BTN Takabonerate	Jinato	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
721	BTN Takabonerate	Tambuna	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
722	BTN Takabonerate	Khusus Pasitallu	Taka bonerate	Kepulauan Selayar	2020
723	BKSDA Sulawesi Tengah	Balumpewa	Dolo Barat	Sigi	2020
724	BKSDA Sulawesi Tengah	Binangga	Parigi Tengah	Parigi Moutong	2020
725	BKSDA Sulawesi Tengah	Gio	Tolitoli Utara	Tolitoli	2020
726	BKSDA Sulawesi Tengah	Kalukutinggu	Dolo Barat	Sigi	2020
727	BKSDA Sulawesi Tengah	Lembah Tompotika	Bualemo	Banggai	2020
728	BKSDA Sulawesi Tengah	Mayoa	Pamona Selatan	Poso	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
729	BKSDA Sulawesi Tengah	Salodik	Luwuk Utara	Banggai	2020
730	BKSDA Sulawesi Tengah	Uwewajo	Bungku Utara	Morowali Utara	2020
731	BKSDA Sulawesi Tengah	Baturube	Bungku Utara	Morowali Utara	2020
732	BKSDA Sulawesi Tengah	Binontoan	Toli-toli Utara	Toli-toli	2020
733	BKSDA Sulawesi Tengah	Boe	Pamona Selatan	Poso	2020
734	BKSDA Sulawesi Tengah	Bolano Barat	Bolano	Parigi Moutong	2020
735	BKSDA Sulawesi Tengah	Kayu Agung	Mepanga	Parigi Moutong	2020
736	BKSDA Sulawesi Tengah	Labuan	Ratolindo	Tojo Una Una	2020
737	BKSDA Sulawesi Tengah	Ogobayas	Mepanga	Parigi Moutong	2020
738	BKSDA Sulawesi Tengah	Ogomoli	Galang	Toli-toli	2020
739	BKSDA Sulawesi Tengah	Pomolulu	Balaesang Tanjung	Donggala	2020
740	BKSDA Sulawesi Tengah	Tambayoli	Soyo Jaya	Morowali Utara	2020
741	BKSDA Sulawesi Tengah	Tokala Atas	Bungku Utara	Morowali Utara	2020
742	BKSDA Sulawesi Tengah	Tombang	Pagimana	Banggai	2020
743	BKSDA Sulawesi Tengah	Toboli Barat	Parigi Utara	Parigi Moutong	2021
744	BKSDA Sulawesi Tengah	Toiba	Bualemo	Banggai	2021
745	BKSDA Sulawesi Tengah	Sumara Jaya	Soyo Jaya	Morowali Utara	2021
746	BKSDA Sulawesi Tengah	Petapa	Parigi Tengah	Parigi Moutong	2021
747	BKSDA Sulawesi Tengah	Matolele	Parigi Tengah	Parigi Moutong	2021
748	BKSDA Sulawesi Tengah	Moubang	Mepanga	Parigi Moutong	2021
749	BKSDA Sulawesi Tengah	Tinombala	Ongka Malino	Parigi Moutong	2021
750	BKSDA Sulawesi Tengah	Tandoyondo	Soyo Jaya	Morowali Utara	2021
751	BKSDA Sulawesi Tengah	Bou	Sojol	Donggala	2021
752	BKSDA Sulawesi Tengah	Siboang	Sojol	Donggala	2021
753	BKSDA Sulawesi Tengah	Pandajaya	Pamona Selatan	Poso	2021
754	BKSDA Sulawesi Tengah	Pusungi	Ampana Tete	Tojo Una Una	2021
755	BKSDA Sulawesi Tengah	Tete B	Ampana Tete	Tojo Una Una	2021
756	BBTN Lorelindu	Tuare	Lore Barat	Poso	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
757	BBTN Lorelindu	Kageroa	Lore Barat	Poso	2020
758	BBTN Lorelindu	Kolori	Lore Barat	Poso	2020
759	BBTN Lorelindu	Lelio	Lore Barat	Poso	2020
760	BBTN Lorelindu	Lengkeka	Lore Barat	Poso	2020
761	BBTN Lorelindu	Doda	Lore Tengah	Poso	2020
762	BBTN Lorelindu	Lempe	Kulawi	Sigi	2020
763	BBTN Lorelindu	Bariri	Lore Tengah	Poso	2020
764	BBTN Lorelindu	Toro	Kulawi	Sigi	2020
765	BBTN Lorelindu	Baleura	Lore Tengah	Poso	2020
766	BBTN Lorelindu	Betue	Lore Peore	Poso	2020
767	BBTN Lorelindu	Lawua	Kulawi Selatan	Sigi	2020
768	BBTN Lorelindu	Rompo	Lore Tengah	Poso	2020
769	BBTN Lorelindu	Talabosa	Lore Tengah	Poso	2020
770	BBTN Lorelindu	Torire	Lore Tengah	Poso	2020
771	BBTN Lorelindu	Hanggira	Lore Tengah	Poso	2020
772	BBTN Lorelindu	Puroo	Lindu	Sigi	2020
773	BBTN Lorelindu	Langko	Lindu	Sigi	2020
774	BBTN Lorelindu	Tomado	Lindu	Sigi	2020
775	BBTN Lorelindu	Anca	Lindu	Sigi	2020
776	BBTN Lorelindu	Olu	Lindu	Sigi	2020
777	BBTN Lorelindu	Tongoa	Palolo	Sigi	2020
778	BBTN Lorelindu	Karunia	Palolo	Sigi	2020
779	BBTN Lorelindu	Sedoa	Lore Utara	Poso	2020
780	BBTN Lorelindu	Watumaeta	Lore Utara	Poso	2020
781	BBTN Lorelindu	Wuasa	Lore Utara	Poso	2020
782	BBTN Lorelindu	Kaduwa	Lore Utara	Poso	2020
783	BBTN Lorelindu	Dodolo	Lore Utara	Poso	2020
784	BBTN Lorelindu	Sintuwu	Palolo	Sigi	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
785	BBTN Lorelindu	Bulili	Nokilalaki	Sigi	2020
786	BBTN Lorelindu	Kadidia	Nokilalaki	Sigi	2020
787	BTN Kep. Togean	Binanguna	Una-una	Tojo Una-una	2020
788	BTN Kep. Togean	Lembanato	Togean	Tojo Una-una	2020
789	BTN Kep. Togean	Luok	Walea	Tojo Una-una	2020
790	BTN Kep. Togean	Loe	Walea Kepulauan	Tojo Una-una	2021
791	BKSDA Sulawesi Utara	Pinangunian	Aertembaga	Kota Bitung	2020
792	BKSDA Sulawesi Utara	Danowudu	Ranowulu	Kota Bitung	2020
793	BKSDA Sulawesi Utara	Teling	Tombariri	Minahasa	2020
794	BKSDA Sulawesi Utara	Kasawari	Aertembaga	Kota Bitung	2020
795	BKSDA Sulawesi Utara	Paslaten	Tombariri	Minahasa Selatan	2020
796	BKSDA Sulawesi Utara	Duasudara	Ranowulu	Kota Bitung	2020
797	BKSDA Sulawesi Utara	Winenet Satu	Aertembaga	Kota Bitung	2020
798	BKSDA Sulawesi Utara	Batu Putih Atas	Ranowulu	Kota Bitung	2020
799	BKSDA Sulawesi Utara	Batu Putih Bawah	Ranowulu	Kota Bitung	2020
800	BKSDA Sulawesi Utara	Wailan	Tomohon Utara	Tomohon	2021
801	BKSDA Sulawesi Utara	Singsingon Barat	Passi Timur	Kotamobagu	2021
802	BKSDA Sulawesi Utara	Didingga	Biau	Gorontalo Utara	2021
803	BKSDA Sulawesi Utara	Wawona	Tatapaan	Minahasa Selatan	2021
804	BKSDA Sulawesi Utara	Kakaskasen Dua	Tomohon Utara	Tomohon	2021
805	BKSDA Sulawesi Utara	Kayaw	Tomohon Utara	Tomohon	2021
806	BKSDA Sulawesi Utara	Dunu	Monano	Gorontalo Utara	2021
807	BKSDA Sulawesi Utara	Patuhu	Randangan	Pahuwato	2021
808	BTN Boganinani Wartabone	Pinobatuan	Dumoga Timur	Bolaang Mongondow	2020
809	BTN Boganinani Wartabone	Tunggulo	Tilongkabila	Bone Bolango	2020
810	BTN Boganinani Wartabone	Doloduo 2	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	2020
811	BTN Boganinani Wartabone	Poduwoma	Suwawa Timur	Bone Bolango	2020
812	BTN Boganinani Wartabone	Bangio	Pinogu	Bone Bolango	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
813	BTN Boganinani Wartabone	Ilomata	Bulango Ulu	Bone Bolango	2020
814	BTN Boganinani Wartabone	Mengkang	Lolayan	Bolaang Mongondow	2020
815	BTN Boganinani Wartabone	Tulabolo	Suwawa Timur	Bone Bolango	2020
816	BTN Boganinani Wartabone	Werdhi Agung Selatan	Dumoga Tengah	Bolaang Mongondow	2020
817	BTN Boganinani Wartabone	Kinomaligan	Dumoga Tengah	Bolaang Mongondow	2020
818	BTN Boganinani Wartabone	Molibagu	Bolaang Uki	Bolaang Mongondow Selatan	2020
819	BTN Boganinani Wartabone	Tapadaka Utara	Dumoga Utara	Bolaang Mongondow Selatan	2020
820	BTN Boganinani Wartabone	Bolangat	Sangtombolang	Bolaang Mongondow	2021
821	BTN Boganinani Wartabone	Batu Merah	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	2021
822	BTN Boganinani Wartabone	Ibolian	Dumoga Tengah	Bolaang Mongondow	2021
823	BTN Boganinani Wartabone	Matayangan	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	2021
824	BTN Boganinani Wartabone	Sogitia	Bone	Bone Bolango	2021
825	BTN Boganinani Wartabone	Mongiilo Utara	Bulango Ulu	Bone Bolango	2021
826	BTN Boganinani Wartabone	Lonuo	Tilongkabila	Bone Bolango	2021
827	BTN Boganinani Wartabone	Lombongo	Suwawa Tengah	Bone Bolango	2021
828	BTN Boganinani Wartabone	Tilonggibila	Pinogu	Bone Bolango	2021
829	BTN Boganinani Wartabone	Tapa Aog	Lolayan	Bolaang Mongondow	2021
830	BTN Boganinani Wartabone	Pinobatuan Barat	Dumoga Timur	Bolaang Mongondow	2021
831	BTN Boganinani Wartabone	Tangagah	Bolaang Uki	Bolaang Mongondow Selatan	2021
832	BTN Boganinani Wartabone	Mopuya Utara	Dumoga Utara	Bolaang Mongondow	2021
833	BTN Boganinani Wartabone	Siniyung	Dumoga	Bolaang Mongondow	2021
834	BTN Boganinani Wartabone	Bumbung	Lolak	Bolaang Mongondow	2021
835	BTN Boganinani Wartabone	Totabuan	Lolak	Bolaang Mongondow	2021
836	BTN Bunaken	Nain	Wori	Minahasa Utara	2020
837	BTN Bunaken	Sondaken	Tatapaan	Minahasa Selatan	2020
838	BTN Bunaken	Mantehage	Wori	Minahasa Utara	2020
839	BTN Bunaken	Bango	Wori	Minahasa Utara	2021
840	BTN Bunaken	Buhias	Wori	Minahasa Utara	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
841	BTN Bunaken	Nain Satu	Wori	Minahasa Utara	2021
842	BTN Bunaken	Tiwoho	Wori	Minahasa Utara	2021
843	BTN Bunaken	Tinongko	Wori	Minahasa Utara	2021
844	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lanosangia	Kalisusu Utara	Buton Utara	2020
845	BKSDA Sulawesi Tenggara	Ulunese	Kalono Timur	Konawe Selatan	2020
846	BKSDA Sulawesi Tenggara	Labengki	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	2020
847	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sumber Sari	Moramo	Konawe Selatan	2020
848	BKSDA Sulawesi Tenggara	Wowonga Jaya	Kalisusu Utara	Buton Utara	2020
849	BKSDA Sulawesi Tenggara	Ulunggolaka	Latambaga	Kolaka	2020
850	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kakenauwe	Lasalimu	Buton	2020
851	BKSDA Sulawesi Tenggara	Wagari	Lasalimu	Buton	2020
852	BKSDA Sulawesi Tenggara	Dawi-Dawi	Pomalaa	Kolaka	2020
853	BKSDA Sulawesi Tenggara	Bangun Jaya	Lainea	Konawe Selatan	2020
854	BKSDA Sulawesi Tenggara	Amolengo	Kolono Timur	Konawe Selatan	2020
855	BKSDA Sulawesi Tenggara	Petetea	Kalisusu Utara	Buton Utara	2020
856	BKSDA Sulawesi Tenggara	Laeya	Wokorumba Utara	Buton Utara	2020
857	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lamedai	Tanggetada	Kolaka	2020
858	BKSDA Sulawesi Tenggara	Towua	Wundulako	Kolaka	2020
859	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sakuli	Latambaga	Kolaka	2020
860	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kolakaasi	Latambaga	Kolaka	2020
861	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kalo-kalo	Lainea	Konawe Selatan	2020
862	BKSDA Sulawesi Tenggara	Ampera	Kolono Timur	Konawe Selatan	2020
863	BKSDA Sulawesi Tenggara	Ronta	Bonegunu	Buton Utara	2020
864	BKSDA Sulawesi Tenggara	Labutaone	Laonti	Konawe Selatan	2021
865	BKSDA Sulawesi Tenggara	Batu Putih	Kolono Timur	Konawe Selatan	2021
866	BKSDA Sulawesi Tenggara	Boedingi	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	2021
867	BKSDA Sulawesi Tenggara	Waturambaha	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	2021
868	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sani-sani	Samaturu	Kolaka	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
869	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kadolo Katapi	Wolio	Kota Bau Bau	2021
870	BKSDA Sulawesi Tenggara	Torombia	Kulisusu Utara	Buton Utara	2021
871	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tumbu-tumbu Jaya	Kolono Timur	Konawe Selatan	2021
872	BKSDA Sulawesi Tenggara	Basule	Lasolo	Konawe Utara	2021
873	BKSDA Sulawesi Tenggara	Boenaga	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	2021
874	BKSDA Sulawesi Tenggara	Winning	Pasarwajo	Buton	2021
875	BKSDA Sulawesi Tenggara	Mantowu	Pasarwajo	Buton	2021
876	BKSDA Sulawesi Tenggara	Wakangka	Kapontori	Buton	2021
877	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kaisabu Baru	Sorawolio	Baubau	2021
878	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kaumbu	Kaumbu	Wolowa	2021
879	BTN Rawa Aopa Watumohai	Makaleleo	Puriala	Konawe	2020
880	BTN Rawa Aopa Watumohai	Trimulya	Onembute	Konawe	2020
881	BTN Rawa Aopa Watumohai	Akuni	Tinanggea	Konawe Selatan	2020
882	BTN Rawa Aopa Watumohai	Tatangge	Tinanggea	Konawe Selatan	2020
883	BTN Rawa Aopa Watumohai	Peatoa	Loea	Kolaka Timur	2020
884	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lantari	Lantari Jaya	Bombana	2021
885	BTN Rawa Aopa Watumohai	Puuhopa	Puriala	Konawe	2021
886	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lara	Tumbudadio	Kolaka Timur	2021
887	BTN Rawa Aopa Watumohai	Mokupa	Lambandia	Kolaka Timur	2021
888	BTN Wakatobi	Sombu	Wangi-wangi	Wakatobi	2020
889	BTN Wakatobi	Tampara	Kaledupa Selatan	Wakatobi	2020
890	BTN Wakatobi	Kasuari	Kaledupa Selatan	Wakatobi	2020
891	BTN Wakatobi	Ambeua Raya	Kaledupa	Wakatobi	2020
892	BTN Wakatobi	Liya Mawi	Wangi-wangi	Wakatobi	2020
893	BTN Wakatobi	Sombano	Kaledupa	Wakatobi	2020
894	BTN Wakatobi	Darawa	Kaledupa Selatan	Wakatobi	2020
895	BTN Wakatobi	Jaya Makmur	Binongko	Wakatobi	2020
896	BTN Wakatobi	Palahidu Barat	Binongko	Wakatobi	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
897	BTN Wakatobi	Mantigola	Kaledupa	Wakatobi	2020
898	BTN Wakatobi	Horuo	Kaledupa	Wakatobi	2020
899	BTN Wakatobi	Peropa	Kaledupa Selatan	Wakatobi	2020
900	BTN Wakatobi	Samabahari	Kaledupa	Wakatobi	2021
901	BKSDA Maluku	Waii	Salahutu	Maluku Tengah	2020
902	BKSDA Maluku	Kaibobo	Seram Barat	Seram Bagian Barat	2020
903	BKSDA Maluku	Ariate	Huamual	Seram Bagian Barat	2020
904	BKSDA Maluku	Waesala	Huamual	Seram Bagian Barat	2020
905	BKSDA Maluku	Luhu	Huamual	Seram Bagian Barat	2020
906	BKSDA Maluku	Nusantara	Banda	Maluku Tengah	2020
907	BKSDA Maluku	Dawang	Teluk Waru	Seram Bagian Timur	2020
908	BKSDA Maluku	Eti	Seram Barat	Seram Bagian Barat	2020
909	BKSDA Maluku	Waisum	Mangoli Utara Timur	Kepulauan Sela	2021
910	BKSDA Maluku	Buton	Obi	Halmahera Selatan	2021
911	BKSDA Maluku	Sawadai	Bacan Selatan	Halmahera Selatan	2021
912	BKSDA Maluku	Batu Jungku	Batabual	Buru	2021
913	BKSDA Maluku	Seith	Teluk Kaiely	Buru	2021
914	BKSDA Maluku	Pela	Batabual	Buru	2021
915	BKSDA Maluku	Piru	Seram Barat	Seram Bagian Barat	2021
916	BKSDA Maluku	Salas	Bula	Seram Bagian Timur	2021
917	BKSDA Maluku	Iha	Huamual	Seram Bagian Barat	2021
918	BKSDA Maluku	Irloy	Aru Tengah	Kepulauan Aru	2021
919	BKSDA Maluku	Reyamru	Kei Besar	Maluku Tenggara	2021
920	BKSDA Maluku	Adodo Molu	Molu Maru	Kepulauan Tinambar	2021
921	BKSDA Maluku	Wadankou	Molu Maru	Kepulauan Tinambar	2021
922	BTN Aketajawe Lolobata	Dorolamo	Maba Tengah	Halmahera Timur	2020
923	BTN Aketajawe Lolobata	Miaf	Maba Tengah	Halmahera Timur	2020
924	BTN Aketajawe Lolobata	Sawai	Weda	Halmahera Tengah	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
925	BTN Aketajawe Lolobata	Koli	Oba	Tidore Kepulauan	2021
926	BTN Aketajawe Lolobata	Wasileo	Maba Utara	Halmahera Timur	2021
927	BTN Aketajawe Lolobata	Woda	Oba	Tidore Kepulauan	2021
928	BTN Aketajawe Lolobata	Geltoli	Maba	Halmahera Timur	2021
929	BTN Aketajawe Lolobata	Lolobata	Wasile Tengah	Halmahera Timur	2021
930	BTN Aketajawe Lolobata	Kobe	Weda Tengah	Halmahera Tengah	2021
931	BTN Aketajawe Lolobata	Sidanga	Weda	Halmahera Tengah	2021
932	BTN Manusela	Siatele	Seram Utara	Maluku Tengah	2020
933	BTN Manusela	Masihulan	Seram Utara	Maluku Tengah	2020
934	BTN Manusela	Saleman	Seram Utara	Maluku Tengah	2020
935	BTN Manusela	Piliana	Tehoru	Maluku Tengah	2020
936	BTN Manusela	Mosso	Tehoru	Maluku Tengah	2020
937	BBKSDA Papua Barat	Saporkren	Waigeo Selatan	Raja Ampat	2020
938	BBKSDA Papua Barat	Warimak	Tiplol Mayalibit	Raja Ampat	2020
939	BBKSDA Papua Barat	Klasaman	Klaurung	Kota Sorong	2020
940	BBKSDA Papua Barat	Klawana	Klamono	Sorong	2020
941	BBKSDA Papua Barat	Ayambori	Manokwari Timur	Manokwari	2020
942	BBKSDA Papua Barat	Waifoi	Tiplol Mayalibit	Raja Ampat	2020
943	BBKSDA Papua Barat	Susweni	Manokwari Timur	Manokwari	2020
944	BBKSDA Papua Barat	Insirifuri	Manokwari Barat	Manokwari	2020
945	BBKSDA Papua Barat	Saonek	Waigeo Selatan	Raja Ampat	2020
946	BBKSDA Papua Barat	Klablim	Klaurung	Kota Sorong	2021
947	BBKSDA Papua Barat	Margorukun	Oransbari	Manokwari Selatan	2021
948	BBKSDA Papua Barat	Kalitoko	Teluk Mayalibit	Raja Ampat	2021
949	BBTN Teluk Cenderawasih	Yaur	Yaur	Nabire	2020
950	BBTN Teluk Cenderawasih	Yende	Roon	Teluk Wondama	2020
951	BBTN Teluk Cenderawasih	Aisandami	Teluk Duairi	Teluk Wondama	2020
952	BBTN Teluk Cenderawasih	Mena	Roon	Teluk Wondama	2020

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
953	BBTN Teluk Cenderawasih	Yopanggar	Teluk Duairi	Teluk Wondama	2021
954	BBTN Teluk Cenderawasih	Yopmeos	Windesi	Teluk Wondama	2021
955	BBKSDA Papua	Sereh	Sentani Timur	Jayapura	2020
956	BBKSDA Papua	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura	2020
957	BBKSDA Papua	Tablasupa	Depapre	Jayapura	2020
958	BBKSDA Papua	Sabron Sari	Sentani Barat	Jayapura	2020
959	BBKSDA Papua	Necheibe	Ravenirara	Jayapura	2020
960	BBKSDA Papua	Enggros	Abepura	Kota Jayapura	2021
961	BBKSDA Papua	Air Mandidi	Teluk Kimi	Nabire	2021
962	BBKSDA Papua	Dosay	Sentani Barat	Jayapura	2021
963	BBKSDA Papua	Doyo Baru	Waibu	Jayapura	2021
964	BBKSDA Papua	Yewena	Depapre	Jayapura	2021
965	BBKSDA Papua	Odori	Supiori Selatan	Supiori	2021
966	BBKSDA Papua	Waryei	Supiori Barat	Supiori	2021
967	BBKSDA Papua	Kweel	Elikobal	Merauke	2021
968	BBKSDA Papua	Tanas	Elikobal	Merauke	2021
969	BBKSDA Papua	Angkasa	Jayapura Utara	Kota Jayapura	2021
970	BBKSDA Papua	Waena	Heram	Kota Jayapura	2021
971	BTN Lorentz	Putagaima	Asotipo	Jayawijaya	2021
972	BTN Lorentz	Heberima	Asotipo	Jayawijaya	2021
973	BTN Lorentz	Hitigima	Asotipo	Jayawijaya	2021
974	BTN Lorentz	Holima Atas	Walaik	Jayawijaya	2021
975	BTN Lorentz	Yelai	Walaik	Jayawijaya	2021
976	BTN Lorentz	Walekama	Walaik	Jayawijaya	2021
977	BTN Lorentz	Elarek	Walaik	Jayawijaya	2021
978	BTN Lorentz	Fanamo	Mimika Timur Jauh	Mimika	2021
979	BTN Lorentz	Omawita	Mimika Timur Jauh	Mimika	2021
980	BTN Lorentz	Nakai	Pulau Tiga	Asmat	2021

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
981	BTN Wasur	Poo	Jagebob	Merauke	2020
982	BTN Wasur	Kuler	Naukenjerai	Merauke	2020
983	BTN Wasur	Onggaya	Naukenjerai	Merauke	2020
984	BTN Wasur	Tomer	Naukenjerai	Merauke	2020
985	BTN Wasur	Wasur	Merauke	Merauke	2020
986	BTN Wasur	Yanggandur	Sota	Merauke	2020
987	BTN Wasur	Rawa Biru	Sota	Merauke	2020
988	BTN Wasur	Erambu	Sota	Merauke	2021
989	BTN Wasur	Tomerau	Naukenjerai	Merauke	2021
990	BTN Wasur	Sota	Sota	Merauke	2021
	TOTAL				989

Lampiran 3. Data Capaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2021

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
A	BALAI / BALAI BESAR TN				
1	BBTN Gunung Leuser	1	Gunung Leuser	TN	74
2	BBTN Bukit Barisan Selatan	2	Bukit Barisan Selatan	TN	83
3	BBTN Gunung Gede Pangrango	3	Gunung Gede Pangrango	TN	84
4	BBTN Bromo Tengger Semeru	4	Bromo Tengger Semeru	TN	78
5	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	5	Betung Kerihun	TN	77
6	BBTN Lore Lindu	6	Lore Lindu	TN	80
7	BTN Batang Gadis	7	Batang Gadis	TN	70
8	BTN Siberut	8	Siberut	TN	76
9	BTN Bukit Dua Belas	9	Bukit Dua Belas	TN	84
10	BTN Berbak dan Sembilang	10	Berbak	TN	75
11	BTN Way Kambas	11	Way Kambas	TN	68
12	BTN Gunung Ciremai	12	Gunung Ciremai	TN	82
13	BTN Gunung Merapi	13	Gunung Merapi	TN	82
14	BTN Meru Betiri	14	Meru Betiri	TN	84
15	BTN Baluran	15	Baluran	TN	74
16	BTN Bali Barat	16	Bali Barat	TN	81
17	BTN Gunung Rinjani	17	Gunung Rinjani	TN	71
18	BTN Komodo	18	Komodo	TN	80
19	BTN Kelimutu	19	Kelimutu	TN	75
20	BTN Gunung Palung	20	Gunung Palung	TN	76
21	BTN Kutai	21	Kutai	TN	76
22	BTN Tanjung Puting	22	Tanjung Puting	TN	75
23	BTN Bantimurung-Bulusaraung	23	Bantimurung-Bulusaraung	TN	88
24	BTN Aketajawe Lolobata	24	Aketajawe Lolobata	TN	80
25	BTN Matalawa	25	Laiwangi Wanggameti	TN	85
26	BTN Rawa Aopa Watumohai	26	Rawa Aopa Watumohai	TN	76
27	BTN Wasur	27	Wasur	TN	76
B	BALAI / BALAI BESAR KSDA				
1	BBKSDA Riau				
		1	Bukit Bungkok	CA	70
		2	Pulau Berkey	CA	70
		3	Tasik Tanjung Padang	SM	76
		4	Tasik Belat	SM	66
		5	Tasik Serkap	SM	52
		6	Tasik Besar Serkap	SM	52
		7	Bukit Batu	SM	72
		8	Kerumutan	SM	74
		9	Bukit Rimbang Bukit Baling	SM	79

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
		10	Giam Siak Kecil	SM	72
		11	Sungai Dumai	TWA	72
2	BBKSDA Sumatera Utara				
		1	Dolok Sipirok	CA	74
		2	Dolok Sibualbuali	CA	76
		3	Mrrtelu Purba	CA	76
		4	Dolok Tinggi Raja	CA	70
		5	Sibolangit	CA	75
		6	Barumon	SM	74
		7	Dolok Surungan	SM	70
		8	Siranggas	SM	70
		9	Karang Gading Langkat Timur Laut	SM	75
		10	Deleng Lancuk	TWA	46
		11	Laut Debuk-debuk	TWA	66
3	BBKSDA Jawa Barat				
		1	Dungus Iwul	CA	52
		2	Yan Lapa	CA	51
		3	Telaga Warna	CA	70
		4	Takokak	CA	62
		5	Burangrang	CA	78
		6	Telaga Parengan	CA	57
		7	Gunung Tilu	CA	69
		8	Gunung Jagat	CA	60
		9	Kawah Kamojang	CA	59
		10	Leweung Sancang	CA	69
		11	Papandayan	CA	61
		12	Telaga Bodas	CA	70
		13	Cikepuh	SM	72
		14	Gunung Sawal	SM	65
		15	Sindang Kerta	SM	67
		16	Masigit Kareumbi	TB	67
		17	Jember	TWA	71
		18	Telaga Patengan	TWA	58
		19	Cimanggu	TWA	60
		20	Gunung Guntur	TWA	59
		21	Papandayan	TWA	70
		22	Sukawayana	TWA	71
		23	Telaga Warna	TWA	72
		24	Sangiang	TWA	67
4	BBKSDA Jawa Timur				
		1	Gunung Picis	CA	79

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3	4	5
		2 Sigogor	CA	79
		3 Manggis Gadungan	CA	67
		4 Besowo Gadungan	CA	63
		5 Pulau Bawean	CA	67
		6 Saobi	CA	77
		7 Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup	CA	76
		8 Gunung Abang	CA	73
		9 Pulau Bawean	SM	71
		10 Nusa Barong	SM	73
		11 Dataran Tinggi Yang	SM	82
		12 Gunung Baung	TWA	76
		13 Kawah Ijen	TWA	79
5	BBKSDA NTT			
		1 Kemang Boleng I	CA	46
		2 Kemang Boleng II	CA	44
		3 Ndeti Kelikima	CA	40
		4 Riung	CA	35
		5 Watu Ata	CA	46
		6 Mutis	CA	49
		7 Wae Wuul	CA	57
		8 Wolo Tado	CA	47
		9 Kateri	SM	63
		10 Perhatu	SM	37
		11 Danau Tuadale	SM	46
		12 Camplong	TWA	73
		13 Gugus P. Maumere	TWA	52
		14 Pulau Batang	TWA	38
		15 Tujuh Belas Pulau	TWA	63
		16 Tuti Adagae	TWA	52
		17 Baumata	TWA	73
6	BBKSDA Sulawesi Selatan			
		1 Komara	SM	65
		2 Komara	TB	65
		3 Gandang Dewata	TN	53
		4 Lejja	TWA	73
		5 Malino	TWA	49
		6 Nanggala III	TWA	66
		7 Sidrap	TWA	53
7	BBKSDA Papua			
		1 Bupul	CA	55
		2 Pegunungan Wayland	CA	27
		3 Pulau Supiori	CA	55

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3	4	5
		4 Tanjung Wiay	CA	63
		5 Mapia	KSA/KPA	30
		6 Danau Bian	SM	60
		7 Memberamo Foja	SM	48
		8 Pulau Pombo	SM	40
		9 Nabire	TWA	53
		10 Supiori	TWA	53
8	BBKSDA Papua Barat			
		1 Pualu Misool	CA	46
		2 Pegunungan Tamrau Selatan	CA	38
		3 Pegunungan Tamrau Utara	CA	58
		4 Pulau Salawati Utara	CA	44
		5 Teluk Bintuni	CA	51
		6 Pantai Sausafor	CA	56
		7 Pegunungan Kumawa	CA	48
		8 Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	SM	47
		9 Pulau Venu	SM	43
		10 Sidei Wibain	SM	59
		11 Beriat	TWA	68
		12 Gunung Meja	TWA	69
9	BKSDA Aceh			
		1 Janthoi	TWA	78
		2 Rawa Singkil	SM	83
		3 Lingga Isaq	TB	73
		4 Pulau Weh	TWA	82
10	BKSDA Sumatera Barat			
		1 Lembah Harau	CA	59
		2 Lembai Anai	CA	59
		3 Batang Palupuh	CA	52
		4 Beringin Sati	CA	44
		5 Batang Pangean II	CA	52
		6 Maninjau	CA	58
		7 Arau Hilir dan Air Tarusan	SM	65
		8 Gunung Marapi	TWA	63
		9 Gunung Sago Malintang	TWA	52
		10 Lembah Harau	TWA	73
11	BKSDA Jambi			
		1 Durian Luncuk I	CA	75
		2 Durian Luncuk II	CA	76
		3 Hutan Bakau Pantai Timur	CA	75
12	BKSDA Bengkulu dan Lampung			
		1 Bukit Barisan Selatan	CA	43

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
		2	Pagar Gunung I	CA	68
		3	Pagar Gunung II	CA	68
		4	Pagar Gunung III	CA	77
		5	Pagar Gunung IV	CA	77
		6	Pagar Gunung V	CA	77
		7	Talang Ulu I	CA	75
		8	Talang Ulu II	CA	75
		9	Taba Penanjung I	CA	75
		10	Taba Penanjung II	CA	75
		11	Danau Dusun Besar	CA	78
		12	Kepulauan Krakatau	CA	76
		13	Pasar Ngalam	CA	77
		14	Pasar Seluma	CA	70
		15	Pasar Talo	CA	70
		16	Danau Dendam Tak Sudah	TWA	58
		17	Bukit Kaba	TWA	81
		18	Rawa Kandis	KSA/KPA	45
13	BKSDA Sumatera Selatan				
		1	Dangku	SM	71
		2	Isau-isau	SM	78
		3	Gunung Raya	SM	66
		4	Punti Kayu	TWA	76
		5	Bukit Selero (eks PLG KH Isau-isau)	TWA	70
14	BKSDA Jakarta				
		1	Pulau Bokor	CA	79
		2	Muara Angke	SM	78
		3	Pulau Rambut	SM	86
		4	Angke Kapuk	TWA	86
15	BKSDA Jawa Tengah				
		1	Peson Subah I	CA	67
		2	Peson Subah II	CA	69
		3	Donoloyo	CA	77
		4	Telogoreng	CA	78
		5	Cabak	CA	79
		6	Kembang	CA	74
		7	Gebugan	CA	66
		8	Sepakung	CA	73
		9	Gunung Butak	CA	81
		10	Pantodomas	CA	83
		11	Kecubung Ulolanang	CA	73
		12	Nusakambangan Barat	CA	78
		13	Pringombo II	CA	73

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
		14	Bantarbolang	CA	77
		15	Jatinegara/ Sub Vak 18C/19B	CA	77
		16	Gunung Tunggangan	SM	72
		17	Gunung Selok	TWA	79
16	BKSDA Yogyakarta				
		1	Batu Gamping	CA	81
		2	Imogiri	CA	77
		3	Paliyan	SM	73
		4	Sermo	SM	76
		5	Batu Gamping	TWA	81
17	BKSDA Bali				
		1	Panelokan (KPHK Kintamani)	TWA	62
		2	Gunung Batur Bukit Payang	TWA	66
18	BKSDA NTB				
		1	Pulau Sangiang	CA	59
		2	Pedauh	CA	60
		3	Pulau Moyo	TB	58
		4	Gunung Tunak	TWA	80
		5	Madapangga	TWA	76
		6	Pelangan	TWA	39
		7	Pulau Moyo	TWA	55
		8	Pulau Satonda	TWA	66
		9	Suranadi	TWA	76
19	BKSDA Kalimantan Barat				
		1	Gunung Raya Pasi	CA	75
		2	Gunung Dungan / Gunung Batu	TWA	51
		3	Gunung Melintang	TWA	56
		4	Tanjung Belimbing	TWA	76
20	BKSDA Kalimantan Selatan				
		1	Gunung Kentawan	CA	70
		2	Sungai Bulan dan Sungai Lulan	CA	58
		3	Teluk Pamukan	CA	69
		4	Pleihari Tanah laut	SM	72
		5	Pulau Bakut	TWA	71
		6	Pulau Burung dan Suwangi	TWA	61
		7	Pulau Kembang	TWA	67
21	BKSDA Kalimantan Tengah				
		1	Bukit Sapat Hawung	CA	55
		2	Bukit Tangkiling	CA	23
		3	Bukit Rawi (Eks PLG II)	KSA/KPA	25
		4	EX PLG IV	KSA/KPA	20
		5	Marang (Eks PLG I)	KSA/KPA	23

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
		6	Lamandau	SM	72
		7	Tanjung Keluang	TWA	67
22	BKSDA Kalimantan Timur				
		1	Muara Kaman Sedulang	CA	67
		2	Padang Luwai	CA	65
		3	Pulau Semama	SM	76
		4	Pulau Sangalaki	TWA	77
23	BKSDA Sulawesi Tenggara				
		1	Kakenauwe	CA	75
		2	Lamedae	CA	75
		3	Lambusango	SM	73
		4	Tanjung Amolengo	SM	74
		5	Kepulauan Padamarang	TWAL	78
		6	Mangolo	TWA	70
24	BKSDA Sulawesi Tengah				
		1	Gunung Dako	CA	81
		2	Gunung Sojol	CA	83
		3	Pangi Binangga	CA	77
		4	Tanjung Api	CA	74
		5	Bakiriang	SM	78
		6	Pinjan/Tanjung Matop	SM	71
		7	Pulau Dolangan	SM	72
		8	Bancea	TWA	72
		9	Pulau Pasoso	SM	82
25	BKSDA Sulawesi Utara				
		1	Gunung Ambang	CA	46
		2	Gunung Dua Saudara	CA	66
		3	Gunung Lokon	CA	55
		4	Mas Popaya Raja	CA	51
		5	Gunung Manembo-nembo	SM	56
		6	Batu Angus	TWA	60
		7	Batu Putih	TWA	64
26	BKSDA Maluku				
		1	Pulau Angwarmase	CA	69
		2	Pombo	CA	57
		3	Pulau Nustaram	CA	53
		4	Pulau Nuswotar	CA	55
		5	Gunung Sibela Pulau Bacan	CA	60
		6	Pulau Obi	CA	38
		7	Pulau Manuk	SM	45
		8	Tanimbar	SM	70
		9	Pulau Pombo	TWA	66

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
1	2	3		4	5
		10	Gunung Api Banda	TWA	79
		11	Pulau Tobalai	KSA/KPA	39
		12	Masbait	KSA/KPA	60
		13	Larat	KSA/KPA	43
		14	Tafermaar	KSA/KPA	54
C	UPTD TAHURA				
1	UPTD Tahura Pocut Meurah Intan	1	Pocut Meurah Intan	THR	56
2	UPTD Tahura Simeulue	2	Simeulue	THR	28
3	UPTD Tahura Sultan Syarif Hasyim	3	Sultan Syarif Hasyim	THR	52
4	UPTD Tahura Bukit Sari	4	Bukit Sari	THR	67
5	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	5	Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	THR	66
6	UPTD Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	6	Sultan Thaha Syaifuddin	THR	65
7	UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	7	Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	THR	32
8	UPTD Tahura Banten	8	Banten	THR	69
9	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	9	Gunung Palasari - Gunung Kunci	THR	63
10	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	10	Ir. H. Juanda	THR	74
11	UPTD Tahura Pancoran Mas	11	Pancoran Mas	THR	69
12	UPTD Tahura Gunung Bunder	12	Gunung Bunder	THR	70
13	UPTD Tahura R. Soeryo	13	R. Soeryo	THR	82
14	UPTD Tahura Ngurah Rai	14	Ngurah Rai	THR	74
15	UPTD Tahura Sultan Adam	15	Sultan Adam	THR	69
16	UPTD Tahura Bukit Soeharto	16	Bukit Soeharto	THR	75
17	UPTD Tahura Murhum	17	Murhum	THR	67
18	UPTD Tahura Bontobahari	18	Bontobahari	THR	52

Lampiran 4. Baseline Data Penilaian efektivitas Pengelolaan KK tahun 2021

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
A	BALAI / BALAI BESAR TN				
1	BBTN Gunung Leuser	1	Gunung Leuser	TN	74
2	BBTN Kerinci Seblat	2	Kerinci Seblat	TN	72
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	3	Bukit Barisan Selatan	TN	83
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	4	Gunung Gede Pangrango	TN	84
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	5	Bromo Tengger Semeru	TN	78
6	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	6	Betung Kerihun	TN	77
		7	Danau Sentarum	TN	82
7	BBTN Lore Lindu	8	Lore Lindu	TN	80
8	BBTN Teluk Cenderawasih	9	Teluk Cenderawasih	TNL	78
9	BTN Batang Gadis	10	Batang Gadis	TN	70
10	BTN Siberut	11	Siberut	TN	76
11	BTN Tesso Nilo	12	Tesso Nilo	TN	71
12	BTN Bukit Dua Belas	13	Bukit Dua Belas	TN	84
13	BTN Bukit Tiga Puluh	14	Bukit Tiga Puluh	TN	74
14	BTN Berbak dan Sembilang	15	Sembilang	TN	75
		16	Berbak	TN	75
15	BTN Way Kambas	17	Way Kambas	TN	68
16	BTN Ujung Kulon	18	Ujung Kulon	TN	82
17	BTN Kepulauan Seribu	19	Kepulauan Seribu	TNL	78
18	BTN Gunung Halimun Salak	20	Gunung Halimun Salak	TN	70
19	BTN Gunung Ciremai	21	Gunung Ciremai	TN	82
20	BTN Gunung Merapi	22	Gunung Merapi	TN	82
21	BTN Gunung Merbabu	23	Gunung Merbabu	TN	81
22	BTN Meru Betiri	24	Meru Betiri	TN	84
23	BTN Baluran	25	Baluran	TN	74
24	BTN Karimun Jawa	26	Karimun Jawa	TNL	79
25	BTN Alas Purwo	27	Alas Purwo	TN	81
26	BTN Bali Barat	28	Bali Barat	TN	81
27	BTN Gunung Rinjani	29	Gunung Rinjani	TN	71
28	BTN Komodo	30	Komodo	TN	80
29	BTN Gunung Tambora	31	Gunung Tambora	TN	72
30	BTN Kelimutu	32	Kelimutu	TN	75
31	BTN Kayan Mentarang	33	Kayan Mentarang	TN	72
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	34	Bukit Baka Bukit Raya	TN	79
33	BTN Gunung Palung	35	Gunung Palung	TN	76
34	BTN Sebangau	36	Sebangau	TN	77
35	BTN Kutai	37	Kutai	TN	76

NO	UPT/UPTD		NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
36	BTN Tanjung Puting	38	Tanjung Puting	TN	75
37	BTN Kepulauan Togean	39	Kepulauan Togean	TNL	82
38	BTN Bantimurung-Bulusaraung	40	Bantimurung-Bulusaraung	TN	88
39	BTN Bogani Naniwartabone	41	Bogani Nani Wartabone	TN	77
40	BTN Bunaken	42	Bunaken	TNL	77
41	BTN Aketajawe Lolobata	43	Aketajawe Lolobata	TN	80
42	BTN Matalawa	44	Manupeu Tanah Daru	TN	81
		45	Laiwangi Wanggameti	TN	85
43	BTN Rawa Aopa Watumohai	46	Rawa Aopa Watumohai	TN	76
44	BTN Taka Bonerate	47	Taka Bonerate	TNL	84
45	BTN Wakatobi	48	Wakatobi	TNL	83
46	BTN Manusela	49	Manusela	TN	77
47	BTN Lorentz	50	Lorentz	TN	70
48	BTN Wasur	51	Wasur	TN	76
B	BALAI / BALAI BESAR KSDA				
1	BBKSDA Riau				
		1	Bukit Bungkok	CA	70
		2	Pulau Berkeh	CA	70
		3	Gunung Kijang	KSA/KPA	10
		4	Gunung Lengkuas	KSA/KPA	10
		5	Sungai Pulai	KSA/KPA	10
		6	Balai Raja	SM	56
		7	Bukit Batu	SM	72
		8	Bukit Rimbang Bukit Baling	SM	79
		9	Giam Siak Kecil	SM	72
		10	Kerumutan	SM	74
		11	PLG Sebang	SM	48
		12	Tasik Belat	SM	66
		13	Tasik Besar (Serkap)	SM	52
		14	Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)	SM	52
		15	Tasik Tanjung Padang	SM	76
		16	Pulau Rempang	TB	62
		17	Zamrud	TN	73
		18	Buluh Cina	TWA	70
		19	Muka Kuning	TWA	71
		20	Sungai Dumai	TWA	72
2	BBKSDA Sumatera Utara				
		1	Batu Gajah	CA	51

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		2	Batu Ginurit	CA	43
		3	Lubuk Raya	KSA/KPA	42
		4	Dolok Saut	CA	68
		5	Dolok Sibual-Buali	CA	76
		6	Dolok Sipirok	CA	74
		7	Dolok Tinggi Raja	CA	70
		8	Liang Balik	CA	38
		9	Martelu Purba	CA	76
		10	Sibolangit	CA	75
		11	Sei Ledong	KSA/KPA	37
		12	Barumon	SM	74
		13	Dolok Surungan	SM	70
		14	Karang Gading Langkat Timur Laut	SM	75
		15	Siranggas	SM	70
		16	Pulau Pini	TB	36
		17	Deleng Lancuk	TWA	46
		18	Dolok Tinggi Raja	TWA	57
		19	Holiday Resort	TWA	64
		20	Lau Debuk-debuk	TWA	66
		21	Sibolangit	TWA	75
		22	Sicike-cike	TWA	72
		23	Sijaba Huta Ginjang	TWA	55
3	BBKSDA Jawa Barat				
		1	Bojong Larang Jayanti	CA	49
		2	Cadas Malang	CA	62
		3	Cibanteng	CA	71
		4	Cigenteng Cipanyi	CA	57
		5	Dungus Iwul	CA	52
		6	Gunung Burangrang	CA	78
		7	Gunung Jagat	CA	60
		8	Gunung Papandayan	CA	61
		9	Gunung Simpang	CA	65
		10	Gunung Tangkuban Perahu	CA	70
		11	Gunung Tilu	CA	69
		12	Gunung Tukung Gede	CA	59
		13	Junghuhn	CA	61
		14	Kawah Kamojang	CA	59
		15	Leuweung Sancang	CA	69
		16	Malabar	CA	0
		17	Nusa Gede Panjalu	CA	71

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		18	Pananjung Pangandaran	CA	71
		19	Pulau Dua	CA	59
		20	Rawa Danau	CA	57
		21	Sukawayana	CA	71
		22	Takokak	CA	62
		23	Talaga Bodas	CA	70
		24	Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	CA	56
		25	Telaga Patengan	CA	57
		26	Telaga Warna	CA	70
		27	Yanlapa	CA	51
		28	Cikepuh	SM	72
		29	Gunung Sawal	SM	65
		30	Sindangkerta	SM	67
		31	Masigit Kareumbi	TB	67
		32	Cimanggu	TWA	60
		33	Darajat	TWA	61
		34	Gunung Guntur	TWA	59
		35	Gunung Pancar	TWA	70
		36	Gunung Papandayan	TWA	70
		37	Gunung Tampomas	TWA	63
		38	Jember	TWA	71
		39	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	TWA	73
		40	Kamojang	TWA	73
		41	Linggarjati	TWA	71
		42	Pananjung Pangandaran	TWA	72
		43	Pulau Sangiang	TWA	67
		44	Sukawayana	TWA	71
		45	Talaga Bodas	TWA	56
		46	Telaga Patengan	TWA	58
		47	Telaga Warna	TWA	72
4	BBKSDA Jawa Timur				
		1	Manggis Gadungan	CA	67
		2	Besowo Gadungan	CA	63
		3	Ceding	CA	60
		4	Curah Manis Sempolan I-VII	CA	65
		5	Gua Nglirip	CA	72
		6	Gunung Abang	CA	73
		7	Gunung Picis	CA	79
		8	Gunung Sigogor	CA	79

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		9	Janggangan Rogojampi I	CA	64
		10	Janggangan Rogojampi II	CA	72
		11	Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	CA	76
		12	Pancur Ijen I	CA	54
		13	Pancur Ijen II	CA	71
		14	Pulau Bawean	CA	67
		15	Pulau Noko	CA	54
		16	Pulau Nusa	CA	70
		17	Pulau Sempu	CA	73
		18	Saobi	CA	77
		19	Sungai Kolbu Iyang Plateau	CA	74
		20	Watangan Puger	CA	73
		21	Dataran Tinggi Yang	SM	82
		22	Pulau Bawean	SM	71
		23	Pulau Nusa Barung	SM	73
		24	Gunung Baung	TWA	76
		25	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	TWA	79
		26	Tretes	TWA	71
5	BBKSDA NTT				
		1	Hutan Bakau Maubesi	CA	71
		2	Gunung Mutis	CA	49
		3	Kemang Boleng I	CA	46
		4	Kemang Boleng II	CA	44
		5	Ndeta Kelikima	CA	40
		6	Riung	CA	35
		7	Wae Wuul	CA	57
		8	Watu Ata	CA	46
		9	Wolo Tado	CA	47
		10	Sisimeni Sanam	KSA/KPA	0
		11	Ale Aisio	SM	63
		12	Danau Tuadale	SM	46
		13	Egon Ilimedo	SM	61
		14	Harlu	SM	64
		15	Kateri	SM	63
		16	Perhatu	SM	37
		17	Dataran Bena	TB	46
		18	Pulau Ndana	TB	41
		19	Baumata	TWA	73
		20	Bipolo	TWA	52
		21	Camplong	TWA	73

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		22	Gugus Pulau Teluk Maumere	TWAL	52
		23	Manipo	TWA	71
		24	Pulau Batang	TWA	38
		25	Pulau Lapang	TWA	36
		26	Pulau Rusa	TWA	37
		27	Ruteng	TWA	75
		28	Teluk Kupang	TWA	52
		29	Tujuh Belas Pulau	TWA	63
		30	Tuti Adagae	TWA	52
6	BBKSDA Sulawesi Selatan				
		1	Faruhumpenai	CA	70
		2	Kalaena	CA	70
		3	Ponda-ponda	CA	71
		4	Komara	SM	65
		5	Komara	TB	65
		6	Gandang Dewata	TN	53
		7	Cani Sirenreng	TWA	56
		8	Danau Mahalona	TWA	60
		9	Danau Matano	TWA	59
		10	Danau Towuti	TWA	56
		11	Lejja	TWA	73
		12	Malino	TWA	49
		13	Nanggala III	TWA	66
		14	Sidrap	TWA	53
		15	Sopeng	KSA/KPA	0
		16	Toraja Utara	KSA/KPA	0
		17	Calon Tahura Mesawa	KSA/KPA	0
7	BBKSDA Papua				
		1	Biak Utara	CA	51
		2	Bupul	CA	55
		3	Enarotali	CA	38
		4	Pegunungan Cycloops	CA	65
		5	Pegunungan Wayland	CA	27
		6	Yapen Tengah	CA	48
		7	Pulau Supiori	CA	55
		8	Tanjung Wiay	CA	63
		9	Mapia	KSA/KPA	30
		10	Danau Bian	SM	60
		11	Memberamo Foja	SM	48
		12	Pegunungan Jayawijaya	SM	20

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		13	Pulau Dolok	SM	40
		14	Pulau Komolon	SM	38
		15	Pulau Pombo	SM	40
		16	Savan	SM	40
		17	Nabire	TWA	53
		18	Supiori	TWA	53
		19	Teluk Youtefa	TWA	53
8	BBKSDA Papua Barat				
		1	Waigeo Timur	CA	74
		2	Waigeo Barat	CA	74
		3	Pualu Misool	CA	46
		4	Pegunungan Arfak	CA	56
		5	Pegunungan Fakfak	CA	60
		6	Pegunungan Tamrau Selatan	CA	38
		7	Pegunungan Tamrau Utara	CA	58
		8	Pegunungan Wondiboy	CA	49
		9	Pulau Salawati Utara	CA	44
		10	Teluk Bintuni	CA	51
		11	Pantai Sausafor	CA	56
		12	Pegunungan Kumawa	CA	48
		13	Pulau Batanta Barat	CA	47
		14	Pulau Kofiau	CA	15
		15	Wagura Kote	CA	29
		16	Hutan Pendidikan Tuan Wowi	KSA/KPA	0
		17	Mubrani - Kaironi	SM	48
		18	Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	SM	47
		19	Pulau Venu	SM	43
		20	Sidei Wibain	SM	59
		21	Waigeo	SM	0
		22	Beriat	TWA	68
		23	Gunung Meja	TWA	69
		24	Klamono	TWA	63
		25	Sorong	TWA	70
9	BKSDA Aceh				
		1	Hutan Pinus Janthoi	CA	87
		2	Serbojadi	CA	74
		3	Rawa Singkil	SM	83
		4	Lingga Isaq	TB	73
		5	Jhantoi	TWA	78
		6	Kepulauan Banyak	TWA	79

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		7	Kuta Malaka	TWA	52
		8	Pulau Weh	TWA	82
10	BKSDA Sumatera Barat				
		1	Baringin Sati	CA	44
		2	Batang Palupuh	CA	52
		3	Batang Pangean I	CA	52
		4	Batang Pangean II	CA	52
		5	Lembah Anai	CA	59
		6	Lembah Harau	CA	59
		7	Maninjau	CA	58
		8	Rimbo Panti	CA	49
		9	Arau Hilir dan Air Tarusan	SM	65
		10	Barisan	SM	61
		11	Malampah Alahan Panjang	SM	58
		12	Pagai Selatan	SM	45
		13	Air Putih Kelok 9	TWA	53
		14	Gunung Marapi	TWA	63
		15	Gunung Sago Malintang	TWA	52
		16	Lembah Harau	TWA	73
		17	Mega Mendung	TWA	49
		18	Rimbo Panti	TWA	59
		19	Saibi Sarabua	TWA	36
		20	Singgalang Tandikat	TWA	53
11	BKSDA Jambi				
		1	Durian Luncuk I	CA	75
		2	Durian Luncuk II	CA	76
		3	Hutan Bakau Pantai Timur	CA	75
		4	Sungai Batara	CA	25
		5	Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	KSA/KPA	39
		6	Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	KSA/KPA	39
12	BKSDA Bengkulu dan Lampung				
		1	Air Alas	CA	58
		2	Air Seblat	CA	48
		3	Bukit Barisan Selatan	CA	43
		4	Danau Dusun Besar	CA	78
		5	Danau Menghijau	CA	53
		6	Kepulauan Krakatau	CA	76
		7	Kioyo I dan II	CA	71
		8	Muko-muko	CA	55

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		9	Pagar Gunung I	CA	68
		10	Pagar Gunung II	CA	68
		11	Pagar Gunung III	CA	77
		12	Pagar Gunung IV	CA	77
		13	Pagar Gunung V	CA	77
		14	Pasar Ngalam	CA	77
		15	Pasar Seluma	CA	70
		16	Pasar Talo	CA	70
		17	Sungai Bahewo	CA	64
		18	Taba Pananjung I	CA	75
		19	Taba Pananjung II	CA	75
		20	Talang Ulu I	CA	75
		21	Talang Ulu II	CA	75
		22	Tanjung Laksaha	CA	76
		23	Teluk Klowe	CA	70
		24	Rawa Kandis	KSA/KPA	45
		25	Gunung Nanu'ua	TB	71
		26	Semidang Bukit Kabu	TB	62
		27	Air Hitam	TWA	70
		28	Air Ketebat Danau Tes	TWA	50
		29	Air Rami I/II	TWA	50
		30	Bukit Kaba	TWA	81
		31	Danau Dendam Tak Sudah	TWA	58
		32	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA	53
		33	Muko-muko	TWA	56
		34	Pantai Panjang dan Pulau Baai	TWA	68
		35	Seblat	TWA	62
		36	Way Hawang	TWA	44
13	BKSDA Sumatera Selatan				
		1	Bentayan	SM	70
		2	Dangku	SM	71
		3	Gumai Pasemah	SM	71
		4	Gunung Raya	SM	66
		5	Isau-isau	SM	78
		6	Padang Sugihan	SM	70
		7	Gunung Maras	TN	43
		8	Bukit Selero (eks PLG KH Isau-isau)	TWA	70
		9	Gunung Permisan	TWA	56
		10	Jering Menduyung	TWA	64
		11	Punti Kayu	TWA	76

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
14	BKSDA Jakarta				
		1	Pulau Bokor	CA	79
		2	Muara Angke	SM	78
		3	Pulau Rambut	SM	86
		4	Angke Kapuk	TWA	86
15	BKSDA Jawa Tengah				
		1	Bantarbolang	CA	77
		2	Bekutuk	CA	76
		3	Cabak I/II	CA	79
		4	Curug Bengkawah	CA	65
		5	Donoloyo	CA	77
		6	Gebugan	CA	66
		7	Gunung Butak	CA	81
		8	Gunung Celering	CA	85
		9	Sub Vak 18C/19B	CA	77
		10	Karang Bolong	CA	77
		11	Kecubung Ulo Lanang	CA	73
		12	Keling I ABC	CA	79
		13	Keling II/III	CA	75
		14	Kembang	CA	74
		15	Moga	CA	76
		16	Nusakambangan Barat	CA	78
		17	Nusakambangan Timur	CA	75
		18	Pager Wunung Darupono	CA	76
		19	Pantodomas	CA	83
		20	Peson Subah I	CA	67
		21	Peson Subah II	CA	69
		22	Pringombo I	CA	74
		23	Pringombo II	CA	73
		24	Sepakung	CA	73
		25	Telogo Dringo	CA	74
		26	Telogo Ranjeng	CA	78
		27	Telogo Sumurup	CA	71
		28	Wijaya Kusuma	CA	71
		29	Gunung Tunggangan	SM	72
		30	Grojogan Sewu	TWA	76
		31	Guci	TWA	75
		32	Gunung Selok	TWA	79
		33	Sumber Semen	TWA	75
		34	Telogo Warno / Telogo Pengilon	TWA	76
16	BKSDA Yogyakarta				

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		1	Batu Gamping	CA	81
		2	Imogiri	CA	77
		3	Paliyan	SM	73
		4	Sermo	SM	76
		5	Batu Gamping	TWA	81
17	BKSDA Bali				
		1	Batukau	CA	70
		2	Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	TWA	74
		3	Gunung Batur Bukit Payang	TWA	66
		4	Panelokan	TWA	62
		5	Sangeh (RTK.21)	TWA	71
18	BKSDA NTB				
		1	Pulau Sangiang	CA	59
		2	Pedauh	CA	60
		3	Toffo Kota Lambu	CA	40
		4	Danuera	KSA/KPA	9
		5	Jereweh	KSA/KPA	31
		6	Pulau Panjang	CA	50
		7	Pulau Moyo	TB	58
		8	Bangko Bangko	TWA	56
		9	Danau Rawa Taliwang	TWA	61
		10	Gunung Tunak	TWA	80
		11	Kerandangan	TWA	74
		12	Madapangga	TWA	76
		13	Pelangan	TWA	39
		14	Pulau Moyo	TWA	55
		15	Pulau Satonda	TWA	66
		16	Semongkat	TWA	68
		17	Suranadi	TWA	76
		18	Tanjung Tampa	TWA	46
19	BKSDA Kalimantan Barat				
		1	Gunung Raya Pasi	CA	75
		2	Karimata	CA	56
		3	Lo Pat Foen Pi	CA	52
		4	Mandor	CA	55
		5	Muara Kendawangan	CA	70
		6	Nyit Penrissen	CA	70
		7	Asuansang	TWA	54
		8	Baning	TWA	70
		9	Bukit Kelam	TWA	71

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		10	Gunung Dungan / Gunung Batu	TWA	51
		11	Gunung Melintang	TWA	56
		12	Sungai Liku	TWA	64
		13	Tanjung Belimbing	TWA	76
20	BKSDA Kalimantan Selatan				
		1	Gunung Kentawan	CA	70
		2	Sungai Bulan dan Sungai Lulan	CA	58
		3	Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	CA	62
		4	Teluk Pamukan	CA	69
		5	Asam-asam	KSA/KPA	18
		6	Tanjung Pengharapan - Sungai Embung	KSA/KPA	20
		7	Kuala Lupak	SM	70
		8	Pleihari Tanah laut	SM	72
		9	Pulau Kaget	SM	71
		10	Pleihari Tanah Laut	TWA	61
		11	Pulau Bakut	TWA	71
		12	Pulau Burung dan Suwangi	TWA	61
		13	Pulau Kembang	TWA	67
21	BKSDA Kalimantan Tengah				
		1	Bukit Sapat Hawung	CA	55
		2	Bukit Tangkiling	CA	23
		3	Pararawen I dan II	CA	64
		4	Bukit Rawi (Eks PLG II)	KSA/KPA	25
		5	EX PLG IV	KSA/KPA	20
		6	Marang (Eks PLG I)	KSA/KPA	23
		7	Sei Sebangau	KSA/KPA	25
		8	Sungai Barito	KSA/KPA	26
		9	Sungai Kapuas	KSA/KPA	34
		10	Tanjung Malatayur	KSA/KPA	18
		11	Lamandau	SM	72
		12	Bukit Tangkiling	TWA	62
		13	Tanjung Keluang	TWA	67
22	BKSDA Kalimantan Timur				
		1	Muara Kaman Sedulang	CA	67
		2	Padang Luwai	CA	65
		3	Teluk Adang	CA	71
		4	Teluk Apar	CA	62
		5	Pulau Semama	SM	76
		6	Pulau Sangalaki	TWA	77

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
23	BKSDA Sulawesi Tenggara				
		1	Kakenauwe	CA	75
		2	Lamedae	CA	75
		3	Napabalano	CA	73
		4	Buton Utara	SM	71
		5	Lambusango	SM	73
		6	Tanjung Amolengo	SM	74
		7	Tanjung Batikolo	SM	71
		8	Tanjung Peropa	SM	73
		9	Kepulauan Padamarang	TWAL	78
		10	Mangolo	TWA	70
		11	Teluk Lasolo	TWAL	78
		12	Tirta Rimba / Air Jatuh	TWA	73
24	BKSDA Sulawesi Tengah				
		1	Gunung Dako	CA	81
		2	Gunung Sojol	CA	83
		3	Gunung Tinombala	CA	71
		4	Morowali	CA	65
		5	Pamona	CA	73
		6	Pangi Binangga	CA	77
		7	Tanjung Api	CA	74
		8	Bakiriang	SM	78
		9	Lombuyan	SM	58
		10	Pati-Pati	CA	63
		11	Pinjan/Tanjung Matop	SM	71
		12	Pulau Dolangan	SM	72
		13	Tanjung Santigi	SM	64
		14	Landusa Tomata	TB	58
		15	Bancea	TWA	72
		16	Pulau Pasoso	SM	82
		17	Pulau Tokobae	TWA	47
		18	Wera	TWA	71
25	BKSDA Sulawesi Utara				
		1	Gunung Ambang	CA	46
		2	Gunung Dua Sudara	CA	66
		3	Gunung Lokon	CA	55
		4	Mas Popaya Raja	CA	51
		5	Panua	CA	67
		6	Tangale	CA	47
		7	Tanjung Panjang	CA	47
		8	Nantu	SM	63

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
		9	Gunung Manembo-nembo	SM	56
		10	Karakelang	SM	46
		11	Batu Angus	TWA	60
		12	Batu Putih	TWA	64
		13	Gunung Ambang	TWA	52
26	BKSDA Maluku				
		1	Bekau Huhun	CA	18
		2	Gunung Api Kisar	CA	17
		3	Gunung Sibela Pulau Bacan	CA	60
		4	Lifamatola	CA	35
		5	Pombo	CA	57
		6	Pulau Angwarmase	CA	69
		7	Pulau Nustaram	CA	53
		8	Pulau Nuswotar	CA	55
		9	Pulau Obi	CA	38
		10	Pulau Seho	CA	49
		11	Taliabu	CA	37
		12	Tanjung Sial	CA	55
		13	Tobalai	KSA/KPA	39
		14	Daab	KSA/KPA	31
		15	Danau Tihu	SM	31
		16	Gunung Sahuwai	KSA/KPA	64
		17	Pulau Larat	KSA/KPA	43
		18	Sungai Niff	KSA/KPA	53
		19	Tafermaar	KSA/KPA	54
		20	Masbait	SM	60
		21	Pulau Baun	SM	37
		22	Pulau Kasa	SM	75
		23	Pulau Kobror	SM	38
		24	Pulau Manuk	SM	45
		25	Tanimbar	SM	70
		26	Gunung Api Banda	TWA	79
		27	Pulau Kasa	TWAL	71
		28	Pulau Marsegu	TWAL	74
		29	Pulau Pombo	TWAL	66
C	UPTD TAHURA				
1	UPTD Tahura Lae Kombih	1	Lae Kombih	TAHURA	34
2	UPTD Tahura Pocut Meurah Intan	2	Pocut Meurah Intan	TAHURA	56
3	UPTD Tahura Simeulue	3	Simeulue	TAHURA	28

NO	UPT/UPTD		NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
4	UPTD Tahura Tuanku Tambusai	4	Tuanku Tambusai	TAHURA	23
5	UPTD Tahura Bukit Barisan	5	Bukit Barisan	TAHURA	60
6	UPTD Tahura Sultan Syarif Hasyim	6	Sultan Syarif Hasyim	TAHURA	52
7	UPTD Tahura Dr. Muhammad Hatta	7	Dr. Muhammad Hatta	TAHURA	58
8	UPTD Tahura Bukit Sari	8	Bukit Sari	TAHURA	67
9	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	9	Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	TAHURA	66
10	UPTD Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	10	Sultan Thaha Syaifuddin	TAHURA	65
11	UPTD Tahura Bukit Rabang-Gluguran	11	Bukit Rabang - Gluguran	TAHURA	20
12	UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	12	Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	TAHURA	32
13	UPTD Tahura Wan Abdul Rahman	13	Wan Abdul Rahman	TAHURA	70
14	UPTD Tahura Gunung Lalang	14	Gunung Lalang	TAHURA	12
15	UPTD Tahura Gunung Mangkol	15	Gunung Mangkol	TAHURA	63
16	UPTD Tahura Gunung Menumbing	16	Gunung Menumbing	TAHURA	45
17	UPTD Tahura Banten	17	Banten	TAHURA	69
18	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	18	Gunung Palasari - Gunung Kunci	TAHURA	63
19	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	19	Ir. H. Juanda	TAHURA	74
20	UPTD Tahura Pancoran Mas	20	Pancoran Mas	TAHURA	69
21	UPTD Tahura KGPA A Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	21	KGPA A Mangkunegoro I	TAHURA	70
22	UPTD Tahura Gunung Bunder	22	Gunung Bunder	TAHURA	70
23	UPTD Tahura R. Soeryo	23	R. Soeryo	TAHURA	82
24	UPTD Tahura Ngurah Rai	24	Ngurah Rai	TAHURA	74
25	UPTD Tahura Nuraksa	25	Nuraksa	TAHURA	65
26	UPTD Tahura Prof. Ir. Herman Johannes	26	Prof. Ir. Herman Johannes	TAHURA	45
27	UPTD Tahura Sultan Adam	27	Sultan Adam	TAHURA	69
28	UPTD Tahura Lapak Jaru	28	Lapak Jaru	TAHURA	70
29	UPTD Tahura Bukit Soeharto	29	Bukit Soeharto	TAHURA	75

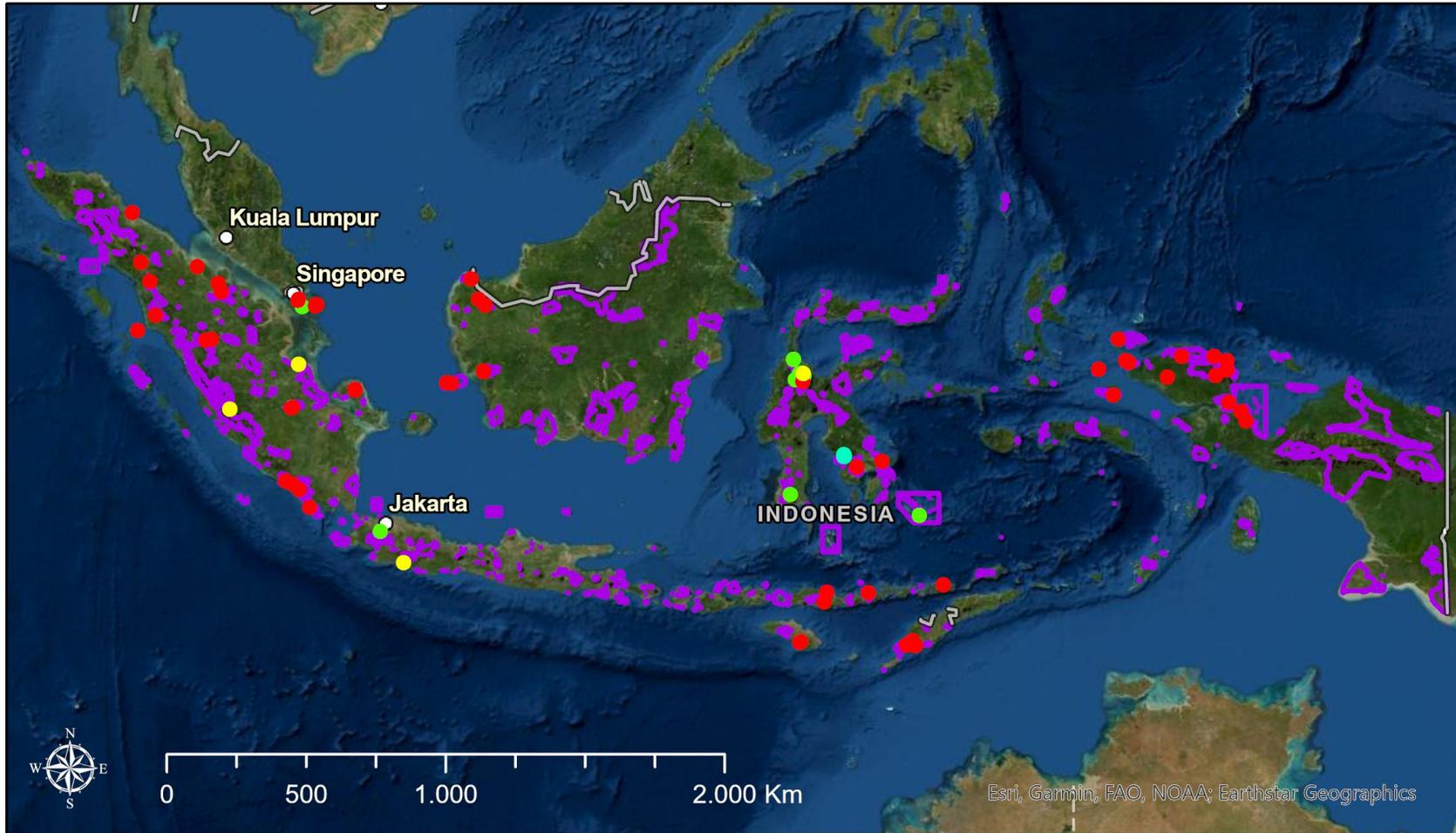
NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
30	UPTD Tahura Lati Petangis	30	Lati Petangis	TAHURA	70
31	UPTD Tahura Murhum	31	Murhum	TAHURA	67
32	UPTD Tahura Abdul Latief/Sinjai	32	Abdul Latief/Sinjai	TAHURA	73
33	UPTD Tahura Bontobahari	33	Bontobahari	TAHURA	52
34	UPTD Tahura Sulteng	34	Sulteng	TAHURA	71
35	UPTD Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)	35	Gunung Tumpa (Haveworang)	TAHURA	76
36	UPTD Tahura Sebatung	36	Sebatung	TAHURA	0
37	Dishutbun Kalbar	37	Pandan Puloh	TAHURA	0
38	Pemda Kab. Malino	38	Malino	TAHURA	0

Lampiran 5. Capaian penanganan konflik tenurial pada Kawasan Konservasi Tahun 2021

Tahapan	UPT	Nama Kawasan	Luas (Ha)
Proses Asesmen (45.301,97 Ha)	1. BBKSDA NTT	CA Watuata	421,24
		CA Wolotado	19,31
		KSA/KPA KH Sisimeni Sanam	553,62
		TWA Bipolo	0,32
		TWA Tuti Adagae	57,26
		TWAL Teluk Maumere	652,86
	2. BBKSDA Papua Barat	CA P. Batanta Barat	52,68
		CA P. Kofiau	92,15
		CA P. Misool Selatan	176,96
		CA P. Salawati	40,67
		CA Pegunungan Arfak	557,57
		CA Pegunungan Tamrau Selatan	24,58
		CA Teluk Bintuni	4,56
		CA Wondiboy	647,28
		CA. P. Waigeo Timur	27,45
		CA. Pegunungan Tamrau Utara	127,18
		SM Mumbrani-Kaironi	10,83
		TN Teluk Cendrawasih	23,02
	3. BBKSDA Riau	KSA/KPA Gunung Kijang	435,48
		KSA/KPA Gunung Lengkuas	685,08
		KSA/KPA Sungai Pulai	71,82
		SM Giam Siak	9.988,34
		SM Rimbang Baling	5.822,32
		SM. Bukit Rimbang Bukit Baling	50,48
		TWA Muka Kuning	84,18

Tahapan	UPT	Nama Kawasan	Luas (Ha)
		TWA Sungai Dumai	3.032,28
		SM Giam Siak Kecil	106,62
		SM Balai Raja	487,71
		SM PLG Sebang	133,02
		TN Zamrud	51,08
	4. BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA Malino	50,00
	5. BBKSDA Sumut	CA. Dolok Sipirok	53,41
		SM. Karang Gading Langkat Timur Laut	7,89
		TN Batang Gadis	32,62
		TWA Sijaba Hutaginjang	305,10
	6. BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	1.442,70
	7. BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	7.874,00
	8. BKSDA Kalbar	CA. Gunung Nyiut	139,35
		CAL. Kepulauan Karimata	633,62
		TWA Gunung Melintang	29,69
9. BKSDA Sumsel	SM Dangku	716,00	
	TN Gunung Maras	18,32	
10. BTN Gunung Palung	TN. Gunung Palung	114,25	
11. BTN Matalawa	TN Laiwangi Wanggameti	141,43	
12. BTN Rawa Aopa Watumohai	TN Rawa Aopa Watumohai	2.180,10	
13. BKSDA Sulawesi Tenggara	SM Tanjung Peropa	0,06	
14. BKSDA Sumatera Selatan	SM Gumai Pasemah	72,56	
	SM Isau-isau	4,03	
15. UPTD Tahura Pocut Meurah Intan	THR Pocut Meurah Intan	34,89	
	1. BBKSDA Jawa Barat	CA Bojonglarang Jayanti	215,00
	2. BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	5.000,00

Tahapan	UPT	Nama Kawasan	Luas (Ha)
Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasinya (5.331 Ha)	3. BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	16,60
	4. BKSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	100,00
Sudah bersepakat (1.628,96 Ha)	1. BBKSDA Papua	CA	15,00
	2. BBKSDA Riau	TWA Sungai Dumai	30,00
	3. BBKSDA Sumut	SM KGLTL	154,76
	4. BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	65,00
	5. BKSDA Sumsel	SM Dangku	280,00
	6. BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	112,45
	7. BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	46,80
	8. BKSDA Sulawesi Tenggara	TWA Mangolo	924,95
Tuntas (17.675,04 Ha)	1. BBKSDA Jawa Barat	TWA Rumpin	75,35
	2. BBKSDA Riau	TB Pulau Rempang	7.577,00
	3. BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA Malino	171,00
	4. BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	507,50
	5. BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	461,00
	6. BKSDA Sumsel	SM Dangku	118,19
	7. BTN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	40,00
	8. BTN Wakatobi	TN Wakatobi	6.825,00
	9. UPTD Tahura Sulteng	THR Sulteng-Paboya	1.900,00



Keterangan:

 Batas Kawasan Konservasi

Lokasi penanganan konflik berdasarkan tahapan:

-  Proses Asesmen
-  Penyusunan Renaksi dan Implementasi
-  Telah Bersepat
-  Tuntas

Lampiran 6. Capaian Pemulihan Ekosistem tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	Tindakan PE 2021 (ha)				Luas Tindakan Lanjutan (pemeliharaan) kumulatif (ha)	Luasa Total Tindakan & Tindakan Lanjutan (Ha)
		Mekanisme Alam	Rehabilitasi	Restorasi	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TN. Taka Bonerate	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.28
2	BTN Komodo	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.06
3	TN Bunaken	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
4	BTN Kayan Mentarang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BTN Matalawa	71.00	0.00	100.00	171.00	30.40	201.40
6	BTN Gunung Palung	0.00	22.50	117.90	140.40	100.00	240.40
7	BTN Baluran	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
8	BTN Gunung Merbabu	0.00	28.37	0.00	28.37	0.00	28.37
9	BTN Bukit Baka Bukit Raya	0.00	7.27	17.74	25.01	0.00	25.01
10	BTN Gunung Ciremai						
12	Balai TN Berbak dan Sembilang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	BTN Gunung Rinjani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Balai KSDA SULTENG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Balai KSDA Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66
16	TN Bukit Tiga Puluh	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
17	BBKSDA NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
18	BTN Manusela	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
19	Balai KSDA Sumsel	2,233.93	550.00	47.00	2,830.93	0.00	2,830.93
20	TN. Aketajawe LOlobata	0.00	43.00	0.00	43.00	30.00	73.00
21	BBTN Gunung Gede Pangrango	53.61	11.80	0.00	65.41	45.71	111.12
22	BBKSDA Sulawesi Selatan	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00

NO	SATUAN KERJA	Tindakan PE 2021 (ha)				Luas Tindakan Lanjutan (pemeliharaan) kumulatif (ha)	Luasa Total Tindakan & Tindakan Lanjutan (Ha)
		Mekanisme Alam	Rehabilitasi	Restorasi	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	BKSDA Sulawesi Tenggara	0.00	112.00	0.30	112.30	600.00	712.30
24	BTN Gunung Halimun Salak	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
25	BKSDA Jambi	0.00	25.00	0.00	25.00	476.00	501.00
26	BTN Way Kambas	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00
27	BKSDA Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	BTN Bukit Duabelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Balai Taman Nasional Kutai	0.00	4,930.00	5,169.50	10,099.50	10,924.00	21,023.50
30	Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	0.00	200.00	0.00	200.00	23.00	223.00
31	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	365.00	443.24	0.00	808.24	50.00	858.24
32	Balai Besar KSDA Jawa Timur	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50	10.50
33	Balai Taman Nasional Batang Gadis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	75.20	0.00	0.00	75.20	0.00	75.20
35	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	0.00	161.20	0.00	161.20	267.00	428.20
36	Balai Taman Nasional Karimunjawa	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22
37	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
38	Balai Taman Nasional Tanjung Puting	0.00	60.00	100.00	160.00	250.00	410.00
39	BBTN Gunung Leuser	0.00	550.00	182.00	732.00	0.00	732.00
40	BBKSDA Sumut	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
41	BKSDA Bengkulu	1,876.28	0.00	0.00	1,876.28	0.00	1,876.28

NO	SATUAN KERJA	Tindakan PE 2021 (ha)				Luas Tindakan Lanjutan (pemeliharaan) kumulatif (ha)	Luasa Total Tindakan & Tindakan Lanjutan (Ha)
		Mekanisme Alam	Rehabilitasi	Restorasi	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	BKSDA Aceh	20.00	0.00	47.00	67.00	30.00	97.00
43	BTN Tesso Nilo	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	1,602.00	5,167.00
44	BKSDA Sumbar	123.53	160.63	0.00	284.16	0.00	284.16
45	BTN Siberut	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00
46	BBKSDA Jawa Barat	590.90	95.00	0.00	685.90	0.00	685.90
47	BKSDA DKI Jakarta	40.94	5.01	0.00	45.95	0.00	45.95
48	BTN Gunung Merapi	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00
49	BTN Alas Purwo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	BTN Meru Betiri	0.00	416.74	0.00	416.74	0.00	416.74
51	BKSDA Jawa Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	18.33
52	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	627.13	0.00	0.00	627.13	0.00	627.13
53	BKSDA Kalimantan Barat	1,713.85	0.00	0.00	1,713.85	0.00	1,713.85
54	BKSDA Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	BKSDA NTB	15.00	33.00	0.00	48.00	12.00	60.00
56	BTN Sebangau	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
57	BKSDA Bali	40.00	20.00	0.00	60.00	0.00	60.00
58	BTN Bali Barat	57.00	36.20	0.00	93.20	0.00	93.20
59	BTN Komodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	BKSDA Sulawesi Utara	593.44	0.00	0.00	593.44	0.00	593.44
61	BTN Gunung Tambora	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
62	BTN Bantimurung Bulusaraung	200.00	400.00	300.00	900.00	300.00	1,200.00
63	BTN Togean	0.00	9.48	1.98	11.46	0.00	11.46

NO	SATUAN KERJA	Tindakan PE 2021 (ha)				Luas Tindakan Lanjutan (pemeliharaan) kumulatif (ha)	Luasa Total Tindakan & Tindakan Lanjutan (Ha)
		Mekanisme Alam	Rehabilitasi	Restorasi	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
64	BBTN Bromo Tengger Semeru	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00
65	BTN Wakatobi	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
66	BBKSDA Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00
67	BBKSDA Papua Barat	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	40.00
68	BTN Wasur	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
69	BTN Lorentz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	BTN Ujung Kulon	813.00	0.00	0.00	813.00	0.00	813.00
71	Balai Besar KSDA Riau	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00
72	Balai KSDA Kalsel	0.00	2.00	0.00	2.00	35.00	37.00
73	BTN Kelimutu	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
74	Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	200.00	0.00	100.00	300.00	1,205.00	1,505.00
75	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	157.88	30.90	0.00	188.78	144.60	333.38
	J U M L A H	10,032.91	14,507.34	6,515.60	31,055.85	18,456.37	49,512.22

Lampiran 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT

NO	NAMA UPT	PAGU	REALISASI	%
1	BBKSDA JAWA BARAT	4.827.016.000	4.676.830.051	96,89
2	BBKSDA JAWA TIMUR	2.960.870.000	2.812.678.528	95,00
3	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	3.100.076.000	2.780.531.236	89,69
4	BBKSDA PAPUA	2.978.127.000	2.969.267.513	99,70
5	BBKSDA PAPUA BARAT	2.337.246.000	2.323.369.707	99,41
6	BBKSDA RIAU	6.463.812.000	6.414.312.774	99,23
7	BBKSDA SULAWESI SELATAN	12.085.570.000	9.581.507.054	79,28
8	BBKSDA SUMATERA UTARA	3.720.277.000	3.709.784.811	99,72
9	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	6.981.906.000	6.930.865.201	99,27
10	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	3.203.636.000	3.072.537.030	95,91
11	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	5.054.089.000	4.754.923.750	94,08
12	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	1.912.801.000	1.910.837.976	99,90
13	BBTN GUNUNG LEUSER	12.633.696.000	2.957.119.755	23,41
14	BBTN KERINCI SEBLAT	16.455.513.000	15.743.925.228	95,68
15	BBTN LORE LINDU	3.186.056.000	3.106.187.171	97,49
16	BBTN TELUK CENDERAWASIH	1.917.000.000	1.916.991.000	100,00
17	BKSDA BALI	987.347.000	984.038.811	99,66
18	BKSDA BENGKULU	2.411.706.000	2.352.470.353	97,54
19	BKSDA D.I YOGYAKARTA	877.280.000	872.657.951	99,47
20	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	855.800.000	849.039.200	99,21
21	BKSDA JAMBI	8.233.589.000	7.650.929.625	92,92
22	BKSDA JAWA TENGAH	1.683.075.000	1.666.643.081	99,02
23	BKSDA KALIMANTAN BARAT	4.293.461.000	4.052.674.230	94,39
24	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	3.063.070.000	3.023.266.633	98,70
25	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	2.050.730.000	1.884.825.063	91,91
26	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	6.361.180.000	6.219.485.473	97,77
27	BKSDA MALUKU	2.804.580.000	2.090.050.000	74,52
28	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	10.609.440.000	4.678.032.801	44,09
29	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	2.086.619.000	2.020.768.000	96,84
30	BKSDA SULAWESI TENGAH	3.153.206.000	3.128.973.800	99,23
31	BKSDA SULAWESI TENGGARA	4.409.100.000	4.408.503.596	99,99
32	BKSDA SULAWESI UTARA	4.330.090.000	4.292.272.352	99,13
33	BKSDA SUMATERA BARAT	4.270.395.000	3.540.405.793	82,91
34	BKSDA SUMATERA SELATAN	6.387.728.000	5.759.415.102	90,16
35	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	1.662.285.000	1.637.853.737	98,53
36	BTN ALAS PURWO	473.940.000	473.940.000	100,00
37	BTN BALI BARAT	667.050.000	639.399.500	95,85
38	BTN BALURAN	2.381.703.000	2.360.177.335	99,10
39	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	3.020.097.000	3.010.999.855	99,70
40	BTN BATANG GADIS	1.644.637.000	1.458.395.587	88,68
41	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	4.084.049.000	2.790.342.925	68,32

NO	NAMA UPT	PAGU	REALISASI	%
42	BTN BOGANI NANI WARTABONE	3.590.853.000	3.573.025.200	99,50
43	BTN BUKIT 12	3.219.778.000	3.033.382.556	94,21
44	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	1.625.016.000	1.617.920.628	99,56
45	BTN BUKIT TIGA PULUH	2.857.040.000	2.750.579.502	96,27
46	BTN BUNAKEN	1.953.525.000	1.951.576.538	99,90
47	BTN GUNUNG CEREMAI	2.043.038.000	2.039.060.350	99,81
48	BTN GUNUNG HALIMUN	2.682.854.000	2.678.623.237	99,84
49	BTN GUNUNG MERAPI	1.281.050.000	1.232.482.741	96,21
50	BTN GUNUNG MERBABU	1.590.457.000	1.581.503.189	99,44
51	BTN GUNUNG PALUNG	2.931.671.000	2.926.946.154	99,84
52	BTN GUNUNG RINJANI	2.296.636.000	2.286.331.731	99,55
53	BTN KARIMUN JAWA	1.616.681.000	1.556.915.140	96,30
54	BTN KAYAN MENTARANG	1.515.772.000	1.512.962.254	99,81
55	BTN KELIMUTU	802.710.000	801.612.000	99,86
56	BTN KEP. SERIBU	1.316.001.000	947.738.400	72,02
57	BTN KEPULAUAN TOGEAN	2.433.055.000	2.409.666.000	99,04
58	BTN KOMODO	2.381.765.000	2.276.233.434	95,57
59	BTN KUTAI	3.322.375.000	3.255.997.227	98,00
60	BTN LORENTZ	1.999.304.000	1.574.511.800	78,75
61	BTN MATALAWA	2.091.780.000	2.083.857.716	99,62
62	BTN MANUSELLA	1.402.488.000	1.323.010.000	94,33
63	BTN MERU BETIRI	1.853.100.000	1.852.329.988	99,96
64	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	3.211.291.000	3.210.399.000	99,97
65	BTN SEBANGAU	3.417.085.000	3.365.427.446	98,49
66	BTN SIBERUT	1.248.825.000	1.246.588.059	99,82
67	BTN TAKA BONERATE	2.157.690.000	2.154.466.960	99,85
68	BTN TAMBORA	2.383.702.000	2.361.369.193	99,06
69	BTN TANJUNG PUTING	1.923.711.000	1.843.082.173	95,81
70	BTN TESSO NILO	2.609.921.000	2.577.013.926	98,74
71	BTN UJUNG KULON	3.303.105.000	3.297.853.638	99,84
72	BTN WAKATOBI	2.040.951.000	2.040.930.800	100,00
73	BTN WASUR	1.422.921.000	1.390.489.800	97,72
74	BTN WAY KAMBAS	2.416.636.000	2.217.799.659	91,77
	JUMLAH	245.562.635.000	218.478.916.027	88,97



AWESOME

active

worth

effective

simple

outstanding

motivated

empathy



Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

GD. MANGALA WANABAKTI BLOK 7 LT.7, JL JEND.
GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
TEL/FAX. 5720229 E-MAIL : DITKK@MENLHK.GO.ID